



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN
STUDI KASUS :
DESA KERTOSONO, KECAMATAN SIDAYU, KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

TESIS

AFRIZAL S. HUTASUHUT

0706306024

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN
STUDI KASUS :
DESA KERTOSONO, KECAMATAN SIDAYU, KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

AFRIZAL S. HUTASUHUT

0706306024

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEKHUSUSAN MANAGEMEN SEKTOR PUBLIK

JAKARTA

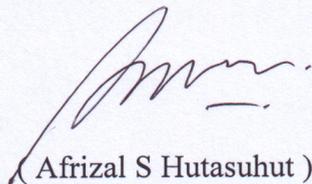
JANUARI, 2011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

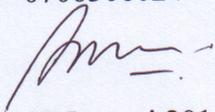
Jakarta, Januari 2011



(Afrizal S Hutasuhut)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Afrizal S. Hutasuhut
NPM : 0706306024
Tanda Tangan : 
Tanggal : 17 Januari 2011

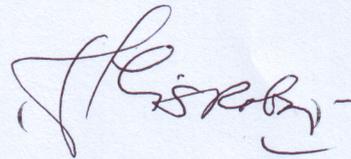
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Afrizal Sopusjion Hutasuhut
Program Studi : Mageister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur**

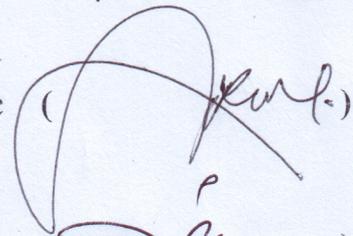
Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

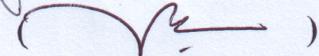
Pembimbing : Darlis Rabai, SE., MA



Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc. sc



Penguji : Dr. Vivi Yulaswati



Ditetapkan : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Karen atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi di Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Darlis Rabai Rabai, S.E.,M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) Ayah dan Mama yang senantiasa sabar dalam memberikan dukungan moral, doa, dan semangat dalam penulisan tesis ini;
- (3) Eyang Bahriyati Syafi'I, Tante Ida Herawati, Mas Trian, yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan Tesis;
- (4) Bapak Fatah Yasin, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, atas bantuannya dalam memperoleh data yang dibutuhkan;
- (5) Bapak M. Dhofir, selaku Kepala Desa Kertosono, beserta jajarannya, atas fasilitas yang diberikan selama penyusunan tesis ini dilaksanakan
- (6) Bapak Maftuh Ahnan, Selaku Kepala UPK Desa Kertosono yang telah membantu memfasilitasi segala macam kebutuhan dalam penelitian tesis;
- (7) Masyarakat Desa Kertosono selaku objek penelitian, atas sambutan, keramahan, serta kerjasamanya selama penelitian tesis;
- (8) Pihak Tata Usaha MPKP-FEUI, Mas Deddy, Mas Harris, Mas Triman, Mbak Siti, dkk;
- (9) Rekan-rekan DEMISKINERS XVIII khususnya Pak Ginanjar Syamsuar, Pak Hendratno Tuhiman, Pak Rama Chandra, Chairina Hanum, Lidya

Nafatilon, Mbak Lidya Sitanggang, Mbak Ika Permanasari, Restu Untari P yang telah banyak memberikan dukungan moral, data, literatur dan diskusi-diskusi menarik selama perkuliahan dan pengerjaan Tesis;

- (10) Rekan-rekan MPKP XVIII Sore yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman dan sahabat selama ini;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, January 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrizal S. Hutasuhut
NPM : 0706306024
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

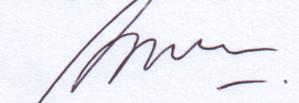
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN STUDI KASUS : DESA KERTOSONO, KECAMATAN SIDAYU, KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 17 Januari 2011
Yang Menyatakan


(Afrizal S. Hutasuhut)

ABSTRAK

Nama : Afrizal Sopusjion Hutasuhut
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Studi Kasus Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis *SWOT*.

Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyarakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

Kata Kunci : UPK, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Name : Afrizal Sopujion Hutasukhut
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Community Empowerment Through Movement Integrated Poverty Alleviation Programme, Case Study Kertosono Village, District Sidayu, Gresik, East Java Province

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed.

This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis.

From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy investment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business.

Key Word : UPK, Poverty, Empowerment society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Kemiskinan	14
2.1.2 Pengentasan Kemiskinan	24
2.1.3 Lembaga Keuangan Mikro.....	27
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38

3.	METODOLOGI PENELITIAN.....	40
	3.1 Metode Pengumpulan Data	40
	3.1.1 Metode <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA).....	40
	3.2 Metode Analisis.....	55
4.	PROFIL DESA DAN PROGRAM.....	57
	4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	57
	4.1.1 Kondisi Geografis	57
	4.1.2 Kondisi Demografi.....	58
	4.1.3 Mata Pencaharian Masyarakat	61
	4.1.4 Sarana dan Pra sarana	63
	4.2 Gambaran Umum Program Gerdu-Taskin	66
	4.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Program di Desa Kertosono ...	72
5.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
	5.1 Analisis Kualitatif.....	79
	5.1.1 Dinamika Kehidupan	79
	5.1.2 Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan pada kehidupan masyarakat	99
	5.1.3 Diagram venn kelembagaan.....	101
	5.1.4 Kalender Musim.....	104
	5.1.5 Analisis Penggunaan Waktu Sehari	105
	5.2 Analisis SWOT.....	108
	5.2.1 Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi Atas Masalah	115
6.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	122
	6.1 Kesimpulan.....	122
	6.2 Rekomendasi	124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rumusan masalah.....	8
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran	11
Gambar 2.1	Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle Of Poverty)	20
Gambar 2.2	Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi kemiskinan	21
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Kertosono	60
Gambar 4.2	Struktur Organisasi UPK semoga jaya.....	72
Gambar 4.3	Alur Peminjaman Dana ke UPK.....	77
Gambar 5.1	Perbandingan jumlah berdasarkan pekerjaan masyarakat Desa Kertosono.....	88
Gambar 5.2	Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Desa Kertosono	103

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Pihak Yang Diwawancara dan FGD
- Lampiran II Pedoman Wawancara Umum / FGD
- Lampiran III Hasil FGD



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan harus dipahami sebagai suatu masalah sosial yang bersifat *multi-dimensional*. Kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia karena ketiadaan pendapatan, kekuasaan dan pilihan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Oleh karena itu, profil kemiskinan secara keseluruhan dicirikan oleh pendapatan rendah, kondisi kesehatan buruk, pendidikan rendah dan keahlian terbatas, akses terhadap tanah dan modal rendah, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, konflik sosial dan resiko lainnya, partisipasi rendah dalam proses pengambilan kebijakan, serta keamanan individu yang sangat kurang¹. Oleh karena itu, masalah kemiskinan tidak hanya dapat dituntaskan sepihak oleh pemerintah saja, namun, peran serta masyarakat luas juga sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan pra sarana, dan pendampingan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan terbukti telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2005 terdapat 22,51 % penduduk miskin, pada tahun 2006 menurun menjadi 19,89 %. Persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada tahun 2007, menjadi 18,89 %, pada tahun 2008 turun menjadi 18,51 %. Pada Maret 2009 mengalami penurunan

¹ Dikutip dari buku, Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Jawa Timur, 2009-2004, hal 1

menjadi 16,68 % (6.022 juta jiwa), dan tahun 2010 turun kembali menjadi 15,56%².

Walaupun, Pemprov Jatim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada dasarnya Pemprov Jatim telah menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari 7 prioritas pembangunan Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2008³. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pengentasan kemiskinan ini, Pemprov Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bahu – membahu dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan RPJMD dengan memberikan bantuan modal kepada seluruh kabupaten di Jawa Timur yang merupakan daerah miskin. Pemodalannya tersebut diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBD Provinsi Jawa Timur difokuskan untuk berbagai macam program kerakyatan guna pengentasan kemiskinan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dibiayai langsung oleh APBD Provinsi Jatim, dan berbasiskan pemberdayaan masyarakat adalah program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin). Program ini langsung ditujukan pada desa – desa di Propinsi Jawa Timur. Modal diberikan oleh Pemprov

² *Ibid* Hal 1.

³ Dikutip dari <http://www.gerdutaskin-jatim.web.id/v3/index.asp?a=latar-belakang> , diakses pada 19 Juli 2010

kepada aparaturnya, yang kemudian modal tersebut di kelola langsung oleh masyarakat desa. Sedangkan, pemerintah provinsi hanya sebagai pengawas dan pendamping saja. Pemprov Jatim percaya bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, kekuatan rakyat akan jauh berpengaruh untuk suatu keberhasilan.

Menurut Friedmann (1991), pembangunan alternatif berpusat pada rakyat (manusia) dan lingkungannya dari pada produksi dan keuntungan, yang ditujukan untuk mendorong kemajuan dan HAM. Bagi Friedmann, negara harus kuat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakannya. Negara kuat tidak harus ditandai dengan birokrasi yang otoriter dan semena-mena, melainkan birokrasi yang responsif, transparan dan bertanggungjawab. Negara yang kuat seperti itu, kata Friedmann, didukung kuat oleh proses demokrasi yang baik, dimana kekuasaan negara untuk mengelola permasalahan yang terjadi lebih baik bersifat lokal. Hal ini membutuhkan desentralisasi politik dari pemerintah nasional ke pemerintah lokal, khususnya kepada masyarakat setempat yang terorganisir dalam komunitas mereka sendiri.

Lebih lanjut, Tjokrowinoto (1987) juga memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia), antara lain :

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexible menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses

perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar

5. Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur – struktur pembangunan di tingkat lokal

Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sejak tahun 2002, sampai dengan tahun 2006 telah mampu menjangkau 1.410 Desa/Kelurahan kategori miskin dari seluruh target 1.801 Desa/Kelurahan kategori miskin⁴. Pelaksanaan program Gerdu-Taskin juga telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa⁵: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil di pedesaan, (iii) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, (v) terjadinya proses pembelajaran sosial (*social learning*), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi:

1. pemberdayaan manusia,
2. pemberdayaan usaha
3. pemberdayaan lingkungan

⁴ Dikutip dari <http://www.gerdutaskin-jatim.web.id/v3/index.asp?a=latar-belakang> , diakses pada 19 Juli 2010

⁵ Dikutip dari buku, Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Jawa Timur, 2009-2004, hal 3

Program Gerdu-taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan dengan memantapkan pola kemitraan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholders* lainnya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari tahap awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada Desa/Kelurahan lokasi. Program Gerdu–Taskin tahap awal dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain : Sosialisasi program, Perencanaan, Penulisan Proposal, Verifikasi, Pencairan dana, Pelaksanaan, Serta pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaan program Gerdu – Taskin, setiap desa diharuskan membuat Unit Pengelola Keuangan (UPK), yang mana UPK ini nantinya yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada desa.

Desa Kertosono adalah desa yang terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Kertosono merupakan salah satu desa yang menerima bantuan modal melalui program Gerdu – Taskin tersebut. Kemiskinan di wilayah ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya akses informasi yang terbatas, sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, kurangnya lahan pekerjaan, serta banyaknya renternir yang bertebaran di daerah sekitar desa tersebut. Desa yang letaknya sangat terpencil ini jauh dari akses manapun, jalanan utama penghubung juga merupakan jalan setapak yang dikelilingi oleh sawah – sawah, sehingga akses menuju desa sangat terhambat, hal itu semakin memicu terjadinya kemiskinan di desa tersebut.

Penduduk desa yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar saja menyebabkan kemampuan mereka menjadi rendah, dan tingkat keterampilan masyarakat pun terbatas. Hal itu menyebabkan masyarakat desa hanya bergantung pada satu mata pencaharian saja, petani hanya bergantung kepada pertaniannya, peternak dan tukang potong hewan ternak hanya bergantung dari ternak dan daging yang

dikelolanya, pekerja konveksi hanya bergantung pada pekerjaannya, begitu juga dengan buruh kasar, hanya bergantung kepada proyek yang diberikan kepada mereka. Para pemuda maupun masyarakat desa usia produktif banyak yang memilih untuk meninggalkan desa, dan mencari pekerjaan di kota, namun, karena hanya berbekal pendidikan SD dan kurangnya keahlian, maka kebanyakan dari mereka hanya menjadi buruh di pabrik, maupun menjadi pembantu rumah tangga.

Sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut sebenarnya tergolong lengkap, diantaranya adalah sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, namun kondisinya kurang baik. Seperti pada sarana pendidikan, disana terdapat Sekolah Dasar (MI Daroyissalam) dan Tempat Pendidikan Al-quran (TPA) dengan keadaan bangunan yang kondisinya tidak terawat. Fasilitas kesehatan pun tidak berbeda jauh, hanya terdapat sebuah puskesmas, seorang bidan, dan obat – obatan yang sangat kurang sekali. Dengan akses jalan yang kecil, maka desa tersebut tidak dilirik sedikitpun oleh investor, sehingga tidak ada pembukaan lapangan pekerjaan baru di desa tersebut.

Sawah – sawah yang mengelilingi desa tersebut menjadi andalan para warga untuk mendapatkan pemasukan bagi rumah tangganya, namun, sawah – sawah tersebut bukan lahan milik warga, tapi merupakan milik tuan tanah yang tinggal di kota Gresik, sehingga mereka hanya menjadi buruh penggarap saja. Upah rata – rata per hari yang mereka dapatkan dari menggarap sawah adalah sebesar Rp. 25.000. Dengan pemasukan per hari yang hanya sekecil itu, pemenuhan kebutuhan sehari – hari sangat kurang sekali. Untuk menutupi kebutuhan hidupnya banyak warga dalam usia produktif memilih untuk menjadi buruh kasar diluar desa. Selain itu tidak sedikit pula warga desa yang meminjam uang dari para tengkulak (renternir) dengan bunga yang sangat berat. Disamping itu terdapat rumah tangga yang bergerak dalam usaha sulam jilbab. Pekerja kerajinan sulam jilbab ini adalah para ibu rumah tangga. Mereka mendapatkan upah sebesar Rp 1000 untuk setiap 10 jilbab. Dalam satu hari mereka mampu menghasilkan antara 30 – 50 jilbab.

Masuknya program Gerdu-Taskin ke Desa Kertosono dapat membantu kehidupan warga di desa tersebut, namun belum sepenuhnya dapat memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat desa. UPK Desa Kertosono merupakan UPK yang aktif dalam melaksanakan berbagai macam sosialisasi tentang program pemerintah tersebut, dan aktif dalam berbagai macam aktifitas untuk desa. Namun, sungguh disayangkan bahwa pemberian bantuan kepada warga belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada masyarakat. Masuknya UPK memberikan sedikit harapan bagi masyarakat, karena UPK memberikan bantuan modal kepada masyarakat berupa hutang dengan bunga yang sangat kecil, hal tersebut dapat mengurangi jumlah renternir yang masuk ke desa. Melihat keadaan tersebut, maka dibutuhkan suatu upaya alternatif pemberdayaan masyarakat untuk dapat menyalurkan bantuan kepada seluruh masyarakat.

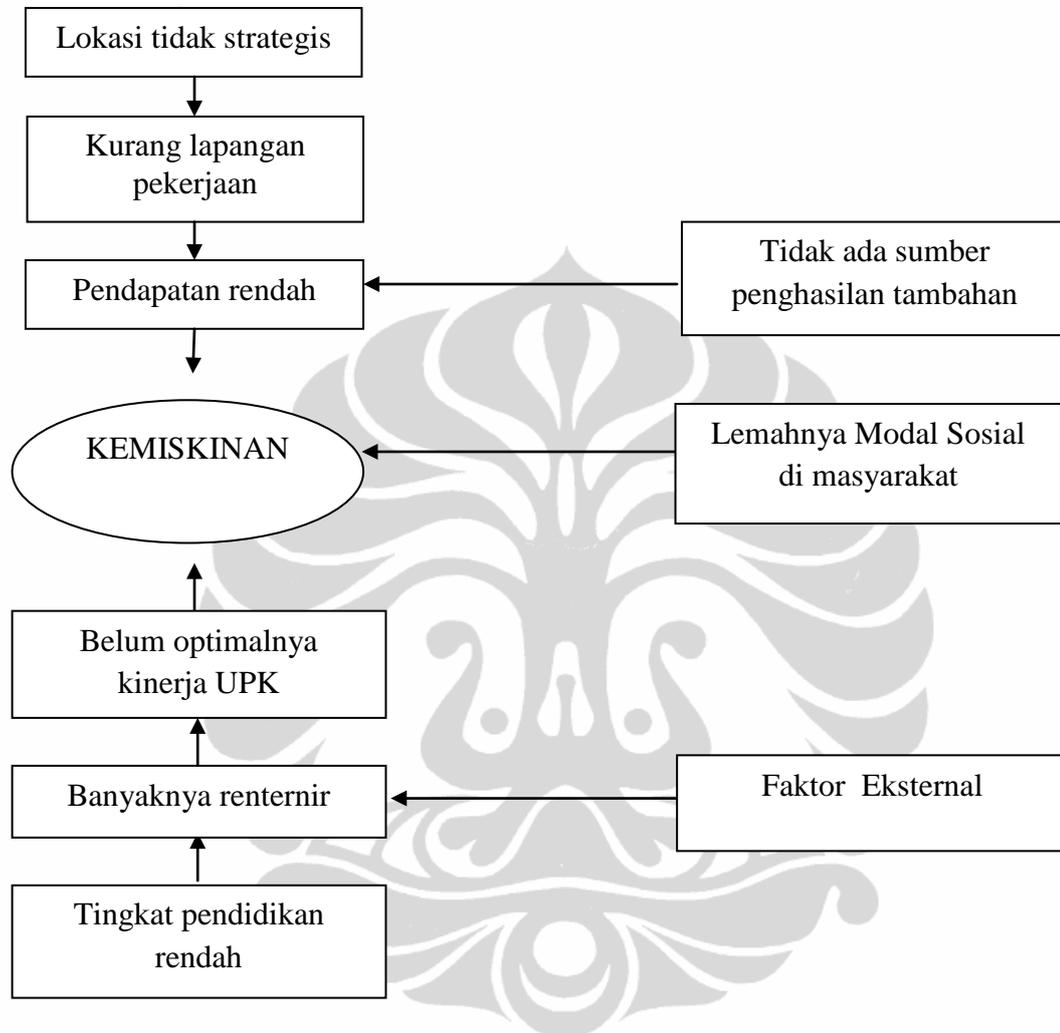
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh tiga inti permasalahan yang terjadi di Desa Kertosono. Pertama adalah wilayah desa yang terisolasi dari daerah lainnya. Akibatnya jarak yang ditempuh dari daerah keramaian dan pusat perekonomian jauh dari Desa, hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat desa hanya bergantung dari pertanian saja.

Kedua, keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat masyarakat desa hanya mengandalkan sawah milik tuan tanah untuk digarap oleh mereka, namun, kondisi cuaca dan banyaknya hama terkadang menjadi kendala bagi mereka dalam bertani. Industri yang masuk kedesa tersebut, tidak dapat menampung seluruh kaum perempuan didesa tersebut, sehingga hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang masuk kedalam dunia tersebut.

Ketiga adalah banyaknya renternir dari kota maupun dari desa lainnya yang masuk dan menawarkan pinjaman kepada masyarakat desa dengan bunga yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan masyarakat selalu terbelit hutang, sehingga mereka tidak dapat menabung

Rumusan masalah tersebut dapat dilihat melalui diagram berikut ini :



Gambar 1.1
Rumusan masalah

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, maka pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah Strategi apa yang dapat dilaksanakan guna memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kinerja UPK, sehingga dapat memberikan kontribusi dan peningkatan perekonomian masyarakat desa Kertosono.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi alternatif – alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan UPK sebagai tombak utama pelaksanaan kegiatan.
2. Mengkaji faktor – faktor yang mendorong dan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kecamatan Sidayu, UPK Desa Kertosono dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, serta bagi pihak swasta yang turut berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Akan dilihat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah ini, untuk memperoleh informasi – informasi yang mendalam mengenai wilayah ini, maka dilakukan wawancara yang mendalam pada pihak – pihak yang terkait.

Data yang digunakan antara lain data primer, yang diperoleh dari proses *Indepth interview* langsung dengan masyarakat dan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, Selain itu pula diperlukan data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.

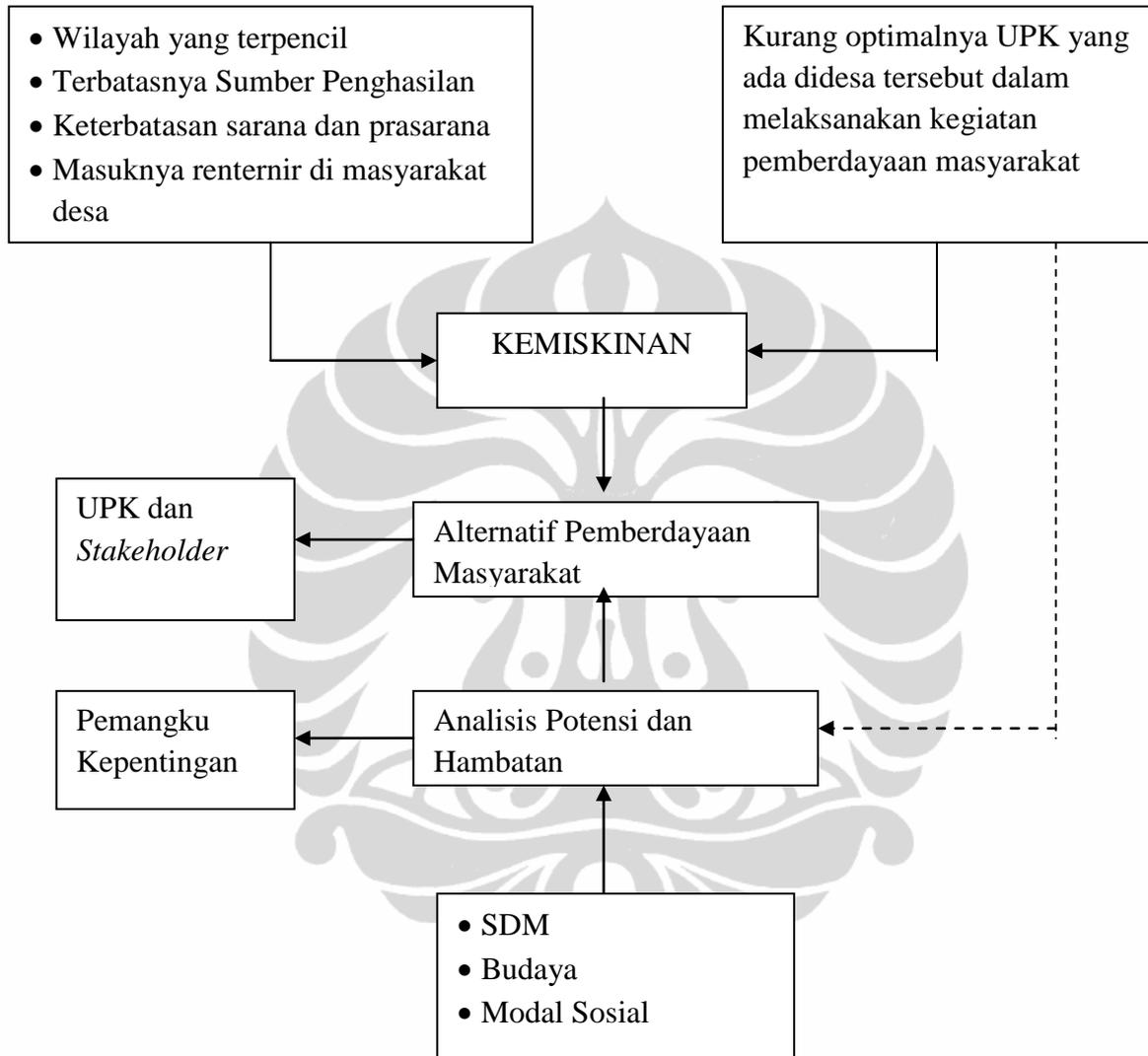
1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan melalui latar belakang dan permasalahan diatas, maka diperoleh kerangka pemikiran keseluruhan dari penulisan penelitian ini. Melihat kepada permasalahan, kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Wilayah Desa Kertosono yang terpencil, sehingga kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan juga dari pihak swasta. Sehingga pihak swasta merasa lokasi desa yang tidak menguntungkan, menyebabkan pihak swasta enggan untuk berinvestasi di desa Kertosono.
2. Terbatasnya sumber penghasilan tambahan masyarakat Desa Kertosono, masyarakat desa bergantung pada pertanian serta buruh konveksi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kertosono yang mendukung kegiatan masyarakat desa.
4. Adanya campur tangan renternir yang memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi kepada warga desa.

Dengan kondisi masyarakat Desa Kertosono yang terlilit dalam kemiskinan, maka diperlukan suatu tindakan untuk mengajak mereka keluar dari kondisi tersebut. Untuk itu diperlukan alternatif – alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui UPK yang bertujuan untuk memberdayakan mereka sehingga mampu dan berdaya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Untuk menentukan alternatif kegiatan pemberdayaan yang sesuai diperlukan adanya penggalan informasi dan analisa mengenai potensi yang dimiliki, serta hal-hal yang mendorong dan menghambat dari alternatif pemberdayaan masyarakat tersebut, dalam hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Untuk melengkapi diperlukan juga perhatian kepada karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM), budaya dan kebiasaan masyarakat, serta modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut, hal itu guna melihat alternatif – alternatif yang dirancang dapat sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Kertosono.

Dalam gambar 1.2 berikut, akan dijelaskan secara ringkas kerangka berfikir secara keseluruhan dalam penulisan yang dilaksanakan :



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

1.5 Sistematika Penulisan

Agar diperoleh hasil yang mudah dan terstruktur dan mempermudah pemahaman, maka tesis ini akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup dan batasan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian literatur mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kemiskinan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini, Selain itu juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM MEKANISME PROGRAM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai mekanisme program di lokasi studi dan akan diberikan pula ulasan mengenai gambaran umum wilayah studi yang berkaitan dengan kondisi fisik perwilayahan dan kondisi sosial masyarakat sebagai data pendukungnya.

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif berupa *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)*, selain itu juga data sekunder yang diperoleh dari laporan – laporan instansi – instansi yang terkait. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah menggunakan analisis SWOT, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang serta mencari kelemahan dan ancaman yang terjadi.

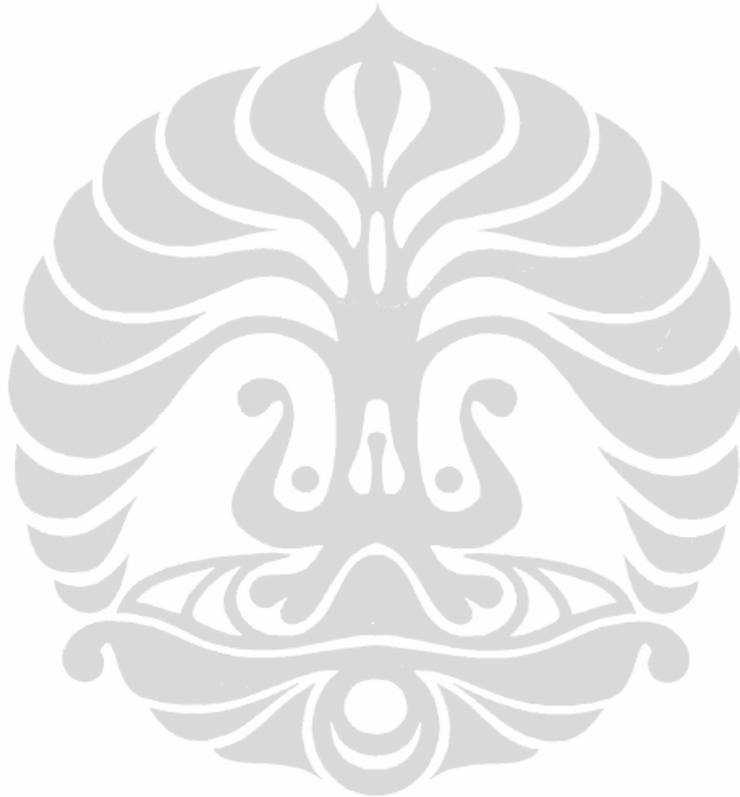
Bab V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari analisa dari data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis yang digunakan. Sehingga

dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi dan permasalahan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Bab VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Kertosono.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek. Masalah kemiskinan tidak hanya dapat dilihat melalui satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari berbagai sisi. Kompleksitas masalah kemiskinan dapat diperhatikan melalui antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kesetaraan gender. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10) seperti dikutip dari Waluyoatji (2005) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam buku Panduan penunjang tekhnis IDT (1993: 26) dikutip dari Waluyoatji (2005) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan – akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti, sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Menurut Suparlan (1994), kemiskinan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai

kebutuhan – kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurang mampuan tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan – kebutuhan budaya (adat, upacara – upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan – kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama) atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan – kebutuhan yang mendasar (makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya). Lebih lanjut, Dharmayuni (2007), menyatakan kemiskinan memiliki pengertian yang bersifat multidimensi, yaitu : 1. ekonomi, dimana terdapat ketidakcukupan pendapatan, nutrisi, rumah, dan pakaian. 2. sosial, merupakan kurangnya hubungan sosial, keterasingan dan ketidakamanan. 3. politik, disebabkan oleh ketidakberdayaan dan tidak tersedianya perwakilan politik 4. budaya, yang berakibat rendahnya rasa kepercayaan sebagai imbas dari tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf yang rendah.

Menurut Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi *deprivasi* materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami *deprivasi* relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Menurut John Friedman, dalam Washito (2009) diungkapkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber – sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

Sedangkan menurut Ortiz, seperti yang dikutip dalam Chairina Hanum (2010) definisi dan ukuran kemiskinan mengandung unsur politik yang sangat kuat, dimana kemudian menurut Nasreen, Hossain, Kundu (2006), disebutkan tindakan politis dalam menghadapi kemiskinan. Kebanyakan negara – negara

di dunia pada umumnya menyembunyikan tingkat kemiskinan sesungguhnya yang membuat negara – negara tersebut terlihat kurang berkembang dan menjadi bukti dari kegagalan kebijakan publik yang dibuat. Sedangkan menurut Coudounel dan Hentschel (2000), pengertian kemiskinan bergantung kepada kebutuhan yang diprioritaskan. Biasanya diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan.

Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Salim (1984), orang miskin memiliki lima ciri, yaitu :

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, serta keterampilan, sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Tidak memiliki kemungkinan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, kemungkinan untuk memperoleh kredit dari bank sangat kecil karena tidak memiliki benda yang dapat digunakan sebagai agunan.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, karena waktunya habis dipakai untuk bekerja mencari penghasilan.
4. Kebanyakan tinggal di pedesaan yang serba terbatas fasilitasnya, atau desa tempat tinggalnya terisolir.
5. Mereka yang tinggal dikota, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak memiliki keterampilan, sehingga mereka hanya bekerja apa adanya.

Lebih lanjut, menurut Salim (1984), penduduk atau masyarakat dikatakan miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Selain faktor aset, faktor demografis juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Menurut Hagul (1986) kemiskinan di pedesaan merupakan komplikasi serta kumpulan dari beberapa

faktor, antara lain, pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan rendahnya produktivitas.

Menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin antara lain:

1. Kemiskinan (*poverty*) memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat kurang, ekonomi keluarga ditandai dengan berhutang terus menerus, serta pendapatan yang tidak menentu, ketidak sempurnaan pasar, keterbelakangan, ketinggalan, kekurangan modal, investasi rendah, produktivitas rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah.
2. Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar.
3. Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dari ketidakmampuan mereka dalam menghadapi para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya;
4. Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka;
5. Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

Lebih jauh, Menurut Bayo (1981) kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek antara lain :

- 1). Aspek Primer berupa : - Miskin aset.
- Organisasi sosial politik.
- Pengetahuan dan Keterampilan.
- 2). Aspek Sekunder berupa : - Jaringan sosial
- Sumber Keuangan dan Informasi.

Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan, ada baiknya kita melihat dahulu penyebab dari kemiskinan itu sendiri.

Menurut Pakpahan (1993) kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ⁶:

1. Sumber daya alam yang rendah.
2. Teknologi dan unsur pendukung yang rendah.
3. Sumber daya manusia yang rendah.
4. Sarana dan prasarana, termasuk kelembagaan yang belum baik.
5. Budaya miskin, dimana mereka sudah turun – temurun miskin.

Sedangkan menurut Kartasasmita (1996), ada empat faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya taraf pendidikan.
2. Rendahnya taraf kesehatan.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan.
4. Kondisi keterisolasian.

Sedangkan menurut Spicker (2002), penyebab kemiskinan dibagi dalam empat hal, antara lain:

⁶ Dikutip dari

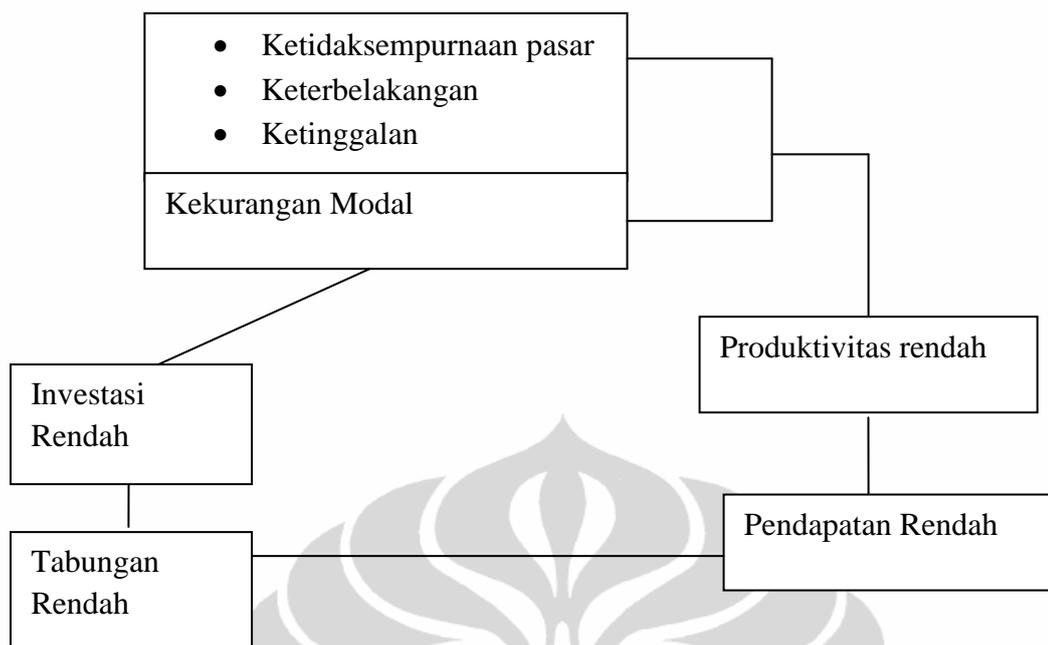
<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=22&submit.y=25&submit=prev&page=1&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Ftmi%2F2009%2Fjiunkpe-ns-s1-2009-25405021-12280-kemiskinan-chapter2.pdf>

1. *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanations*, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidak beruntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanations*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. *Structural explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak. (Satria, 2009, p.16)

Selanjutnya, menurut Kuncoro (2000:107) penyebab kemiskinan adalah :

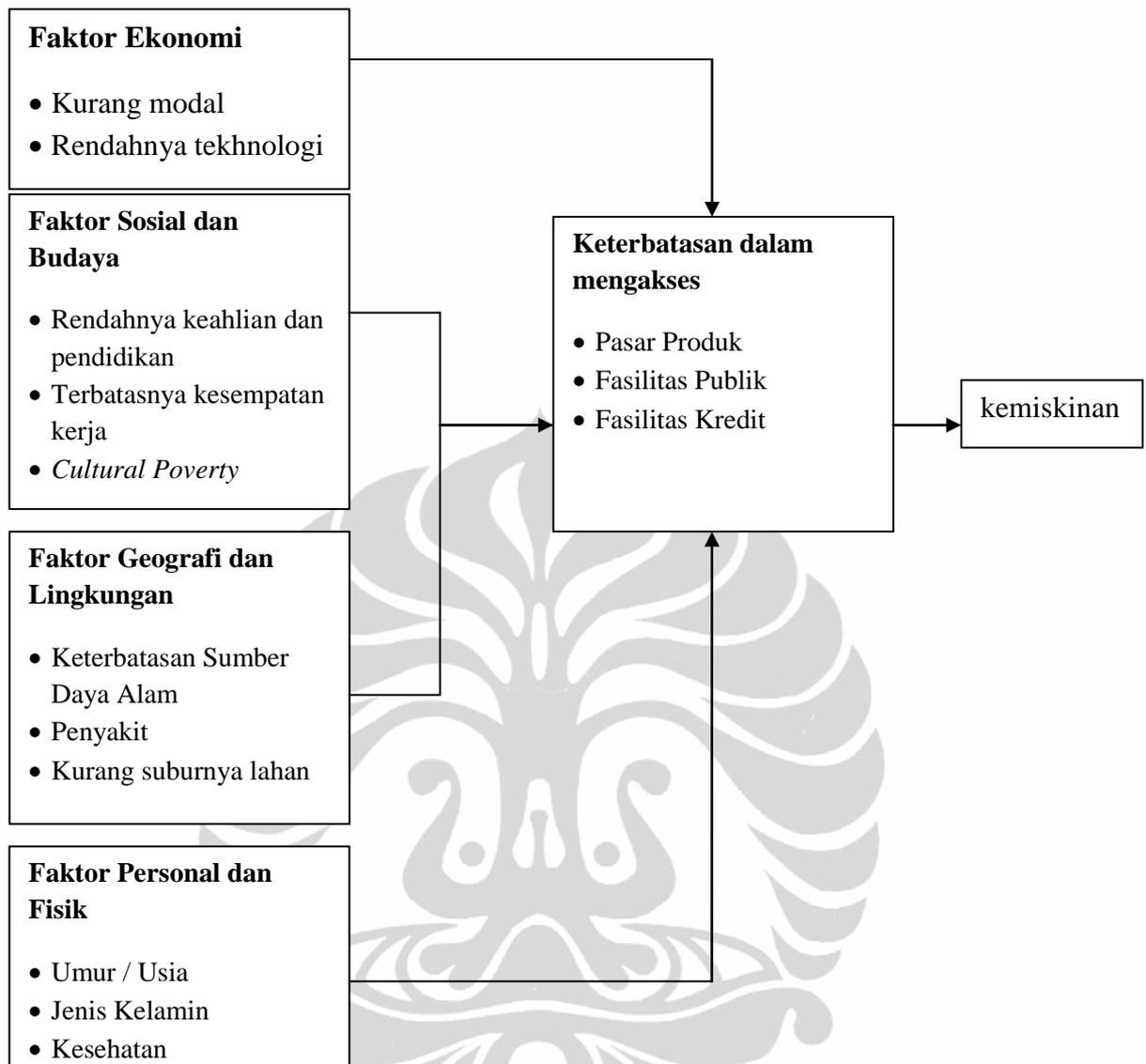
1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. kemiskinan disebabkan karena perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak – sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)



Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle Of Poverty*)
 Sumber : Nurske, dalam Kuncoro; (2000)

Lebih ringkas, Booth dan Firdaus (1996) dalam tulisannya yang berjudul “*Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families*” menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah keterbatasan penduduk didalam mengakses pasar produk, fasilitas public, dan fasilitas kredit. Selanjutnya Booth menyatakan bahwa keterbatasan ini dipengaruhi oleh faktor: ekonomi, sosial budaya, geografis dan lingkungan, serta faktor personal dan fisik. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2
Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi kemiskinan
 Sumber : Booth, A dan Firdaus, 1996.

Kemiskinan dibagi dalam dua criteria, seperti yang dikutip dari Waluyojati (2008) yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan secara absolut ditentukan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum untuk kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan

digolongkan sebagai penduduk miskin (BPS, 2009). Kemiskinan absolut didefinisikan oleh Bank Dunia (2006) sebagai kondisi dimana pendapatan seseorang kurang dari \$ 1 per hari, yang artinya orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Mereka mengalami kelaparan, tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan, kekurangan air minum dan sanitasi, tidak bisa memenuhi pendidikan anak – anaknya bahkan tidak memiliki tempat tinggal, dan bahan sandang.

Sedangkan, kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986)). Menurut Nasreen, Hossain, Kundu (2006), kemiskinan relatif sebagai standar kehidupan secara umum pada kelompok masyarakat yang berbeda yang dianggap lebih miskin jika dibandingkan dengan tingkat ketidakmampuan absolut.

Sedangkan OECD (2001) membagi kemiskinan menjadi kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Kemiskinan sementara merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh suatu hal yang berdampak global, misalkan terjadinya bencana alam, serta terjadinya gejolak perekonomian makro disuatu negara. Sedangkan, kemiskinan kronis diartikan sebagai kondisi dimana seseorang sudah berada dalam lingkaran kemiskinan untuk jangka waktu yang lama, kemiskinan kronis juga merupakan kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan keterampilan, aset, dan stamina.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan, bahwa kemiskinan kronis (*chronic poverty*) disebabkan:

1. Sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.
2. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian.
3. Rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat

Selanjutnya, dijelaskan juga kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan oleh :

1. Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi;
2. Perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan
3. Bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, terdapat beberapa indikator pengukuran, biasanya mereka yang disebut miskin adalah yang pendapatan atau konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (Nunan, Grant, Bahiigwa, et al., 2002:9). Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Bappenas (2004) dalam Sahdan (2005) berupa:

1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak.
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat – alat produktif.
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis.
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup.
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi.
6. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah.
7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Dalam mengukur kemiskinan UNDP (1990) menggunakan Human *Development Index (HDI)* sebagai salah satu alat pengukur kemiskinan. HDI merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu : Umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak⁷.

Ukuran kemiskinan berdasar wilayah (desa) menurut Departemen Dalam Negeri, dikutip dari Rusli dkk (1995:8) mengukur kemiskinan pada tingkat kecamatan. Kecamatan miskin sekali apabila pendapatan per kapita

⁷ http://www.p2kp.org/pustaka/files/POU_PNPM_2008/Lampiran-1__Info-ringkas-IPM-dan-MDGs.pdf

penduduk di bawah 75% dari kebutuhan hidup minimum, Kecamatan miskin apabila pendapatan per kapita penduduk 25% di bawah, tepat dan 25% di atas kebutuhan hidup minimum, Kecamatan hampir miskin apabila pendapatan per kapita penduduk di atas 25% kebutuhan hidup minimum sampai mencapai kebutuhan hidup sekunder (200%). Kecamatan tidak miskin apabila pendapatan per kapita penduduk melebihi kebutuhan hidup keduanya (Rusli dkk, 1995:8).

Menurut Narayan (2002), kemiskinan memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan manusia terutama dalam aspek fisik, psikologi dan ekonomi. Masyarakat miskin bertahan dari penyakit fisik yang diakibatkan oleh asupan makanan yang kurang dan jam kerja yang terlalu panjang. Selain itu juga mereka bertahan dari penyakit secara emosional yang diakibatkan oleh ketergantungan dan kurangnya kekuatan yang mereka miliki. Penyakit moral juga mereka rasakan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mengambil keputusan akan penggunaan uang yang dimilikinya, apakah untuk berobat ataukah untuk makan sehari – hari. (Nasreen, Hossain, Kundu. 2006:6). Menurut Frederick dan Zaidi (2004), strategi penanggulangan kemiskinan akan terbentuk apabila penyebab dasar kemiskinan yang bersifat multidimensi dapat diperhatikan.

2.1.2 Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan masalah yang telah terjadi sejak lama menjadi suatu permasalahan besar dan perhatian bagi masyarakat seluruh dunia. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Penanggulangan masalah kemiskinan ini terus menerus dilaksanakan karena kompleksitasnya masalah pada orang miskin itu sendiri.

Strategi memerangi kemiskinan menurut Karlsson (1981:31) meliputi:

1. Strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai.
2. Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya

menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Strategi pengentasan kemiskinan oleh Bank Dunia (2001:6) mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menekankan pada pembangunan fisik dan prasarana sebagai alat utama pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin. Tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (Unescap)* (2000), bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi.

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya (Kementrian Kokesra, 2004:III.1). Lebih lanjut menurut Soegijko (1997:148) dalam Trimo Yulianto (2005) Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Kemudian, Soegijko juga menjelaskan, bahwasannya upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus untuk menyiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung atas kelancaran program.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, upaya penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu:

1. Penyediaan kebutuhan pokok.
2. Pengembangan system jaminan sosial.
3. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.

Selain itu, pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: Kebijakan pemenuhan hak – hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk memenuhi hak dasar.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan terletak pada identifikasi akurat kelompok dan wilayah yang ditargetkan (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002: 2). Menurut Nurhadi (2007: 40-41), dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu: (1) pendekatan peningkatan pendapatan, dan (2) pendekatan pengurangan beban. Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu:

1. Penciptaan Kesempatan kerja bagi Masyarakat Miskin.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Peningkatan Kemampuan.
4. Perlindungan Sosial.

Kedua pendekatan dan keempat pilar tersebut bertumpu pada perencanaan, penganggaran APBN dan APBD serta perbankan/lembaga keuangan nonbank, swasta dan masyarakat.

Pilar pertama, yaitu penciptaan kesempatan bagi masyarakat miskin dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Pilar kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat dimaksudkan bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin. Pilar ketiga yaitu, peningkatan kemampuan, dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual / kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketrampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial). Pilar keempat yaitu, perlindungan sosial dimaksudkan sebagai pemberian perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan, misalnya, pengemis, lansia, anak – anak terlantar, penderita cacat, serta korban bencana alam.

Bagaimanapun, masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus diatasi bersama, bukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan harus diatasi oleh seluruh lapisan dan elemen masyarakat.

2.1.3 Lembaga Keuangan Mikro

Salah satu dari penyebab kemiskinan seperti yang dijelaskan diatas adalah terbatasnya akses untuk memperoleh modal, baik itu modal usaha, maupun modal sosial dan politik. Penduduk pedesaan yang mayoritas merupakan masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memperoleh pemodalannya tersebut. Pinjaman modal dari perbankan sulit didapat oleh para penduduk miskin, hal itu dikarenakan tidak adanya harta benda lain (selain uang) yang bisa mereka jadikan agunan di bank. Tidak dapatnya masyarakat miskin mendapatkan pinjaman modal dari perbankan menjadikan mereka lebih memilih meminjam kepada renternir untuk mendapatkan modal.

Lingkaran setan yang melahirkan jebakan ketidak berdayaan inilah yang menjadikan alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan masyarakat miskin menempati tempat yang sangat strategis.

Pada awalnya, konsep pembiayaan mikro (*microfinance*) lahir sebagai suatu terobosan bagi penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses kesistem keuangan modern. Dalam perkembangannya, konsep pembiayaan mikro telah meluas tidak hanya sekedar sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan usaha kecil tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai suatu pendekatan dalam pendekatan ekonomi (Sabirin, 2001)

Keberadaan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi hal itu sangat berarti bagi masyarakat miskin khususnya yang berada di pedesaan. Sejak jaman dahulu, keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dana mereka. Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari berbagai macam jenis yang merupakan lembaga per kereditan rakyat. Tujuan dari pembangunan lembaga perkereditan rakyat tersebut adalah untuk menyediakan kemudahan permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mengembangkan usaha dan kemampuannya (Widodo, 1987). Lebih lanjut, Widodo menjelaskan bahwa lembaga perkereditan rakyat yang ada di berbagai daerah perlu mendapatkan legalitas hukum dari fihak yang berwenang, hal itu dimaksudkan agar, lembaga tersebut dapat memperluas dan memperkuat kegiatannya bukan hanya sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai penghimpun tabungan masyarakat dan pemberdayaan usaha masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan bahwa lembaga perkereditan, pembangunannya dilakukan dengan cara:

1. Meletakkan dasar dan kekuatan hukum lembaga tersebut.
2. Bantuan modal dasar yang bersumber dari dana APBD.
3. Memberikan bekal kemampuan dan keterampilan bagi para pengelola lembaga, sebelum dan sesudah didirikan.

4. Memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan pemantauan baik secara umum oleh pemda maupun secara teknis oleh BPD.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah pemberian kredit dalam jumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka untuk peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Asian Development Bank (ADB)⁸ mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*Deposit*), Kredit (*Loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*Payment Services*), serta *money transfers* yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian lembaga keuangan mikro memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.

Menurut Krishnamurti (2005), meskipun banyak terdapat definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis keuangan, seperti tabungan, pinjaman, deposito, pembayaran, maupun asuransi.
2. Melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro pada awalnya hidup dan berkembang dikalangan rakyat yang terpinggirkan oleh system keuangan formal yang ada.
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konkwensi dari masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di Indonesia diilhami oleh keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan

⁸ Dikutip dari <http://www.adb.org/poverty/forum/pdf/Khandker.pdf>, diakses pada 17 Juli 2010

Credit Union di Banglades yang terkenal dengan Grameen Bank (GB). Banyak orang melihat model GB sebagai suatu model pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan. Melihat kesuksesan GB, banyak pihak yang mereplikasi metode GB terutama pada metode penyaluran pinjaman yang dilakukan kepada pengguna, tetapi tanpa mereplikasi sistem peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang berupa penyediaan layanan simpanan kecil dan penyediaan jaminan sosial. Bagi Indonesia, keuangan mikro bukan menjadi hal yang baru, Menurut Wijono (2005), lembaga keuangan mikro pada masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai informal dengan karakteristiknya masing-masing.

Berdasarkan bentuknya, lembaga keuangan mikro dibagi menjadi tiga (Wijono, 2005) dalam (Ashar, 2006) yaitu: (1) Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi. (2) Lembaga semi formal, misalnya organisasi non pemerintah. (3) Sumber – sumber informal, misalnya pelepas uang. Sementara, Usman *et al* (2004) membagi lembaga keuangan mikro di Indonesia menjadi empat golongan besar, yaitu (1) lembaga keuangan mikro formal, baik bank maupun non bank. (2) lembaga keuangan mikro non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak. (3) lembaga keuangan mikro yang dibentuk melalui program pemerintah. (4) lembaga keuangan mikro informal seperti renternir dan arisan. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Hendayana dan Bustaman, 2007).

Salah satu kelemahan mendasar dari lembaga keuangan mikro non formal yang berdiri di pedesaan atas prakarsa program pemerintah adalah lemahnya pengetahuan masyarakat desa dalam memahami bahwasannya bantuan tersebut adalah untuk pemodalan serta pembiayaan untuk usaha agar masyarakat menjadi produktif, selama ini masyarakat miskin dipedesaan menganggap bantuan pemerintah hanya sebagai hibah sehingga dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya, hal – hal tersebut yang harus dapat dihindari guna keberlangsungan lembaga keuangan mikro di pedesaan, untuk itulah perlu adanya sosialisasi program terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum mulai membentuk sebuah lembaga di pedesaan, dan akan lebih baik lagi, apabila dalam pembentukan lembaga yang menjalankan program pemerintah, pelakunya adalah masyarakat dari daerah itu sendiri, setelah diberikan pengarahan, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengetahui kultur dan kebudayaan masyarakat daerahnya sendiri.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Daly dan Cobb (1994), pemberdayaan adalah proses terus menerus individu dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan tindakan kolektif. Sedangkan menurut Satiman (2002), kata pemberdayaan secara umum adalah suatu cara dimana orang – orang, organisasi atau komunitas mampu mengendalikan atau menguasai kehidupan mereka. Pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu proses maupun tujuan. Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu

keberlanjutan dalam jangka panjang (Suprianto dan Subejo, 2004). Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Kartasasmita (1996), Pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan penerjemahan dari kata *Empowerment*, dalam kata tersebut, terdapat kata *Power*. Kata *power dalam empowerment* diartikan "daya" sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Keadaan keterbelakangan seperti diutarakan di atas terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power*. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *dispowerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar masyarakat. Akibatnya, maka lapisan masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang "memiliki *power*". Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran itu berputar terus. Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah. *Pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. *Kedua*, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal

90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) dalam Hadi (2008) menyatakan bahwa:

“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on”.

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini merupakan sebuah pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Kabeer (1994), menggambarkan keterkaitan kekuatan dengan pemberdayaan melalui empat hal dibawah ini, yang kemudian digunakan untuk memahami pemberdayaan sebagai sesuatu yang multidimensi:

- *Power Over*, mengacu kepada sumber daya, manusia dan struktur. Pemberdayaan dalam hal ini adalah akses untuk memperoleh ketiga hal tersebut.
- *Power Within*, mengacu kepada kesadaran individu, rasa percaya dan kepedulian diri, persepsi dan pemahaman kritis terhadap perbedaan atas realita yang dihadapi oleh masing –masing individu

- *Power With*, mengacu kepada kolektifitas, partisipasi dan kemampuan untuk menggerakkan dan mengorganisir secara politis untuk mencapai “*Power To*”
- *Power To*, stimulasi perubahan, transformasi, berkontribusi dalam pembuatan keputusan dengan memberikan ide – ide dan pengaruh. (Martinsson, 2007, p.23)

Proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan lebih baik apabila mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Pendekatan yang baik untuk digunakan adalah *bottom up* karena melalui pendekatan ini, akan diketahui dengan pasti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pendekatan secara *bottom up* menurut Suadnya, Ross dan Chamala dalam Chairina Hanum (2010), akan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pembangunan. Selain itu juga hal ini memungkinkan semua aktor dan sumber daya termasuk masyarakat lokal dan pihak diluar masyarakat berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya melalui partisipasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan lainnya yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu juga karena masyarakat berpartisipasi dari awal pelaksanaan proses pemberdayaan hingga proses implementasi pada akhirnya akan timbul rasa memiliki di dalam diri mereka. (Chairina Hanum, 2010)

Sumodiningrat (2002)⁹ menjelaskan bahwasannya pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang

⁹ Dikutip dari <http://file.upi.edu/Direktori/A%20-%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/MUSTOFA%20KAMIL/konsep%20pemberdayaan%20partisipasi%20dakelembagaan%20dalam%20pembangu.pdf>, diakses pada 17 Juli 2010

memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Konsep pemberdayaan tidak bisa lepas dari konsep partisipasi. Terdapat kecenderungan dimana program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan dari atas (*top – down approach*), proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat, sementara keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan. pada akhirnya tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya rasa memiliki terhadap program oleh masyarakat. Selain itu juga tidak jarang, program yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan hanya berorientasi pada proyek serta penonjolan ego sektoral. Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Hingga pada akhirnya tidak hanya masyarakat saja yang menjadi berdaya tetapi pembangunan di lingkungan masyarakat tersebut dapat terus berlanjut.

Menurut Craig dan May (1995) yang dikutip dalam Hikmat (2004), partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kemadirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sedangkan menurut Fithriadi, et al. (1997) partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Supriyadi (2001), mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek – proyek pembangunan untuk masyarakat.

Abe (2005) mengungkapkan, melibatkan masyarakat secara langsung akan memberikan dampak penting, diantaranya adalah:

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah pada legitimasi pada rumusan perencanaan, karena semakin banyak yang terlibat, maka akan semakin baik.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.

Menurut Duselldrop (1989), terdapat tiga jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan , yaitu:

- Partisipasi bebas, yang terdiri atas partisipasi spontan atau partisipasi terpengaruh. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang mengambil inisiatif dalam porses pembangunan, sedangkan partisipas terpengaruh terjadi apabila partisipasi yang dilakukan oleh individu muncul karena dipengaruhi oleh pihak lain.

- Partisipasi dipaksakan, merupakan partisipasi yang dilakukan oleh seseorang karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- Partisipasi karena kebiasaan merupakan partisipasi yang berorientasi pada tuntutan nilai – nilai dan norma – norma dalam kehidupan masyarakat. (Yuniarsih, 2005)

Menurut Sutrisno (1995) dikutip dari Chairina Hanum (2010), partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan, melainkan adalah: pertama kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kedua untuk melembagakan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap kritik pikiran alternative yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternative itu merupakan suatu bentuk dari partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Menurut Mubyarto dalam Yuniarsih (2005) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu:

- Tahap perencanaan
Masyarakat desa ikut berpartisipasi mengajukan usulan atau rencana pembangunan desa. Biasanya tidak seluruh masyarakat ikut terlibat melainkan mereka diwakili oleh perwakilan yang duduk dalam pemerintahan desa atau tokoh masyarakat desa.
- Tahap pelaksanaan
Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program baik secara fisik maupun non fisik
- Tahap pemanfaatan
Masyarakat desa ikut berpartisipasi memanfaatkan dan menikmati hasil – hasil pembangunan.

Melihat dari berbagai macam pendapat para tokoh, maka sangat erat keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam masyarakat untuk mendukung program – program pemberdayaan yang telah ditetapkan dan dirumuskan oleh pemerintah. Maka dari itu, sebaiknya segala program pemerintah dilaksanakan melalui berbagai tahap, mulai dari tahap penyuluhan, tahap pembentukan, tahap pelaksanaan, sampai tahap monitoring dilaksanakan bersama – sama antara pemerintah, masyarakat, dan komponen pendukung lainnya yang bergerak aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak akan berhasil apabila dilakukan hanya dari satu sisi pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa penelitian dahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Suyono Dikun (1994) mengenai pemberian dana bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Kabupaten Aceh Utara, dimana dana IDT yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan usaha yang mereka miliki. Dalam penelitian tersebut, pemberian dana IDT lebih banyak digunakan untuk menutupi hutang kepada renternir, namun dengan terbayarnya hutang masyarakat di daerah tersebut maka masyarakat dapat menggunakan hasil yang didapat dari usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pemenuhan fasilitas terhadap sarana dan prasarana juga diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Trimo Yulianto (2005) membahas tentang Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana dalam pelaksanaan program JPS tersebut dilaksanakan dengan jalan perencanaan dari atas ke bawah (*Top-down*) yang digabungkan dengan perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom-up*). Perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*) berupa penentuan lokasi kecamatan dan penyusunan petunjuk teknis operasional bagi semua pelaku pelaksana program, dan pendekatan dari

bawah ke atas (*bottom-up*) untuk memberikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah, dana tersebut diharapkan dapat terus berputar, bukan hanya dana yang habis setelah diberikan, namun, pengelolaan dana juga menjadi sebuah faktor yang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat. Dikarenakan pelaksanaan program dari bawah ke atas, maka masyarakat memiliki peran aktif dan andil dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan tersebut melalui lembaga yang dibentuk pemerintah didalamnya.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Menurut Konsorsium Pengembangan Daerah Tinggi Nusa Tenggara (KPDTNT) (1996) pengertian PRA secara harafiah adalah penilaian / pengkajian/ penelitian (keadaan) desa secara partisipatif. Atau dengan kata lain merupakan cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengertian PRA dalam lingkungan konsorsium (KPDTNT, 1996) adalah pendekatan dan tehnik pelibatan masyarakat dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pengembangan masyarakat. Menurut Chamber (1991), definisi PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan tindakan mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan¹⁰. Lebih ringkas Wiwiwk D. Pratiwi (2007) menjelaskan PRA adalah metode dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan.

Menurut KPDTNT (1996) dan Departemen Sosial Republik Indonesia (1999) *PRA* adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika diartikan perkata dari *PRA* tersebut adalah:

1. *Participatory* (Partisipasi)

Merupakan partisipasi (keikutsertaan) masyarakat, dimana para petugas lembaga pembangunan masyarakat ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Artinya, program dirancang oleh masyarakat dengan

¹⁰ Dikutip dari Didit B. Sulistiowati dalam paparan perkuliahan pemberdayaan berbasis masyarakat.

difasilitasi oleh orang luar. Jadi dengan demikian pembangunan selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

2. *Rural* (Desa)

Pengertian desa dalam hal ini adalah masyarakat. PRA merupakan sebuah kajian buat masyarakat, bukan hanya digunakan untuk masyarakat desa, namun, dapat juga digunakan untuk masyarakat perkotaan, atau daerah pertemuan antara masyarakat kota dan desa.

3. *Appraisal* (pengkajian)

Metode *PRA* memang mengembangkan teknik kajian keadaan masyarakat, tetapi metode *PRA* sendiri bukanlah metoda penelitian yang menekankan pada penggunaan teknik – teknik *PRA* untuk pengumpulan data. Metode *PRA* merupakan metode pembelajaran masyarakat. Teknik – teknik kajian keadaan masyarakat tersebut hanyalah sebagai alat pada proses belajar dengan masyarakat. Proses belajar itu sendiri tidak berhenti pada saat kegiatan pengkajian saja, tetapi pada saat “orang luar” menjalankan program bersama masyarakat, karena tujuan praktis kegiatan pengkajian dengan menggunakan teknik – teknik *PRA* adalah pengembangan program.

Dalam metode ini, perubahan sosial merupakan tujuan yang sangat mendasar, karena perubahan yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan dilakukan sendiri oleh masyarakat, yang berarti masyarakat akan digerakkan dan didorong agar mampu mengenali dan menggali potensi dirinya. Artinya, masyarakat melakukan sendiri kegiatannya mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut¹¹.

Dalam merumuskan pemberdayaan masyarakat di Desa Kertosono dengan menggunakan UPK sebagai pelaksana utama kegiatan, metode PRA dapat menjadi metode yang tepat. Hal itu karena kecenderungan masyarakat di Desa Kertosono, di mana banyak program yang diadakan tidak berjalan

¹¹ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Peikanan Tahun 2006

dengan baik dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kertosono, karena tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan masyarakat dan juga karena kurangnya informasi mengenai kegiatan tersebut. Diharapkan metode ini PRA ini dapat menangkap karakter, kemampuan dan keinginan masyarakat dengan tepat. Sehingga program pemberdayaan yang dirumuskan melalui UPK dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Karena dalam PRA, proses pelibatan masyarakat yang akan terjadi secara “overall” melalui “self belonging”.

Metode PRA yang menitik beratkan pada masyarakat sebagai pelaku, bukan hanya sebagai objek menjadikan metode PRA lebih mengena kepada masyarakat, selama ini kebijakan pemerintah dengan metode dari atas kebawah atau *Top-Down* memiliki beberapa kelemahan, antara lain¹² :

1. Ketidakselarasan antara peneliti dan perencana dengan pelaksanaan kegiatan. Maksudnya, yang dilaksanakan oleh peneliti dan perencana hanyalah memberikan pengamatan terhadap daerah saja, bukan melihat dan menanyakan langsung kepada masyarakat tentang hal – hal yang menjadi permasalahan di daerah yang akan mereka laksanakan program, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat.
2. Kenyataan selama ini, bahwasannya masyarakat hanya sebagai pelaksana, tidak merasa sebagai pemilik program, dan tidak melanjutkan apabila program tersebut selesai.

Dengan adanya kelemahan dalam *top-down planning*. Maka, dibutuhkan pendekatan “dari bawah” (*Bottom-up*)¹³ :

1. Pendekatan ini benar – benar melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana saja.

¹² *Ibid* Hal 4.

¹³ *Ibid* Hal 5

2. Lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat merasa memiliki program tersebut.

Dalam pelaksanaannya, metode PRA memiliki 11 prinsip dasar, yaitu¹⁴:

1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)
2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat
3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator
4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan
5. Prinsip santai dan informal
6. Prinsip triangulasi
7. Prinsip Mengoptimalkan Hasil
8. Prinsip orientasi praktis
9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu
10. Prinsip belajar dari kesalahan
11. Prinsip terbuka

Menurut buku panduan pengambilan data dengan metode *Rapid Rural Appraisal* dan *Participatory Rural Appraisal* Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2006), terdapat lima prinsip utama metode PRA, yaitu:

1. Partisipatif: masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra dalam pengumpulan dan analisis data
2. Luwes: bukan sebagai metode baku, tergantung pada tujuan sumber daya, keterampilan, keahlian dan waktu
3. Bekerjasama: antara pihak luar dan masyarakat, laki – laki maupun perempuan, dan gabungan berbagai disiplin ilmu.
4. Hemat: menghemat biaya dan waktu, tetapi memadai untuk analisis dan perencanaan

¹⁴ Dikutip dari <http://id.shvoong.com/humanities/1947728-participatory-rural-appraisal-pra/>, diakses pada 28/10/2010

5. Sistematis: Pengambilan sampel terstruktur agar memperbesar tingkat keabsahan dan kepercayaan untuk memeriksa ulang hasil survei dasar.

Dalam buku panduan tersebut, dijelaskan pula tentang kelebihan menggunakan metode PRA sebagai metode yang *Bottom-up*, antara lain :

1. Metode ini bukan sekedar pengkajian, melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan.
2. Metode ini bukan saja untuk masyarakat pedesaan, melainkan juga untuk perkotaan.
3. Metode ini bukan hanya masyarakat yang ikut – serta terhadap kegiatan “orang luar” melainkan sebaliknya.

Lebih lanjut, Didit B. Sulistiowati (2009) menjelaskan bahwasannya dari proses PRA akan diperoleh informasi – informasi mengenai :

- Potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat.
- Potensi sosial dan perekonomian masyarakat.
- Potensi lembaga atau kelompok kegiatan yang ada, latar belakangnya, strukturnya, kegiatannya dan lain-lain.
- Masalah-masalah masyarakat.
- Prioritas dan penyebab masalah.
- Peluang-peluang pengembangan.

Dalam pelaksanaan metode PRA tidak luput dari peranan fasilitator. Fasilitator akan menggunakan tehnik PRA sebagai alat diskusi dengan masyarakat untuk¹⁵:

- Mengembangkan rancangan pengkajian wilayah
- Mengembangkan alat – alat pengkajian wilayah/penerapan PRA

¹⁵ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2006, hal 8.

- Menyampaikan tujuan pengkajian kepada masyarakat
- Menyampaikan cara dan proses pengkajian kepada masyarakat
- Memfasilitasi kegiatan pengkajian bersama masyarakat
- Mengalihkan keterampilan menganalisis kepada masyarakat
- Mengalihkan peran fasilitator sedikit demi sedikit kepada masyarakat
- Menengahi perbedaan pendapat dan perselisihan
- Memfasilitasi perencanaan kegiatan
- Menyusun hasil pengkajian untuk laporan
- Menyampaikan hasil pengkajian guna ditindaklanjuti

Sedangkan menurut Didit B. Sulistyowati (2009), kelemahan – kelemahan yang dimiliki oleh *PRA* antara lain:

1. Kualitas informasi yang dicari biasanya tinggi namun terkadang kurang tepat secara kuantitatif.
2. Sangat tergantung pada keterampilan dan sikap fasilitator
3. Keterpakuan pada kegiatan menerapkan teknik dan lupa bahwa teknik *PRA* hanyalah alat dalam proses pengalihan keterampilan analisis kepada masyarakat
4. Kembali melakukan penyuluhan satu arah (kebiasaan dahulu)
5. Sifat *PRA* yang terbuka akan memunculkan beda pendapat dan bisa menimbulkan konflik
6. Menanggap *PRA* sebagai “resep” (pendekatan fleksibel dan terbuka)
7. Terbatas pada waktu. *PRA* membutuhkan waktu dan jangan terburu – buru
8. Masih mengutamakan target. Akibatnya partisipasi menjadi semu
9. Menganggap masyarakat sebagai objek. Padahal hal ini dapat mengecewakan masyarakat

Dibawah ini akan dijelaskan tehnik – tehnik *PRA* yang akan digunakan dalam penelitian terhadap masyarakat Desa Kertosono.

3.1.1.1. Metode Kelompok

Metode kelompok dalam PRA terdiri dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Brain Storming*¹⁶.

A. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu diskusi yang dilakukan dengan kelompok terpilih yang terdiri dari empat sampai delapan orang anggota masyarakat. Pemilihan masyarakat untuk diskusi disesuaikan dengan topik diskusi dan latar belakang pengetahuan masyarakat. Untuk FGD yang dilakukan antara lain melibatkan, masyarakat umum, petani penggarap, buruh lepas, pekerja konveksi payet, pengurus UPK, *Stakeholder*.

FGD tersebut bertujuan untuk¹⁷:

- Mengumpulkan informasi, membangun konsensus, mengklarifikasi informasi yang ada, dan mengumpulkan berbagai pendapat pada isu tertentu
- Mengumpulkan informasi tentang isu tertentu di bidang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat Desa Kertosono, kegiatan UPK Desa Kertosono, dinamika kehidupan masyarakat sehari – hari, fungsi UPK dimata masyarakat, modal sumber daya alam dan sosial masyarakat, pandangan dan pendapat masyarakat mengenai kemiskinan yang mereka hadapi, harapan masyarakat terhadap UPK Desa Kertosono, dan hubungan masyarakat dengan para *stakeholder*. Informasi yang diperoleh, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui UPK Desa Kertosono.

¹⁶ *Ibid* Hal 13

¹⁷ *Ibid*

Langkah – langkah yang dilaksanakan dalam FGD :

- Menentukan dan mendiskusikan tujuan diskusi dengan masyarakat
- Menentukan target peserta dan mendiskusikannya dengan pemimpin masyarakat mengenai kriteria pemilihan peserta. Kriteria peserta dapat didasarkan atas umur, tingkat pendidikan, etnis/suku/ras, bahasa, wawasan, status perkawinan, status ekonomi, agama, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan lamanya bermukim di wilayah tersebut.
- Merencanakan jadwal diskusi
- Merancang acuan diskusi
- Memaparkan pendahuluan mengenai masalah yang akan didiskusikan kepada masyarakat, dimulai dengan topik yang tidak kontroversial tetapi berhubungan
- Berdiskusi sesuai dengan acuan
- Menjaga agar alur diskusi tetap sesuai dengan topik yang dibicarakan
- Membuat kesimpulan diskusi

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dilaksanakan FGD dengan membagi beberapa kelompok diskusi yang terkait dengan mata pencahariannya, dan juga kelompok yang berasal dari *Stakeholder*. Pembagian grup tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

- Grup petani, dengan anggota sebanyak 8 orang peserta
- Grup Peternak dan tukang potong hewan, dengan anggota sebanyak 6 orang
- Group pekerja konveksi, dengan anggota sebanyak 6 orang
- Group buruh kasar, dengan anggota sebanyak 6 orang
- Group umum, dengan anggota sebanyak 8 orang dari berbagai kalangan
- Group *Stakeholder*, dengan anggota sebanyak 8 orang, dimana dalam group ini terdapat bapak kepala desa, pemuka agama, tetua

desa, sekretaris desa, bidan, guru, ketua UPK, dan bendahara UPK

Dalam pemilihan kelompok, dipilih berdasarkan kelompok pekerjaannya, hal itu dimaksudkan agar, dalam satu kelompok terdapat jawaban yang beragam berdasarkan jenis pekerjaannya dan memudahkan jalannya diskusi yang dilaksanakan. Pemilihan berdasarkan kelompok pekerjaan tersebut juga dimaksudkan untuk melihat apakah ada perbedaan yang dirasakan dan permasalahan dalam bidang pekerjaannya, serta bagaimana mereka merasakan manfaat UPK, dan memberikan masukan untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh UPK. Pemilihan sampling ditunjuk langsung oleh kepala desa, setiap kelompok berdasarkan pekerjaan tersebut langsung dipilih oleh kepala desa dibantu oleh ketua UPK.

B. *Brainstroming*/Curah Pendapat

Brainstroming adalah suatu kegiatan berkelompok yang diikuti oleh masyarakat terpilih dimana peserta bergiliran untuk membagi ide yang berkenaan dengan suatu topik atau suatu pertanyaan. Dalam hal ini fasilitator akan mendorong peserta untuk bereaksi atas suatu permasalahan dan ditanggapi oleh peserta lain.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan informasi baru, perspektif dan ide atau mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai orang terhadap suatu masalah. Informasi yang dihasilkan biasanya kasar, tetapi bisa diikuti dengan teknik partisipasi lain seperti diagram venn, metode rangking dan FGD.

Hal – hal yang harus dipersiapkan dalam metode ini antara lain:

- Menentukan dan mendiskusikan tujuan diskusi dengan masyarakat
- Menentukan target peserta dan mendiskusikannya kepada pemimpin masyarakat tentang kriteria pemilihan peserta. Kriteria peserta dapat didasarkan atas umur, tingkat pendidikan, etnis/

suku/ ras, bahasa, wawasan, status perkawinan, status ekonomi, agama, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan lama berdomisili.

- Merencanakan jadwal kegiatan
- Merancang acuan diskusi

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam curah pendapat ini, antara lain:

- Menerangkan dan mendiskusikan tujuan dan mekanisme diskusi sampai semua peserta mengerti
- Memperkenalkan topik yang akan dibahas
- Meminta peserta untuk membagi ide mereka berkenaan dengan topik. Ide mereka tersebut jangan sampai disensor dan jangan berdiskusi terlalu lama
- Menulis semua ide yang muncul di papan tulis
- Bersama – sama dengan peserta mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menggabungkan ide yang tertulis
- Mendiskusikan dan menganalisis hasil secara bersama – sama atau menggunakan ide tersebut sebagai masukan untuk hal lain
- Kualitas hasil diskusi yang dilakukan semuanya tergantung pada kemampuan fasilitator dalam memancing ide – ide yang ada di masyarakat

Dalam hal ini, curah pendapat dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat dari kalangan buruh tani, kalangan pekerja kasar, kalangan pekerja konveksi payet, serta pengurus UPK.

3.1.1.2. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara, digunakan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah wawancara atau percakapan baik

dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan¹⁸. Biasanya metode ini menggunakan suatu daftar panduan pertanyaan. Dalam metode ini berbeda dengan wawancara terstruktur yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan dan pilihan jawaban. Pewawancara bebas bertanya, namun, masih harus sesuai dengan panduan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan dalam metode ini merupakan pertanyaan semi terbuka, karena merupakan bahan acuan wawancara. Isi dan kajian bisa diubah, disesuaikan dengan proses diskusi untuk mencapai tujuan.

Dalam metode wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini, sampling diambil secara acak kepada warga desa, jumlah warga yang diwawancara berjumlah 25 orang. Pengambilan sampling wawancara meliputi wawancara terhadap petani, wawancara terhadap peternak dan tukang potong hewan ternak, wawancara terhadap kaum perempuan, wawancara terhadap pengurus desa, wawancara terhadap pekerja konveksi, wawancara terhadap buruh, serta wawancara dengan pengurus UPK. Selain dengan masyarakat Desa Kertosono, wawancara juga dilakukan dengan pejabat Bapemas Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola program Gerdu-taskin, dan juga wawancara terhadap fihak diluar program Gerdu-taskin, dalam hal ini adalah pegawai dari perusahaan besar yang terletak di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Wawancara yang dilakukan dengan penduduk desa digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam rumah tangga di Desa Kertosono, serta bagaimana manfaat program Gerdu-taskin terhadap masyarakat Desa Kertosono. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai Bapemas Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, manfaat, hambatan, serta harapan akan keberlangsungan program Gerdu-taskin. Wawancara dengan fihak diluar program dimaksudkan untuk melihat, sejauh mana perusahaan besar dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, serta kemungkinan kerjasama apa yang dapat terwujud antara program pemerintah dengan perusahaan tersebut.

¹⁸ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2006

Metode ini berguna untuk melengkapi pengamatan yang telah dilakukan, membuka dimensi baru suatu masalah dan mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan pengalaman pribadi. Proses pelaksanaan dari metode ini antara lain ¹⁹:

- Membuat daftar panduan pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat haruslah pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang akan dijawab dengan ya dan tidak. Pertanyaan yang dibuat, haruslah dapat memancing opini masyarakat mengenai masalah yang mereka hadapi
- Mencari informasi mengenai pengertian istilah lokal yang terkait dengan kehidupan sehari – hari
- Membuat daftar orang yang layak diwawancara
- Wawancara
- Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara
- Mulai dengan pertanyaan umum kemudian ke pertanyaan khusus
- Menulis atau merekam semua jawaban.

3.1.1.3. Visualisasi dan Diagram Hubungan

Diagram Venn

Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menggambarkan hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga lain dalam satu daerah atau suatu proyek. Diagram Venn ini menggunakan lingkaran – lingkaran untuk menggambarkan lembaga. Ukuran lingkaran menggambarkan besarnya pengaruh lembaga. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang mengerti hubungan antar lembaga dalam masyarakat.

¹⁹ Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2. Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2006

Teknik ini berguna untuk mengidentifikasi kelompok atau lembaga baik internal maupun eksternal dan hubungannya dengan lembaga masyarakat atau antar lembaga. Informasi yang dikaji antara lain²⁰:

- Lembaga secara umum: yaitu informasi mengenai semua lembaga yang berhubungan dengan masyarakat desa, baik yang berada di dalam desa tersebut, maupun yang berada di luar desa tetapi berhubungan dengan desa misalnya Puskesmas di Kecamatan. Jenis lembaga yang diteliti adalah: lembaga lokal (tradisional), lembaga – lembaga pemerintah (misal: Pemerintah Desa, Puskesmas, Koperasi Unit Desa/KUD), lembaga – lembaga swasta (misal: Lembaga Swadaya Masyarakat).
- Lembaga – lembaga khusus: yaitu informasi mengenai lembaga – lembaga tertentu saja, misalnya lembaga yang kegiatannya berhubungan dengan pertanian saja, kesehatan saja, atau lembaga adat.

Sumber informasi untuk teknik ini antara lain :

- Sumber informan utama adalah para warga masyarakat, terutama mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengalaman yang menyangkut lembaga – lembaga yang bersangkutan
- Informasi dari masyarakat bisa dicek silang (triangulasi) dengan informasi dari pengelola lembaga yang bersangkutan
- Data skunder (misalnya dari kantor desa dan dari lembaga yang bersangkutan), bisa juga digunakan sebagai perbandingan.

Manfaat teknik ini bagi masyarakat antara lain :

- Diskusi ini akan lebih memperhatikan keadaan lembaga – lembaga di desa karena sering kali lembaga – lembaga luar hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat yang terlibat.

²⁰ *Ibid* Hal 19

- Diskusi ini juga berguna untuk membahas peningkatan berbagai lembaga. Setelah mendiskusikan permasalahan dalam hubungan masyarakat dengan lembaga tersebut, kemudian mengkaji harapan – harapan mengenai kegiatan lembaga dan bentuk hubungan yang sesuai dengan harapan tersebut.

3.1.1.4. Metode Tempo

Aktivitas Harian

Tekhnik ini merupakan suatu cara untuk mencari informasi tentang berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari, baik itu secara produktif maupun nonproduktif. Tekhnik ini berguna untuk mengidentivikasi aktivitas yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam satu hari. Baik dari segi gender dan mata pencaharian. Proses pelaksanaan tekhnik ini antara lain :

- Mengadakan pertemuan masyarakat dimana dalam penelitian ini, masyarakat dibagi berdasarkan kelompoknya (antara lain, kelompok petani, kelompok buruh, kelompok pekerja konveksi payet, petugas UPK)
- Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan
- Mempersiapkan bagan kosong pada kertas plano
- Meminta para peserta enuliskan kegiatan yang dilaksanakannya setiap hari serta waktu pelaksanaannya

3.1.1.5. Metode Ruang

Pemetaan Partisipatif

Metode ini berguna untuk membagi dan menetapkan informasi yang ada pada suatu daerah dalam suatu peta. Pemetaan ini dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat yang mengetahui keberadaan informasi tersebut, memplot sendiri informasi yang ada pada peta dasar atau langsung membuat peta sendiri. Ada dua macam peta yang dibuat

yaitu peta sket dan peta berdasarkan peta dasar. Informasi yang ada dalam peta tersebut pada akhir pemetaan harus dicek kebenarannya langsung dilapangan.

Pemetaan partisipatif adalah, pemetaan partisipatif adalah metode untuk mengumpulkan dan memetakan informasi yang ada serta yang terjadi dalam masyarakat serta kondisi sekitar. Informasi – informasi tersebut kemudian digambarkan kedalam peta atau sketsa desa. Ada peta yang menggambarkan keadaan sumber daya umum desa dan ada peta dengan tema tertentu yang menggambarkan hal – hal yang sesuai dengan ruang lingkup tema tersebut (misalnya, peta desa yang menggambarkan jenis – jenis tanah, peta sumber daya pertanian, peta penyebaran penduduk, peta pola pemukiman dan sebagainya).

Kegunaan dari teknik ini antara lain:

- Mengetahui status sumberdaya, konflik, keterlibatan lelaki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya.
- Mengetahui jarak dan akses terhadap sarana prasarana serta penggunaan lahan
- Mendukung masyarakat untuk mengidentifikasi, menempatkan, mengklasifikasi antara lain kondisi sumber daya alam, kondisi sosial, aktivitas keseharian dan lainnya.
- Mendukung terbangunnya hubungan antara berbagai jenis informasi.

Untuk mencapai partisipasi yang efektif, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu:

- Waktu partisipasi, kapan partisipasi mau dilakukan
- Siapa yang berpartisipasi
- Bentuk partisipasi

- Seberapa tingkat kesertaan/partisipasi masyarakat baik kelompok maupun individual dalam mengontrol pengambilan keputusan untuk inisiatif kegiatan.

Dalam kasus Desa Kertosono, peta yang dibuat adalah peta sosial. Peta ini dibuat untuk melihat keadaan umum desa dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya, sarana dan prasarana, keadaan fisik lingkungan desa penyebaran daerah pemukiman, pasar, sekolah, puskesmas, dan jalan raya.

3.2 Metode Analisis

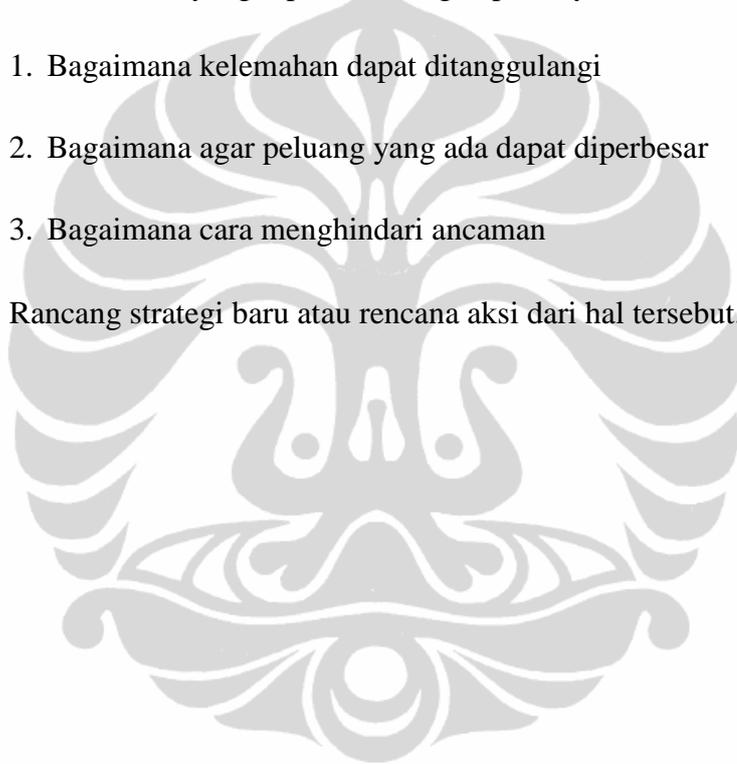
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *SWOT*. Soesilo (2002) menjelaskan, *SWOT* merupakan singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Lebih lanjut menurut Soesilo (2002), Analisis *SWOT* adalah jabaran dari manajemen srategik versi Chicago dengan prinsip “*inside out*”. Dalam analisis ini, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi.

Kegunaan dari analisis *SWOT* ini antara lain:

- Untuk mengidentifkasi kekuatan dan peluang dan mencari jalan bagaimana untuk mengoptimalkannya, serta mengidentifkasi kelemahan dan ancaman supaya dapat dicari cara mengatasinya
- Analisis *SWOT* merupakan salah satu bagian dari penyusunan rencana strategis

Selanjutnya menurut Soesilo (2002) dalam Chairina Hanum (2010), sebelum menjabarkan analisis *SWOT* dengan langkah – langkahnya, maka hal paling utama yang harus diputuskan adalah siapakah *stakeholder* utama. Penentuan ini sangat penting karena kita sering menghadapi banyak *stakeholder* dan seringkali tujuan utamanya sering bertentangan. Proses pelaksanaan analis *SWOT* ini antara lain:

- Klarifikasikan kepada masyarakat masalah apa yang akan dibuat analisis *SWOT*-nya
- Jelaskan pengertian *SWOT* dimana *SW* adalah faktor Internal dan *OT* adalah faktor eksternal
- Mintalah peserta untuk menguraikan kekuatan dari kelompok dan diskusikan. Ulangi proses untuk kelemahan, peluang dan ancaman
- Analisis hasil yang diperoleh dengan pertanyaan:
 1. Bagaimana kelemahan dapat ditanggulangi
 2. Bagaimana agar peluang yang ada dapat diperbesar
 3. Bagaimana cara menghindari ancaman
- Rancang strategi baru atau rencana aksi dari hal tersebut.



BAB 4

PROFIL DESA DAN PROGRAM

4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Kertosono merupakan sebuah wilayah yang terletak pada kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Luas wilayah Desa Kertosono 1328 Ha, yang terbagi dalam dua belas RT dan dua RW²¹. Adapun batas wilayah yang melingkupinya adalah :

- Sebelah Utara : Desa Lasem
- Sebelah Selatan : Desa Bangun Rejo
- Sebelah Barat : Desa Bolo
- Sebelah Timur : Desa Kembungan Sepuh

Kondisi topografi Desa Kertosono terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian maksimum 15 meter dari permukaan laut. Wilayah Desa Kertosono sebagian merupakan wilayah persawahan, batas desa merupakan batas sawah, wilayah pemukiman Desa Kertosono terlingkup dalam satu wilayah saja, yang biasa mereka sebut dengan wilayah tengah. Wilayah Desa Kertosono merupakan wilayah dengan iklim tropis, dengan suhu minimum berkisar 21,6 derajat celcius – 23,4 derajat celcius, dan maksimum berkisar antara 28,6 derajat celcius – 34,2 derajat celcius²².

Secara umum, pola pemanfaatan lahan di Desa Kertosono meliputi penggunaan sebagai pemukiman penduduk, wilayah pertanian (sawah), Rawa, semak belukar. Penggunaan lahan didominasi oleh wilayah pertanian (sawah). Tetapi, sawah – sawah tersebut bukanlah milik penduduk asli Desa Kertosono, pemilik lahan tersebut kebanyakan tuan tanah dari Kabupaten Gresik, atau dari Kecamatan Sidayu sendiri. Antara kawasan pemukiman terdapat jalan setapak berupa jalan berpasir atau tanah.

²¹ Profil desa Kertosono, tahun 2009

²² *Ibid*

4.1.2 Kondisi Demografi

Desa Kertosono memiliki 628 Kepala keluarga²³, Jumlah penduduk Desa Kertosono adalah 2436 jiwa, yang terdiri dari 1318 orang laki-laki dan 1118 orang perempuan. Jumlah penduduk paling banyak adalah pada usia 17 – 55 Tahun, yaitu sebanyak 1875 orang, dimana pada usia tersebut merupakan usia yang produktif. Suku bangsa masyarakat yang mendiami wilayah Desa Kertosono sebagian besar adalah suku Jawa, dimana terdapat 2038 orang, namun ada sebagian warga yang merupakan keturunan dari suku Madura, Batak, dan masyarakat Tionghoa, serta keturunan Arab.

Wilayah pemukiman masyarakat Desa Kertosono yang terbagi dalam dua belas RT memiliki karakteristik yang unik, wilayah pemukiman tersebut terkumpul didalam satu wilayah tengah, walaupun ada dua RT yang terpisah dari wilayah tengah tersebut, karena terputus oleh sebuah sungai kecil dan sawah yang terdapat di daerah tengah tersebut. Meskipun daerah pemukiman masyarakat Desa Kertosono yang terdapat di daerah tengah, namun jarak antar pemukiman cukup jauh satu sama lainnya, dan mereka terkelompok menurut RT masing – masing, dimana antara RT satu dan yang lainnya biasanya terdapat jarak pemisah, baik berupa sawah, sungai kecil, maupun tanah kosong. Kondisi rumah masyarakat Desa Kertosono sebenarnya sudah memadai, dinding sudah dari tembok, ataupun dari bambu (gedhek) atap rumah masyarakat sebagian besar terbuat dari asbes dan triplek, selain itu atap biasanya di tutupi dengan daun kelapa, kondisi Lantai rumah masyarakat telah di semen.

Penduduk yang sudah ada turun temurun tinggal di Desa Kertosono, sehingga antar warga memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat (erat). Selain itu, ada sebagian pendatang dari luar desa yang akhirnya menetap karena menikah dengan penduduk Desa Kertosono. Mayoritas penduduk di Desa Kertosono memeluk agama Islam, dengan adanya 2 buah mushola, dan 1 buah masjid. Didesa ini terdapat juga tempat pengajaran pendidikan Al - quran sejak usia dini, sudah menjadi semacam adat atau keharusan

²³ *Ibid*

bahwasannya anak usia dini (enam tahun) wajib mengenyam pendidikan Al – quran bagi yang beragama Islam.

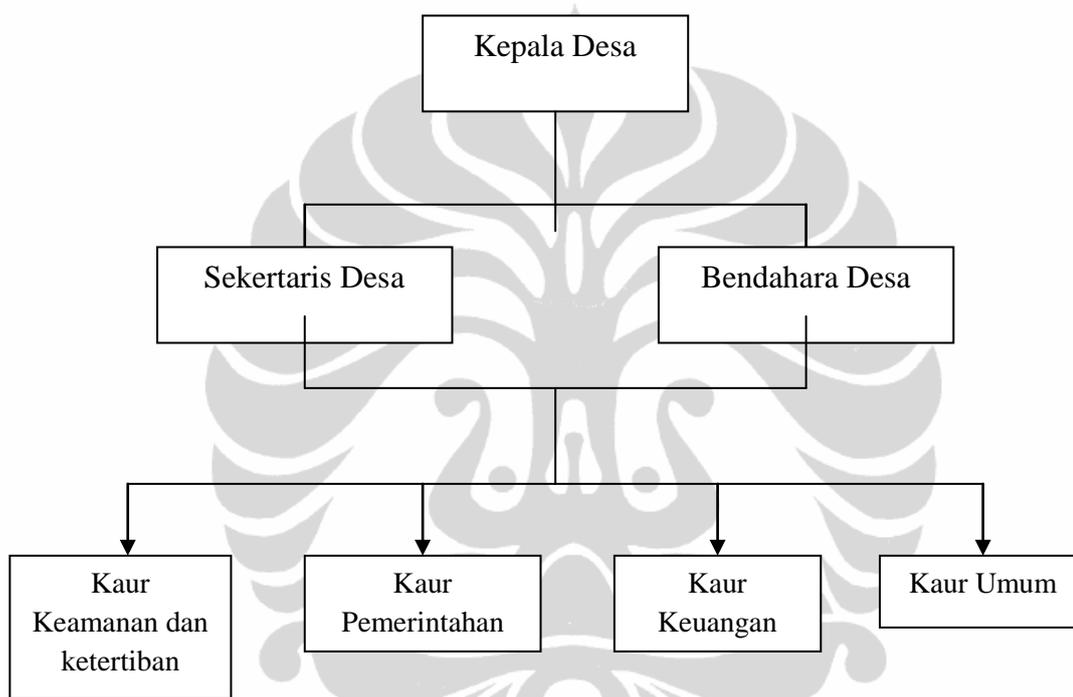
Meskipun masyarakat yang tinggal di Desa kertosono terdiri dari beragam suku yaitu Jawa, Madura, Batak, Tionghoa, dan Arab, mereka hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati satu sama lain. Struktur pemerintahan Desa Kertosono sama dengan kebanyakan wilayah lain di Indonesia, lingkungan terkecil masyarakat dipimpin oleh ketua RT yang dipilih oleh masyarakat, dan lingkungan yang lebih besar dipimpin oleh ketua RW yang juga dipilih oleh masyarakat. Di Desa Kertosono terdapat beberapa orang Tetua, yaitu mereka yang sudah lama tinggal di Desa Kertosono. Namun, Tetua tersebut tidak terlalu berpengaruh di masyarakat Desa Kertosono. Pengaruh terbesar dimiliki oleh pemuka agama dan aparat desa.

Warga pendatang yang tinggal di Desa Kertosono jumlahnya tidaklah banyak. Mereka yang kemudian tinggal di Desa Kertosono kebanyakan karena menikah dengan penduduk Desa Kertosono, selain itu ada beberapa pendatang di Desa Kertosono yang tinggal karena bertugas mengabdikan desa, antara lain adalah guru SD (MI Daroyissalam) dan bidan Puskesmas. Penduduk Desa Kertosono sendiri memiliki kecenderungan untuk melakukan migrasi. Mereka yang berkeinginan melanjutkan sekolah hingga pendidikan tingkat lanjut harus keluar dari desa, umumnya ke Surabaya. Selain itu, penduduk usia muda (16 tahun – 32 tahun) kebanyakan keluar dari Desa Kertosono untuk mencari pekerjaan, umumnya ke wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Balai Desa Kertosono memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan segala aktivitas warga desa, mulai dari rapat desa, tasyakuran, sampai perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus dilaksanakan di balai desa, meskipun kondisi dan fasilitas balai desa sangat kurang tapi segala aktifitas masyarakat desa terletak di balai desa. Selain itu, balai desa juga menjadi tempat dari lembaga – lembaga masyarakat bentukan pemerintah, baik yang masih berjalan maupun yang sudah tidak aktif, saat ini hanya terdapat dua lembaga yaitu UPK “Semoga Jaya” Desa Kertosono, dan Koperasi Desa.

Selain lembaga, Puskesmas atau balai kesehatan warga juga terdapat dibalai desa. Dalam menjalankan aktivitasnya, kepala Desa dibantu oleh satu orang sekretaris desa, satu orang bendahara desa, dan empat orang lainnya yang bertugas sebagai kepala urusan desa (Kaur), yaitu Kaur keamanan dan ketertiban, kaur pemerintahan, kaur umum, dan kaur keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur pemerintahan Desa Kertosono dibawah ini :



Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Kertosono

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kertosono masih rendah. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Desa Kertosono. Sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan SD. Hingga saat ini hanya terdapat satu SD, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Daroyissalam, selain itu, di Desa Kertosono terdapat dua tempat pendidikan agama, yaitu Tempat Pendidikan Al – quran (TPA) Al – Muhtadzin. Sedangkan, satu lagi TPA Al – Anshori merupakan tempat pendidikan Al – quran untuk anak – anak, dan kaum Ibu – ibu Desa Kertosono. Dengan fasilitas pendidikan yang seperti itu, masyarakat Desa

Kertosono kebanyakan berhenti sekolah setelah lulus dari MI. Untuk warga yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP, SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi harus keluar dari desa. Namun, kebanyakan warga setelah lulus dari MI, memilih menitipkan anaknya di Pondok pesantren yang terdapat di wilayah Kecamatan Sidayu, maupun Pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Gresik. Tenaga pengajar di Desa Kertosono juga jumlahnya sangat terbatas, jumlah guru SD yang ada di desa tersebut hanya berjumlah lima orang yang mengajar bergantian dari kelas satu sampai kelas enam. Sedangkan, pengajar TPA adalah warga desa yang telah pulang dari pesantren dan satu orang dari desa lainnya.

4.1.3 Mata Pencarian Masyarakat

Berdasarkan jenis pekerjaannya masyarakat Desa Kertosono bekerja disektor informal. Untuk memenuhi kecukupan rumah tangganya masyarakat desa bekerja sebagai petani penggarap ladang, selain bekerja sebagai petani masyarakat desa bekerja sebagai buruh lepas, baik itu buruh kasar bangunan di luar daerah Desa Kertosono, maupun sebagai buruh harian rumah tangga. Selain menjadi petani dan buruh, beberapa warga bekerja sebagai buruh konveksi sulam jilbab, beberapa lainnya memilih sebagai peternak dan tukang potong hewan ternak di rumah potong ternak di Kecamatan Sidayu.

Mereka yang bekerja sebagai buruh, dan tukang potong hewan ternak serta peternak umumnya adalah kaum laki – laki. Sedangkan, yang bekerja sebagai buruh rumah tangga, dan buruh konveksi sulam jilbab adalah para kaum wanita, baik itu diusia muda maupun usia tua. Sedangkan untuk petani penggarap, yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Kertosono adalah kaum pria dan kaum wanita, mereka berbaur dalam penggarapan sawah, umumnya para buruh penggarap sawah telah turun temurun, dimana para pemuda mengikuti jejak orang tua nya sebagai petani, dan mereka pun menjadi petani.

Pada umumnya para petani penggarap menggarap sawah pada saat mulai musim cocok tanam sampai musim panen, setelah masa musim panen biasanya kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh harian bangunan,

dan buruh rumah tangga. Pendapatan para petani penggarap biasanya berkisar sekitar Rp. 25.000,- per hari, pengerjaan buruh tani dilaksanakan dari hari senin – hari minggu, namun mereka mendapatkan jatah libur pada hari Jum'at, hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat desa, dimana hari Jum'at merupakan hari yang suci, dan pada hari Jum'at tersebut masyarakat pada umumnya beribadah di masjid, atau berziarah ke makam Kanjeng Sepuh Sedayu, yang merupakan tokoh pemuka bagi masyarakat di Kecamatan Sidayu, yang terletak cukup jauh dari wilayah Desa Kertosono (kurang lebih 17 Km). Kegiatan cocok tanam dimulai sejak pagi hari, biasanya warga berangkat ke sawah dimulai sejak pukul enam pagi, dan mereka selesai bekerja pada pukul tiga sore.

Warga yang memiliki pekerjaan sebagai peternak dan tukang potong hewan ternak memiliki kecenderungan hidup lebih statis dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – harinya, hal ini dikarenakan pengusaha ternak dan daging potong telah mengelola badan usahanya secara lebih professional, walaupun letak unit usaha potong ternak tersebut cukup jauh dari Desa Kertosono. Untuk pekerja dibidang ini mereka berangkat ke tempat bekerja mulai pukul lima pagi. Mereka berangkat ke lokasi pekerjaannya menggunakan sepeda, mereka menempuh jarak kurang lebih dua puluh kilometer pulang pergi untuk yang bekerja di daerah Kecamatan Sidayu, namun, beberapa warga bekerja di Kecamatan Dukun, mereka dapat menempuh jarak kurang lebih tiga puluh kilometer pulang pergi dari rumah sampai ketempat kerjanya. Mereka yang bekerja sebagai peternak dan tukang jagal ini memiliki upah bulanan sebesar Rp. 850.000,- serta mendapatkan jatah makan siang dari tempat mereka bekerja.

Warga yang bekerja sebagai buruh konveksi sulam jilbab, merupakan para wanita. Mereka bekerja mulai dari pukul delapan pagi. Usaha konveksi sulam jilbab ini milik Ibu Sudarhani yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, jilbab – jilbab polos yang siap di sulam dikirim dari Gresik pada pukul lima sore, dan jilbab – jilbab yang telah disulam diambil untuk dibawa ke Gresik kembali pada pukul 5 sore itu juga. Usaha konveksi sulam jilbab ini

diletakkan di salah satu rumah warga, rumah tersebut milik Bapak Rohadi yang terletak di RT 2, Desa Kertosono. Bapak Rohadi merupakan saudara dari Ibu Sudarhani (pemilik usaha), sehingga manajemen usaha tersebut dikelola langsung oleh Bapak Rohadi, dan dapat dibilang sebagai satu – satunya laki – laki diusaha konveksi tersebut. Para buruh sulam jilbab ini mendapatkan upah berdasarkan jumlah sulaman mereka selama satu bulan, mereka mendapatkan upah Rp. 1000,- untuk setiap 10 jilbab yang disulam, biasanya mereka dapat menyulam hingga 30 sampai 50 jilbab per hari, mereka bekerja selama 20 hari dalam satu bulan, upah yang mereka terima dalam satu bulan antara Rp. 600.000,- sampai Rp. 1.000.000,- tergantung dari kapasitas produksi mereka.

Masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan, ataupun buruh harian rumah tangga masuk kedalam kelompok masyarakat yang kurang beruntung, hal ini dikarenakan mereka hanya bekerja apabila mendapat panggilan proyek saja, bahkan bisa jadi mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dalam satu harinya. Namun, pemilik jenis pekerjaan ini jumlahnya sangat sedikit, dalam survey yang dilakukan, pemilik jenis pekerjaan ini hanya 62 orang saja, sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk Desa Kertosono.

4.1.4 Sarana dan Pra sarana

Jarak Desa Kertosono dari pusat keramaian Kecamatan Sidayu kurang lebih 20 Kilometer, yang dapat ditempuh dengan empat puluh lima menit perjalanan menggunakan sepeda kayuh, dan dua puluh menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak Desa Kertosono ke Kabupaten Gresik sekitar 38 kilometer, yang dapat ditempuh dengan waktu satu setengah jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari jalan utama penghubung antar desa adalah jalan setapak beraspal yang sudah berlubang dan ditambah oleh warga sendiri menggunakan tutupan batu dan pasir. Jenis jalanan ini akan sangat berbahaya apabila terjadi musim hujan, dimana lubang – lubang dijalan tidak terlihat oleh pengendara kendaraan bermotor, dan sering kali menyebabkan pengendara terjatuh pada saat terjadi hujan. Untuk

menempuh jalan utama warga desa diharuskan menempuh jarak sejauh kurang lebih dua setengah kilometer, akibatnya banyak kegiatan warga yang terhambat oleh hal tersebut. Jalanan yang ada didesa tersebut kondisinya sudah parah, dengan lebar yang hanya satu sampai dua meter menyebabkan jalanan tersebut menjadi sempit apabila kendaraan pengangkut bahan konveksi melintas. Balai desa yang merupakan letak kebanyakan aktivitas warga terletak di ujung jalan masuk desa akan terasa sangat jauh bagi warga, dimana jarak dari balai desa ke daerah pemukiman terdekat berjarak 1 kilometer, hal ini sangat menghambat aktivitas warga, terutama untuk aktivitas kesehatan dan pendidikan, yang mana letak puskesmas berada dibalai desa, dan letak SD berada disebrang balai desa tersebut.

Kondisi rumah warga sebenarnya sudah cukup bagus, dimana sebagian besar sudah menggunakan tembok semen, dan lantai yang disemen pula, atap rumah telah terbuat dari triplek yang ditutupi dengan daun dari pohon kelapa yang sudah kering. Sebagian lagi rumah warga dalam kondisi yang kurang baik, rumah yang berasal dari bambu (gedhek) dengan atap dari kayu yang ditutupi dengan daun kering dari pohon kelapa. Rumah warga letaknya berdempetan satu sama lainnya, dengan jalan penghubung yang masih sama dengan kondisi jalan utama, beberapa jalan penghubung hanya menggunakan jalan tanah dan pasir saja. Rumah – rumah warga pada umumnya telah dilengkapi dengan sarana MCK.

Sarana penerangan (listrik) di Desa Kertosono telah tercukupi, sarana listrik dari PLN telah masuk ke Desa Kertosono, Semua rumah telah memiliki sarana listrik tersebut, namun, sarana listrik tersebut dalam waktu belakangan kurang optimal, sejak tahun 2004 listrik yang masuk di desa tidak dapat dirasakan selama 24jam penuh, hal ini disebabkan setiap harinya selalu terjadi pemadaman listrik, biasanya pemadaman terjadi pada pukul 18.00 – pukul 23.30 Wib. Hal itu menyebabkan kondisi desa menjadi gelap gulita pada malam hari, untuk menerangi rumah, warga menggunakan lampu bersumber minyak tanah (lampu ublik). Disekitar balai desa terdapat beberapa buah lampu jalanan, yang merupakan penunjuk masuk kedalam desa, lampu

tersebut menggunakan genset yang terletak dibalai desa, dan biasanya dihidupkan hanya pada pukul 18.00 – pukul 21.30 Wib, akibatnya setelah pukul 21.30 Wib jalanan desa tersebut menjadi gelap gulita sampai pada pukul 23.30 wib, hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi warga. Kebanyakan warga malah merasa aneh apabila pada jam tersebut listrik tidak padam, dan sebagian warga, terutama yang bekerja diindustri konveksi payet menjadi khawatir, dikarenakan kemungkinan listrik mati pada siang hari, yang menyebabkan kapasitas produksi mereka berkurang. Selain itu, apabila listrik tidak padam pada pukul 18.00 – pukul 23.30 Wib, keesokan harinya dapat dipastikan terjadi pemadaman dua kali, dengan kata lain terjadi pemadaman hamper sehari penuh.

Fasilitas air bersih sudah bukan masalah bagi warga Desa Kertosono, hal itu disebabkan sejak tahun 1999 PDAM telah memasok kebutuhan air bersih didesa tersebut, selain pasokan dari PDAM, sumur – sumur warga telah dapat memancarkan air bersih, dengan ditambahkan pompa penyedot air, maka kebutuhan air di desa telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Desa Kertosono memang memiliki aliran air yang sangat bagus di bawah tanahnya, hal itu pula yang menyebabkan sawah – sawah di desa tersebut tidak pernah kekurangan air, dan system irigasi pertanian didesa tersebut cukup baik.

Fasilitas pendidikan di Desa Kertosono tergolong sangat mengenaskan, hanya terdapat SD, dan dua buah taman pendidikan Al – quran, dimana kondisi SD tersebut merupakan bangunan tua yang berdiri sejak tahun 1992, dan belum pernah di renofasi hingga saat ini, SD tersebut memiliki 6 buah kelas dan hanya memiliki lima orang pengajar, hal itu menjadikan jam pengajaran di SD tersebut sangat terbatas, untuk kelas empat, lima dan enam masuk mulai pukul tujuh pagi hingga pukul setengah dua belas siang, sedangkan untuk kelas satu, dua, dan tiga masuk mulai pukul satu siang sampai pukul setengah lima sore, dengan jam yang hanya singkat tersebut, terkadang mata pelajaran yang diberikan tidak sampai tuntas, terhambatnya aliran listrik menjadi suatu alas an untuk anak – anak tidak

dapat belajar sendiri di rumah pada malam hari. Sedangkan untuk TPA yang ada di desa pun jam belajarnya bergantian, untuk anak usia kelas satu, dua, dan tiga dimulai pada pagi hari jam delapan pagi sampai jam sepuluh pagi, selanjutnya mereka pulang dan bersiap – siap untuk pergi ke sekolah, sedangkan anak usia kelas empat, lima, enam mereka masuk TPA pada pukul tiga sore sampai pukul lima sore. Selain itu pada TPA Al – anshori, mereka juga mengajarkan mengaji kepada kaum ibu, namun tidak diadakan setiap hari, melainkan hanya diadakan pada hari Selasa dan Jum'at saja, pada pukul sepuluh pagi sampai pukul dua belas siang saja. Di Desa Kertosono tidak terdapat fasilitas pendidikan yang lebih tinggi, hal itu menyebabkan para warga yang telah menempuh pendidikan SD biasanya akan keluar dari Desa untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau memilih untuk masuk ke pondok pesantren.

Selain fasilitas pendidikan yang sangat terbatas, fasilitas kesehatan di Desa Kertosono juga sangat terbatas, Desa Kertosono hanya memiliki satu buah puskesmas yang berada di alai desa, pengelola puskesmas juga hanya seorang bidan yang siap siaga dari pagi sampai sore di puskesmas balai desa, minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan banyak warga yang memilih mengobati diri sendiri dengan obat tradisional ramuan turun temurun, yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita, namun apabila tidak kunjung sembuh maka mereka baru ke puskesmas, dengan peralatan yang sangat terbatas, biasanya warga yang penyakitnya sudah parah dirujuk ke rumah sakit daerah, yaitu di Kecamatan Sidayu.

4.2 Gambaran Umum Program Gerdu-Taskin

Pada dasarnya Pemprov Jatim telah menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari 7 prioritas pembangunan Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2008. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi Rumah Tangga

Miskin (RTM), pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pengentasan kemiskinan ini, Pemprov Jatim mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat untuk saling bahu – membahu dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan RPJMD dengan memberikan pemodalannya kepada daerah di Jawa Timur yang masuk kedalam lingkup program, pemodalannya tersebut diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBD Provinsi Jawa Timur difokuskan untuk berbagai macam program kerakyatan guna pengentasan kemiskinan. Adapun salah satu program pengentasan kemiskinan yang dibiayai langsung oleh APBD Provinsi Jatim, dan berbasiskan pemberdayaan masyarakat adalah program Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin). Program ini langsung ditujukan pada desa – desa di Propinsi Jawa Timur, modal diberikan dari Pemprov, kepada aparatur desa, yang kemudian modal tersebut di kelola langsung oleh masyarakat desa. Dalam program ini, pemerintah provinsi hanya sebagai pengawas dan pendamping saja. Pemprov Jatim mempercayakan bahwasannya dalam penanggulangan kemiskinan, kekuatan rakyat akan jauh berpengaruh untuk suatu keberhasilan.

Program Gerdu-Taskin Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sejak tahun 2002, sampai dengan tahun 2009 telah mampu menjangkau 1.540 Desa / Kelurahan kategori miskin dari seluruh target 1.801 Desa / Kelurahan kategori Miskin²⁴. Pelaksanaan program Gerdu-Taskin juga telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil di pedesaan, (iii) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, (v) terjadinya proses pembelajaran sosial (*social*

²⁴ Dikutip dari laporan akhir pelaksanaan program Gerdu-taskin 2009 Provinsi Jawa Timur

learning), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi:

1. pemberdayaan manusia,
2. pemberdayaan usaha
3. pemberdayaan lingkungan

Program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan dengan memantapkan pola kemitraan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten / Kota dan *stakeholders* lainnya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari Tahap Awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada Desa / Kelurahan lokasi. Program Gerdu – Taskin tahap awal dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain : Sosialisasi program, Perencanaan, Penulisan Proposal, Verifikasi, Pencairan dana, Pelaksanaan, Serta pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaan program Gerdu – Taskin, setiap desa diharuskan membuat Unit Pengelola Keuangan (UPK), yang mana UPK ini nantinya yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada desa.

Program Gerdu-taskin secara umum memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan focus utama pengembangan usaha ekonomi produktif Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pendekatan tridaya, Sedangkan tujuan khusus dari program Gerdu-taskin adalah²⁵ :

²⁵ Disadur dari Petunjuk teknis operasional program Gerdu-taskin tahap awal tahun 2009, pemerintah provinsi Jawa Timur, hal 2

- Meningkatkan peran serta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab
- Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM berpotensi
- Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha UPK dan RTM dalam rangka mengatasi pengangguran
- Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi kepada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM
- Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum desa/kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan
- Memperkuat kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan desa/kelurahan pada umumnya
- Mengoptimalkan kemitraan antar *Stakeholders* dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif

Adapun sosialisasi tahap awal pelaksanaan program tersebut dilakukan pada tahapan Provinsi yang diikuti oleh DPRD Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Bagian pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota, Perguruan tinggi, dan LSM. Setelah sosialisasi tahap provinsi, dilanjutkan dengan sosialisasi tahap Kabupaten/Kota, dalam sosialisasi tahap Kabupaten/Kota tim fasilitator yang menangani adalah Sekdap Kabupaten/Kota bersama – sama dengan pendamping provinsi, peserta dari sosialisasi Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota, Camat, BPD, LPMD, LSM, dan Perguruan tinggi. Setelah diadakan sosialisasi pada Kabupaten/Kota, selanjutnya dilaksanakan sosialisasi pada Sosialisasi Desa/Kelurahan, adapun tujuan dari sosialisasi Desa/Kelurahan adalah (i) Memberikan penjelasan kepada warga tentang program Gerdu-

taskin; (ii) Membentuk lembaga UPK; (iii) Memilih pengurus UPK; (iv) Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan program. Adapun peserta dari sosialisasi Dsa/Kelurahan tersebut adalah Perwakilan RTM, Aparat desa, RT/RW/Dusun, PKK/Organisasi perempuan, Lembaga ekonomi desa/kelurahan, BPD, Tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin ini, setiap daerah yang diberikan bantuan harus membuat UPK, UPK sendiri adalah lembaga pengelola kegiatan ekonomi milik Desa/Kelurahan dan dikelola secara otonom oleh masyarakat desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Proses penyusunan Perdes dilakukan oleh kepala desa dan BPD. Adapun untuk kepengurusan UPK diharuskan memiliki criteria sebagai berikut :

- Warga desa setempat yang dikenal jujur, kreatif, dan bertanggung jawab
- Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun
- Pendidikan minimal SLTP/ sederajat dan khusus untuk yang menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA
- Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan
- Bukan aparat/pemerintah desa maupun unsur BPD
- Bukan anak dan atau Istri kepala desa
- Dapat berasal dari kader pemberdayaan masyarakat (KPM)

Setelah terbentuk pengurus UPK, maka selanjutnya adalah pembuatan proposal untuk memperoleh dana gerdu-taskin tersebut. Proposal tersebut berisi rencana kegiatan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan yang disepakati berdasarkan hasil Musyawarah desa. Jenis kegiatan yang diuraikan dalam proposal harus sesuai dengan lingkup kegiatan tridaya yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Selanjutnya, dalam proposal tersebut juga dicantumkan lembar surat pengajuan permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jatim yang ditandatangani oleh ketua UPK mengetahui Kepala desa, camat, dan Sektaip Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, apabila proposal dan surat pengajuan pencairan dana telah disetujui, dana program Gerdu-taskin disalurkan langsung ke rekening UPK melalui Bank Jatim, setelah dana tersebut dicairkan dan masuk kepada rekening UPK, maka UPK kembali mengundang para peserta sosialisasi program untuk menjelaskan bahwasannya berapa jumlah dana yang didapat, serta proporsi pembagian dana tersebut, penggunaannya ditujukan untuk pelaksanaan program apa saja, sesuai dengan yang telah disusun pada musyawarah desa tahap awal. Selanjutnya, untuk pertanggung jawaban program, maka UPK wajib membuat laporan triwulanan (setiap awal bulan dalam jangka waktu setiap tiga bulan) yang ditujukan kepada pemerintah provinsi melalui pemerintah Kabupaten/Kota. Evaluasi program diadakan setiap tahun oleh tim fasilitator dari Provinsi Jawa Timur.

Menurut Gubernur Provinsi Jawa Timur, program Gerdu-Taskin yang dicanangkan oleh Pemprov Jatim untuk mengentaskan kemiskinan akan terus dilaksanakan hingga tahun 2014²⁶, sehingga pada tahun 2014 diharapkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah dapat dikurangi. Namun, untuk pelaksanaan program Gerdu-Taskin diharapkan dapat berjalan terus walaupun waktu yang ditetapkan hingga 2014 telah berakhir. Diharapkan UPK dapat menjadi sebuah lembaga yang mengayomi masyarakat desa. Dengan pendirian unit usaha, serta peningkatan keberhasilan dari usaha jasa simpan pinjam, UPK diharapkan untuk dapat terus berkembang menjadi lembaga yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Adapun indikator keberhasilan UPK dalam melaksanakan program adalah ²⁷:

1. Usaha simpan pinjam UPK dapat memberikan keuntungan buat UPK, yang digunakan untuk memberikan pemasukan dan modal tambahan bagi UPK
2. UPK dapat membuat jenis usaha yang dapat dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat desa, dan keuntungan dari usaha tersebut dapat dirasakan masyarakat desa

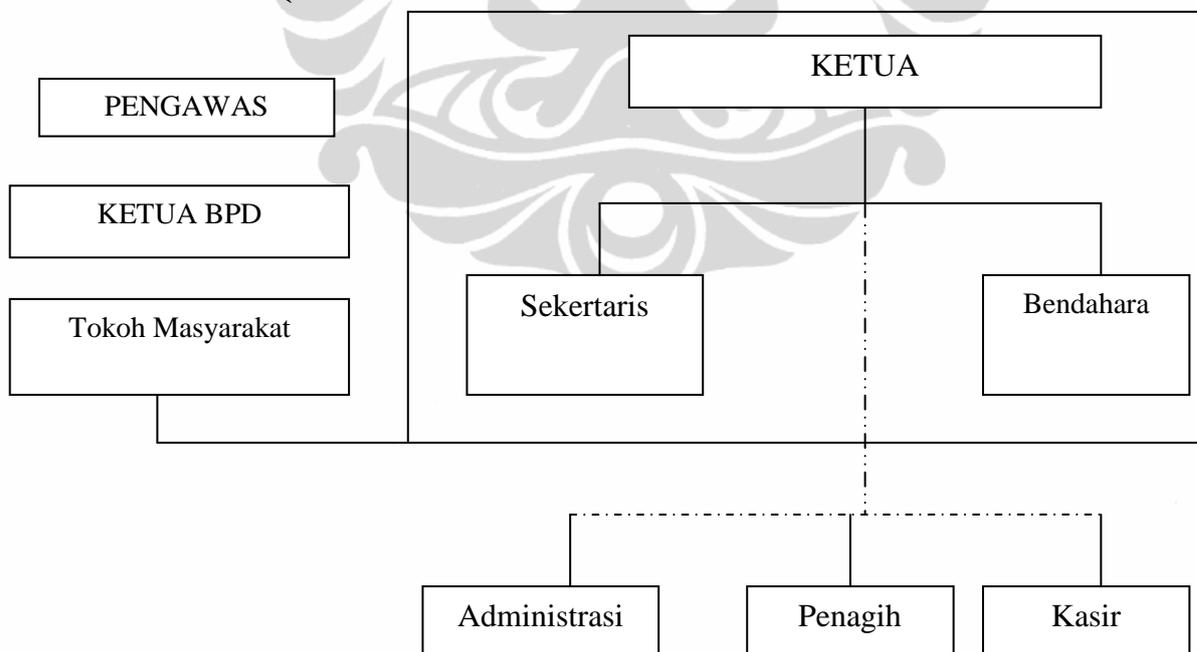
²⁶ Disadur dari Petunjuk teknis operasional program Gerdu-taskin tahap awal tahun 2009, pemerintah provinsi Jawa Timur

²⁷ Buku Panduan Juknis program Gerdu-taskin 2009

3. UPK dapat membantu kegiatan sosial di desa
4. UPK dapat memberikan laporan keuangannya secara rutin dan berkala kepada pemerintah Kecamatan, dan kepada masyarakat desa

4.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Program di Desa Kertosono

Desa Kertosono adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Gresik, Kecamatan Sidayu Jawa Timur. Desa Kertosono merupakan salah satu desa yang menerima bantuan modal melalui program Gerdu – Taskin. Desa Kertosono menerima bantuan program Gerdu-taskin pada 26 Maret 2004, Desa Kertosono membentuk sebuah UPK dengan nama Semoga Jaya, UPK semoga jaya tersebut dijalankan oleh tiga orang pengurus yang telah sesuai dengan kriteria pengurus UPK yang disusun oleh Juknis Operasional Program Gerdu-taskin Provinsi Jatim. Adapun Struktur UPK semoga jaya adalah :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi UPK semoga jaya

UPK Semoga jaya memiliki Visi dan misi kedepan, yaitu “menata dan Meniti kehidupan yang cerah dan sejahtera”. Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK semoga jaya antara lain :

- Memberikan pinjaman kepada warga Desa Kertosono yang tergolong rumah tangga miskin berproduktif (RTM-B) dengan waktu pinjaman selama satu tahun yang dapat diangsur setiap bulannya, dengan jasa perbulan sebesar satu persen
- Usaha Penggemukan sapi, usaha penggemukan sapi ini melibatkan masyarakat, terutama yang memiliki kemampuan mengembangkan sapi, dalam usaha pengemukan sapi ini UPK menerima jasa dari pengemukan sapi adalah sepertiga dari hasil perawatan (sesudah dipotong modal pokok), sisanya diberikan kepada masyarakat yang berpartisipasi didalam usaha tersebut
- Bermitra dengan pasar desa (pasar kerempyeng) yang buka hanya pada hari rabu disetiap minggunya
- Mengadakan tabungan dengan para penjual di pasar krempyeng

Pada dasarnya UPK di Desa Kertosono telah menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro, setelah masuknya UPK di Desa Kertosono, jumlah renternir yang masuk kedalam desa dapat ditekan, namun, bukan berarti bisa dihilangkan sama sekali, hal ini dikarenakan, jumlah pinjaman yang dapat dipinjam warga kepada UPK sangat terbatas jumlahnya, berbeda dengan yang dapat dipinjam kepada renternir. Jumlah renternir yang ada di Desa Kertosono sebelum UPK aktif kurang lebih ada 16 renternir kecil, dan 3 renternir besar. Yang dimaksudkan dengan renternir kecil adalah mereka yang dapat memberikan pinjaman dengan jumlah maksimal Rp. 2.000.000, sedangkan renternir besar adalah mereka yang dapat memberikan pinjaman hingga Rp. 5.000.000 bahkan lebih dari jumlah tersebut. Setelah UPK aktif di Desa Kertosono, mulai dari tahun 2004 hingga Juli 2010 jumlah renternir dapat dikurangi hingga menjadi 4 Renternir kecil dan 2 Renternir besar, hal ini menunjukkan bahwasannya UPK dapat mengurangi jumlah renternir yang ada di desa, walaupun belum dapat dihilangkan, hal tersebut

terjadi karena jumlah yang dapat dipinjamkan melalui UPK sangat terbatas, serta waktu peminjaman yang hanya dapat dilakukan dalam 1 bulan sekali. Hingga saat ini, masih ada warga yang meminjam kepada renternir dengan bunga yang besar, yaitu 30% - 50% dari setiap pinjaman selama 1 tahun, apabila pinjaman lebih dari 1 tahun maka renternir akan memberikan bunga yang dihitung sebesar bunga awal yaitu 30% - 50% tersebut. Hal tersebut dikarenakan, UPK hanya dapat memberikan pinjaman secara kolektif kepada warga, walaupun dengan bunga yang lebih rendah dari renternir, yaitu sebesar 1% perbulan, dimana jika ditotal adalah sebesar 12% dalam 1 tahun. Sedangkan renternir dapat setiap saat memberikan pinjaman kepada warga. Warga yang meminjam kepada renternir, biasanya dikarenakan mereka telah terhimpit dengan kebutuhan, seperti untuk mengeluarkan biaya rumah sakit, maupun untuk membayar sekolah anak mereka.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPK dibantu oleh kelompok masyarakat (Pokmas), yang mana Pokmas terbentuk disetiap RT, Pokmas memiliki fungsi sebagai pendata masyarakat desa yang akan mengajukan pinjaman kepada UPK, namun, bukan hanya sebagai pendata yang mencatat, tapi berfungsi juga sebagai *supervisor* bagi UPK, apabila Pokmas memberikan rekomendasi buruk maka UPK tidak akan mencairkan dana pinjaman kepada nama yang di rekomendasi buruk oleh Pokmas, selain sebagai pencatat dan *supervisor*, Pokmas juga berkewajiban untuk menagih pembayaran hutang kepada warga yang telah meminjam dana ke UPK. Peminjaman dana kepada UPK tidak bisa sesuka hati, warga dapat meminjam dana ke pada UPK maksimal Rp. 1.500.000,- .

Dalam memberikan bantuan kepada warga, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh warga, syarat untuk mendapatkan pinjaman melalui UPK tersebut antara lain adalah :

1. Peminjam merupakan warga Desa Kertosono.
2. Peminjam telah memiliki usaha, dan atau memiliki jenis pekerjaan yang dapat digunakan untuk membayar pinjaman

3. Peminjam bersedia membayar pinjamannya, baik melalui pembayaran langsung, maupun melalui angsuran selama 12 bulan
4. Peminjam mendaftarkan diri kepada Pokmas diwilayah masing – masing untuk selebihnya di data oleh Pokmas
5. Peminjam bersedia didata langsung oleh Pokmas
6. Jumlah pinjaman ditentukan oleh pengurus dengan setelah memperhiungkan biaya, tingkat resiko, tingkat keuntungan.
7. Peminjaman dilaksanakan secara kolektif
8. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, akan diberikan batas toleransi waktu sampa dengan 5 bulan, hal tersebut digunakan untuk menjamin pengembalian dana pinjaman kepada UPK
9. Bagi peminjam yang masih memiliki tunggakan angsuran, dan atau tunggakan modal pinjaman, maka tidak dapat diberikan pinjaman lebih lanjut hingga melunasi pinjaman tersebut

Hingga Juni 2010, tercatat UPK telah memberikan bantuan dana kepada 80% masyarakat Desa Kertosono, dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 232.760.000, serta keuntungan yang didapat dari jasa pinjaman sebesar Rp. 38.319.435 setelah dipotong untuk insentif pengurus, dana sosial, dana desa, serta dana pokmas. Dalam pemberian dana pinjaman, UPK maksimal dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000, hingga juni 2010 warga yang mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp 1.500.000 tersebut berjumlah 28 orang. Pinjaman rata – rata warga desa Kertosono adalah Rp. 250.000 – Rp.750.000. Jumlah peminjam setiap bulannya rata – rata berjumlah 20 – 30 peminjam. Jumlah peminjam akan turun pada saat para petani memasuki musim paceklik, serta pada saat musim penghujan, jumlah peminjam pada musim – musim tersebut berjumlah 10 – 15 peminjam. Hal itu dikarenakan, sebelum masa paceklik para petani tersebut meminjam kepada UPK untuk memenuhi kebutuhan selama masa paceklik. Sedangkan pada masa panen, jumlah peminjam dapat meningkat hingga 75 orang, hal itu dikarenakan, para petani berusaha untuk mendapatkan pinjaman sebelum mereka masuk masa paceklik. Hal tersebut terjadi karena, para

petani ingin pada masa paceklik mereka telah memiliki simpanan dana buat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain usaha simpan pinjam, UPK juga telah memberdayakan masyarakat melalui kegiatan usaha, yaitu berupa usaha penggemukan sapi. Namun, kegiatan usaha tersebut masih sangat terbatas peruntukannya, hal ini dikarenakan, tidak semua warga memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola usaha tersebut, ditambah lagi dengan modal yang cukup besar yang diperlukan untuk usaha tersebut, sehingga sampai saat ini, UPK hanya memiliki modal untuk mengerjakan usaha tersebut dengan 3 ekor sapi, yang berarti hanya memerlukan 2 orang pelaksana kegiatan.

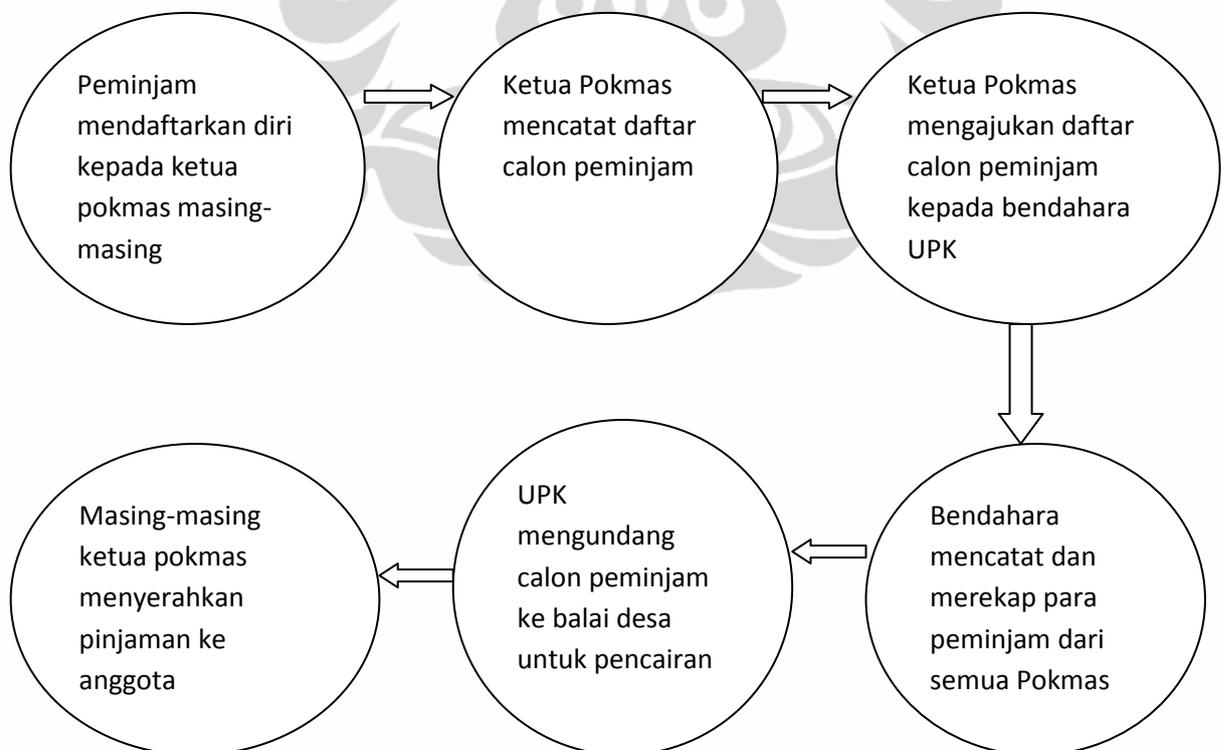
Selain usaha simpan pinjam dan penggemukan sapi, UPK juga telah mengajak para pedagang yang biasa keluar masuk desa Kertosono untuk berkumpul dan mendirikan sebuah pasar, pasar tersebut didirikan dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di Desa Kertosono. Para pedagang tersebut berkumpul di lokasi tersebut pada setiap hari rabu di setiap minggunya mulai dari pukul 06.00 – pukul 16.00 Wib. Para pedagang tersebut berkumpul di lokasi dengan membayar Rp. 15.000 kepada UPK sebagai biaya penyewaan lahan, dimana biaya Rp. 15.000 tersebut dibagi Rp. 5000 untuk UPK, Rp. 5000, untuk kas desa, Rp. 5000 untuk petugas kebersihan dan keamanan pasar kaget tersebut. Petugas kebersihan dan keamanan pasar kaget tersebut merupakan warga Desa Kertosono sendiri, sehingga keberadaan pasar tersebut dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh UPK dan pengurus desa, namun juga oleh masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dengan menjadi petugas kebersihan dan keamanan. Petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas di pasar tersebut berjumlah 8 orang, 6 orang petugas kebersihan dan 2 orang petugas keamanan. Pasar tersebut dirasakan manfaatnya oleh warga desa secara umum, warga desa dapat membeli kebutuhan pokoknya di pasar tersebut, mulai kebutuhan pokok seperti beras, dan kebutuhan dapur lainnya, selain itu kebutuhan non pokok seperti peralatan elektronik juga dijual di pasar tersebut. Pembeli di pasar

tersebut bukan hanya warga Desa Kertosono saja, melainkan warga dari desa – desa lain disekitar Desa Kertosono juga.

Selain kegiatan – kegiatan yang telah disebutkan, UPK juga telah melaksanakan kegiatan sosial, berupa pemberian sumbangan kepada desa setiap acara Tahlil Akbar 17 Agustus, Santunan kepada warga miskin, dan anak yatim piatu, dari hasil SHU UPK (penerima diseleksi oleh pengurus UPK). Adapun pengalokasian dana SHU UPK Kertosono untuk:

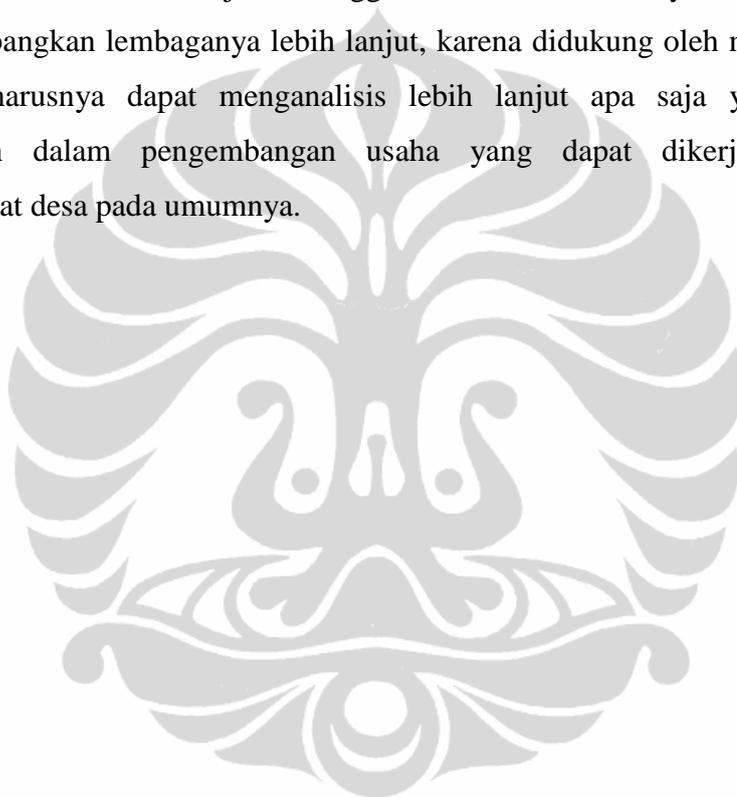
- Modal : 40%
- Insentif Pengurus UPK : 35%
- Dana Desa : 10%
- Dana Pokmas : 10%
- Dana Sosial : 5%

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam UPK memiliki alur kegiatannya sebagai berikut:



Gambar 4.3
Alur Peminjaman Dana ke UPK

Adapun permasalahan utama dalam simpan pinjam ini adalah, kemampuan masyarakat untuk mengembalikan pinjaman, namun dikarenakan adanya suatu ikatan hukum tidak tertulis di masyarakat Desa Kertosono, bahwasannya masyarakat yang terbelit hutang dan tidak membayar dikucilkan oleh warga lainnya, maka dari itu, masyarakat sangat berhati – hati untuk meminjam dana, dan masyarakat meminjam dana kepada UPK biasanya melihat dahulu keperluan dan kemampuannya, sehingga hal tersebut dapat membuat UPK terus berjalan hingga saat ini. Seharusnya, UPK dapat mengembangkan lembaganya lebih lanjut, karena didukung oleh masyarakat, UPK seharusnya dapat menganalisis lebih lanjut apa saja yang dapat dilakukan dalam pengembangan usaha yang dapat dikerjakan oleh masyarakat desa pada umumnya.



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kualitatif

Melalui analisa kualitatif diperoleh hasil dari *Partisipatory Rural Appraisal (PRA)* dan hasil wawancara yang mendalam dan diskusi kelompok dan dianalisa dengan analisis *SWOT*. Analisa kualitatif ini kemudian dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan dan juga data dari instansi terkait.

5.2.1 Dinamika Kehidupan

Perubahan – perubahan yang terjadi di Desa Kertosono membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat Desa Kertosono. Dalam dinamika kehidupan saat ini akan terlihat kecenderungan perubahan yang terjadi dimasyarakat. Kecenderungan ini akan dilihat dari sisi status kepemilikan tanah, pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana termasuk sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

Hubungan antar masyarakat di desa tersebut terjalin dengan cukup baik antara satu dan yang lainnya, bukan hanya hubungan antar penduduk di desa itu saja, hubungan antara penduduk desa dengan orang – orang dari kecamatan terjalin cukup baik. Petugas dari Kecamatan Sidayu rutin setiap 2 bulan datang ke desa tersebut untuk memantau keadaan desa, baik itu hanya sekedar datang untuk minum kopi, maupun datang untuk memberikan penyuluhan. Selain aparat kecamatan, setiap 2 bulan sekali petugas kesehatan keliling juga datang ke Desa Kertosono untuk mensuplai obat – obatan maupun untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat desa.

“ orang kecamatan tiap dua bulan sekali nyambangi desa, biasanya ngasih pengobatan gratis, tapi biasanya orang kecamatan datang juga sebulan sekali, buat ngeliat – liat desa, atau cumin sekedar cangkruk dan ngopi” (Darmaji, Wawancara 12 Juli 2010)

Dalam kehidupan bermasyarakat di desa tidak terlepas dari konflik. Konflik yang terjadi antar warga diselesaikan secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, baik itu ketua RT,RW, pemuka agama, maupun oleh Kepala Desa.

a. Status Kepemilikan Tanah

Desa Kertosono merupakan desa yang masuk didalam wilayah pemerintah Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Kepemilikan tanah di desa tersebut merupakan kepemilikan secara turun temurun dari orang tua mereka, masalah kepemilikan tanah kemudian dirapikan oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Pertanahan Kabupaten Gresik. Tanah – tanah warga sejak tahun 1992 telah di sertifikasi kepemilikannya sebagai lahan tempat tinggal. Sedangkan tanah – tanah yang digunakan untuk persawahan tidak ada satupun yang merupakan milik warga Desa Kertosono, sawah – sawah tersebut surat kepemilikannya di miliki oleh para tuan tanah yang tinggalnya diberbagai daerah, pada umumnya pemilik sawah tersebut adalah warga dari Kabupaten Gresik yang membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya. Tanah – tanah tersebut sejak jaman dahulu sebenarnya memang sawah yang telah digarap oleh petani dari Desa Kertosono, namun kepemilikannya tidak jelas apakah milik warga, atau milik orang – orang yang tinggal di Gresik tersebut. Pada tahun 1992, saat terjadi perapian kepemilikan tanah, terjadilah perubahan besar terhadap lahan sawah tersebut. Banyak lahan sawah yang akhirnya menjadi milik warga Gresik, bahkan ada beberapa lahan yang sudah berubah fungsi, lahan yang berubah fungsi tersebut dibangun dan dijadikan rumah sarang burung walet. (Suharno, Wawancara 14 Juli 2010)

b. Mata Pencaharian Penduduk Desa

Penduduk Desa Kertosono sebagian besar bekerja sebagai petani, khususnya sebagai petani penggarap, baik laki – laki maupun perempuan. Kewajiban mereka sebagai petani penggarap dimulai sejak masa cocok tanam sampai dengan masa panen, dan kemudian

menyetorkan hasil panennya kepada pemilik tanah. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 1997, dimana banyak kaum perempuan yang ikut turun ke ladang. Hal itu disebabkan meningkatnya harga berbagai kebutuhan.

Namun, upah yang didapatkan oleh para petani perempuan tersebut tidak sama besarnya dengan yang didapatkan oleh kaum pria. Kaum pria dalam sehari mendapatkan upah Rp. 25.000,-, sedangkan kaum wanita mendapatkan upah Rp.17.500,- . Alasan para tuan tanah memberikan perbedaan upah adalah, jam kerja petani perempuan lebih pendek dibandingkan dengan jam kerja petani pria. Selain dari upah harian tersebut, para petani juga mendapatkan upah dari hasil penjualan hasil panen. Mereka mendapatkan 10% dari hasil penjualan padi, setelah dipotong dari pembelian bibit dan pembelian pupuk, ditambah dengan jatah beras sebanyak 3 kilogram untuk petani pria dan 2 kilogram untuk petani wanita.

Pengelolaan sawah tersebut mulai dari musim cocok tanam sampai musim panen memakan waktu selama lima sampai enam bulan. Setelah para petani tersebut memasuki masa panen, petani membawa hasil panen tersebut ketempat penggilingan padi. Penggilingan padi tersebut tidak milik tuan tanah, namun milik warga atau juragan dari desa lain. Pada saat masa panen, anak buah juragan penggilingan tersebut datang ke Desa Kertosono, mereka berada di beberapa lahan kosong yang tidak berfungsi dan tidak ada pemiliknya, namun berdekatan dengan lahan – lahan persawahan tersebut, disitulah para petani berkumpul membawa hasil panennya untuk digilingkan. Pada saat penggilingan inilah para tuan tanah atau anak buah dari tuan tanah datang ke Desa Kertosono untuk membayar biaya penggiling dan menghitung berapa jumlah hasil panen yang diperoleh dari sawah miliknya, serta membayar upah para petani penggarap sawahnya.

” Saat juragan datang, bagi petani merupakan saat seperti dewa datang, pada saat tersebut merupakan saat yang paling

berbahagia buat para petani, soalnya mereka dapet duit sama dapat beras” (Darso, wawancara 14 Juli 2010)

Selanjutnya mobil – mobil pengangkut padi yang telah digiling tersebut mengangkut semua hasil cocok tanam tersebut untuk dibawa ke berbagai tempat tujuan. Untuk yang hanya memiliki sawah dalam jumlah kecil membawa hasil sawahnya kepada koperasi desa yang berada di Kecamatan Sidayu. Hal itu dikarenakan koperasi desa di Desa Kertosono tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, pemilik sawah yang lebih besar membawa hasil panennya kepada pengepul padi yang berada di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Cerme. Berbeda dengan para pemilik lahan dengan kapasitas yang besar, biasanya mereka telah memiliki perjanjian dengan perusahaan penggilingan beras, sehingga hasil panen dari lahan mereka langsung dibawa ke perusahaan penggilingan beras, baik yang berada di Gresik, Surabaya, bahkan sampai ke Kediri. Para pemilik mesin penggilingan ini bukan warga Desa Kertosono, melainkan warga desa lain dari kecamatan lain, mereka biasanya berkeliling ke desa – desa yang sedang masa panen.

Para petani mulai dari musim tanam sampai musim panen kebutuhan hidupnya terjamin, hal tersebut dikarenakan mereka mendapatkan pemasukan yang tetap selama masa – masa tersebut. Namun, setelah masa panen, dimana sawah tersebut menurut istilah mereka disebut masa “*Seret*”, dimana tidak terjadi aktivitas apapun di persawahan, hal itu terjadi selama dua bulan, selama terjadi masa tersebut, para petani banyak yang berubah profesi menjadi buruh kasar.

Biasanya mereka menjadi buruh bangunan di daerah Kecamatan Manyar yang memang dalam Lima tahun belakangan berubah menjadi kawasan Industri. Sedangkan para petani perempuan, kebanyakan mereka datang ke Kecamatan Sidayu atau Kecamatan lain untuk menjadi buruh cuci di rumah tangga (pembantu rumah tangga). Namun, apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, mereka hanya

bisa bertahan dengan uang tabungan seadanya dari hasil selama bertani tersebut.

“Kalau lagi masa seret, kita para petani berusaha mencari pekerjaan serabutan, entah itu ke kota Gresik, atau ke Manyar, didaerah Manyar lagi banyak pembangunan, jadi pada lari kesana semua, jadi buruh harian, lumayan kalau sehari bisa dapet Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- bisa buat tambahan beli makanan, dari pada cuman makan nasi sama kecap saja, kalau ada tahu atau tempunya kan jadi makin nikmat makannya”
(Darso, wawancara 14 Juli 2010)

Perubahan kemudian terjadi sejak awal tahun 2000an, dimana di beberapa desa lain mulai bermunculan usaha potong ternak, khususnya ternak sapi, banyak warga yang kemudian beralih ke lapangan pekerjaan tersebut, hal itu dikarenakan mereka merasa dapat pemasukan yang lebih dari pekerjaan sebagai peternak maupun sebagai tukang potong hewan ternak dibandingkan sebagai petani penggarap.

“Kalau kerja petani cuman dapat sedikit, paling kalau lagi bagus sebulan paling banyak dapat Rp. 750.000,- ditambah beras 3 kilo, kalau pas selesai panen, 2 bulan nganggur ga dapat apa-apa kalau tidak ada panggilan proyek, beda kalau dipeternakan lebih enak, sebulan bersih pasti dapat Rp. 850.000,- , ditambah lagi biasanya dapat bonus dari juragan kalau pas waktunya jualan daging potong lagi ramai, seperti puasa, lebaran, atau ada haul kanjeng sunan, lumayan biasanya dapat Rp. 100.000,- , belum lagi dapat jatah makan siang, jadi tidak perlu membawa bekal dari rumah, lumayan buat menghemat beras” (Soertaman, wawancara 14 Juli 2010)

Dengan adanya lapangan pekerjaan baru, walaupun jaraknya cukup jauh dari desa, para warga yang bekerja dibidang ini merasa

dapat hidup lebih teratur dan hidup lebih tenang dari pada mereka menjadi petani. Warga yang mendapatkan kesempatan menjadi peternak dan tukang potong hewan ternak tersebut pada awalnya merupakan petani, kemudian saat di beberapa desa terdapat pembukaan lapangan usaha peternakan dan pemotongan tersebut, mereka diberitahu oleh teman atau saudaranya yang tinggal di lokasi dekat usaha tersebut. Setelah diberitahu, beberapa dari mereka mencoba untuk melamar pekerjaan ditempat usaha tersebut, setelah diterima mereka diberikan pelatihan tentang merawat ternak dan menggemukan ternak, serta diajarkan bagaimana menggunakan alat pemotong hewan, pencucian daging hewan, sampai dengan pengepakan daging yang telah dipotong – potong tersebut.

Warga di Desa Kertosono tidak memungkinkan untuk membuka usaha ternak dan potong hewan ternak itu sendiri, hal itu dikarenakan modal untuk membuka usaha tersebut sangatlah besar, untuk membuka usaha tersebut minimal satu tempat usaha memiliki 10 ekor sapi dan memiliki mitra usaha yaitu peternak sapi lainnya yang siap memasok kebutuhan sapi mereka. Melihat peluang kesuksesan usaha ternak dan potong hewan ternak sapi tersebut, pihak UPK Desa Kertosono sejak tahun 2004 membuka usaha penggemukan sapi, pada awalnya mereka membeli dua ekor anak sapi, yang satu jantan, yang satu betina untuk dibesarkan dan digemukan, anak sapi yang jantan diolah untuk digemukan, sedangkan yang betina untuk dikawinkan dan diharapkan dapat melahirkan anak sapi baru. Usaha penggemukan sapi tersebut pada awalnya hanya diurus oleh satu orang saja, pengurus usaha tersebut merupakan salah seorang buruh serabutan yang pernah bekerja dirumah potong hewan ternak sapi. Saat ini usaha penggemukan sapi UPK telah membuahkan empat ekor sapi, tiga ekor jantan, dan satu ekor betina, dan usaha tersebut dipegang oleh dua orang.

Pada tahun 2006, masuklah usaha konveksi sulam jilbab ke Desa Kertosono, usaha sulam jilbab tersebut masuk ke desa pada

awalnya atas ajakan Bapak Kepala Desa Kertosono kepada Ibu Sudarhani saat mereka bertemu dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pada tahun 2006 tersebut akhirnya Ibu Sudarhani membuka usaha sulam jilbab tersebut di Desa Kertosono, yang mana pengelolaannya diserahkan kepada kakak dari Ibu Sudarhani, yaitu Bapak Rohadi. Pada awalnya Istri Bapak Rohadi mengajak 3 orang tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan untuk membantu bekerja di rumahnya, pada awal usaha tersebut mereka masih didampingi oleh dua orang anak buah dari Ibu Sudarhani, kedua anak buah tersebut membantu mengajarkan cara menyulam jilbab kepada ke empat orang pegawai baru tersebut, serta mengajarkan management pengelolaan tempat usaha tersebut kepada Bapak Rohadi.

Setelah ibu – ibu yang bekerja di tempat usaha tersebut telah dapat menyulam jilbab dengan benar, serta Bapak Rohadi telah dapat menjalankan management usaha dengan baik, kedua orang tersebut kembali balik ke Gresik, dan membiarkan usaha tersebut berjalan dengan sendirinya. Pada tahun 2007, usaha tersebut semakin maju, dan jumlah jilbab yang harus disulam bertambah, sehingga tempat usaha tersebut menambah jumlah pekerjanya. Hingga saat ini (Juni 2010) jumlah pekerja di tempat usaha payet tersebut telah berjumlah 25 orang, jam bekerja mereka dimulai pukul delapan pagi sampai pukul tiga sore, dipotong dengan jam istirahat dari jam dua belas sampai jam satu siang, dalam sebulan mereka bekerja selama 20 hari. Namun, tidak semua pekerja disana bekerja selama 20 hari penuh, biasanya mereka bekerja 16 sampai 20 hari.

Untuk pendapatan mereka yang bekerja dibidang ini dihitung jumlah yang dapat mereka produksi selama satu hari kerja, rata – rata pekerja dapat menghasilkan 30 – 50 sulaman jilbab dalam sehari, mereka dibayar Rp. 1000,- untuk setiap 10 jilbab yang mereka sulam, sehingga jumlah jilbab yang dihasilkan dalam satu bulan rata – rata

berkisar 17.000 jilbab setiap bulannya, dan penghasilan para pekerja ditempat usaha tersebut berkisar Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 , namun, pada kenyataannya hanya sedikit yang bisa menikmati upah maksimum tersebut, rata – rata mereka mendapatkan upah Rp. 750.000,-.

“Hasil yang kami dapatkan dari nyulam lumayan, bisa dibuat nabung kalau suami lagi musim seret dan ga dapat kerjaan di kota, buat nambah makan, beli sabun, sama buat tabungan, dari pada harus hutang sama renternir” (Suliasih, Wawancara 14 Juli 2010)

Rata – rata para pegawai usaha sulam jilbab tersebut suami mereka bekerja sebagai petani. Sebelum mereka bekerja pada usaha tersebut, saat memasuki musim seret, dan suami mereka tidak mendapatkan pekerjaan dikota mereka hanya bertahan hidup dengan seadanya dan menghutang, pemasukan dari hasil sulam jilbab tersebut sangat berarti bagi para pegawai tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat memasuki masa seret tersebut.

Penduduk Desa Kertosono yang tidak memiliki pekerjaan tetap, adalah para penduduk yang bekerja sebagai buruh serabutan, mereka menggantungkan hidupnya dari proyek – proyek pembangunan pabrik di Kecamatan Manyar, dan Kabupaten Gresik. Mereka hanya menggantungkan hidup dari proyek – proyek yang ada. Apabila tidak ada proyek sama sekali, mereka tidak mendapatkan pemasukan apa pun. Biasanya, pada akhir minggu ada mandor dari kota yang datang ke desa untuk mencari tenaga kasar, kemudian para mandor tersebut memberitahukan bahwasannya senin mereka yang bekerja dibidang ini didata oleh mandor dan diberikan nomer pekerja, kemudian pada hari seninnya para buruh bangunan tersebut berkumpul di alun – alun Kecamatan Sidayu untuk menunggu jemputan ke lokasi pekerjaan. Untuk satu hari pekerjaan mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- ditambah dengan makan siang dari proyek

tersebut, namun pekerjaan mereka tidak rutin, sering kali dalam satu minggu mereka tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

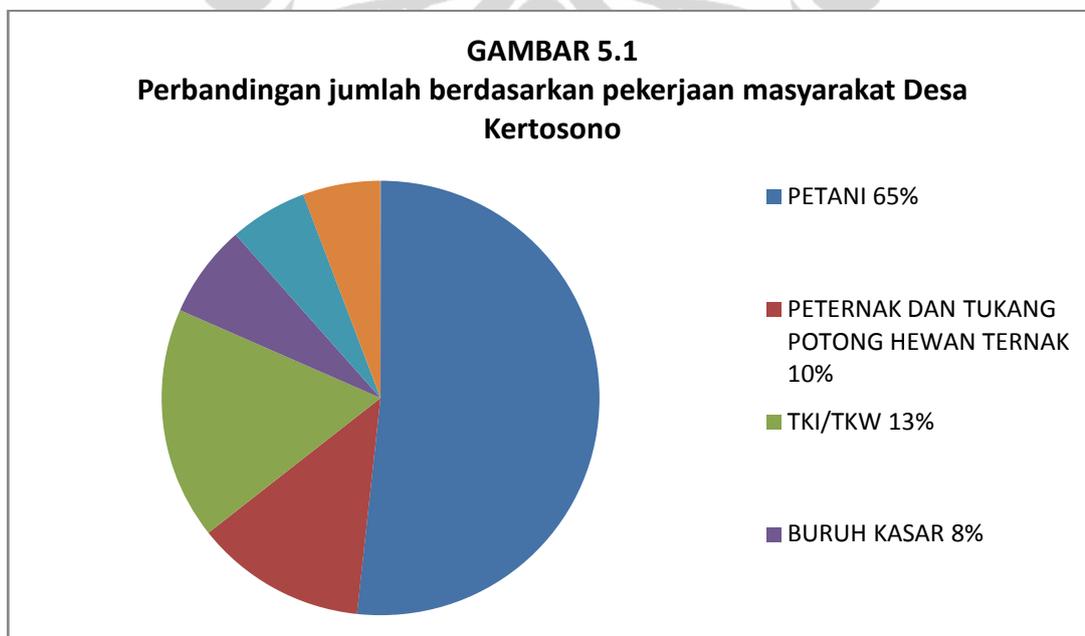
Para buruh kasar tersebut pada awalnya adalah petani penggarap yang sudah bosan dengan pekerjaan pertanian, sehingga mereka keluar dari pekerjaan tersebut, namun saat mereka keluar, mereka belum mempersiapkan pekerjaan lain, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan apapun, saat mereka menginginkan untuk kembali ke pekerjaan sebagai petani, tuan tanah sudah tidak menerima mereka kembali. Hal itu dikarenakan sudah ada pengganti mereka yang menggarap sawah tuan tanah tersebut. Namun, satu hal yang unik adalah, kebanyakan istri para buruh tersebut bekerja sebagai petani penggarap, sehingga saat para suami mereka tidak mendapat pekerjaan proyek, masih ada pemasukan bagi rumah tangganya, selain sebagai petani penggarap, ada juga beberapa istri buruh tersebut yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Gresik, bahkan ada yang samapai menjadi pembantu rumah tangga di Surabaya.

Para pemuda di Desa Kertosono, kebanyakan memilih untuk keluar dari desanya untuk bekerja sebagai buruh pabrik di berbagai daerah, kebanyakan dari mereka bekerja di Gresik, Gresik yang dikenal sebagai kawasan industri memiliki daya tarik bagi pemuda – pemuda tersebut untuk bekerja di pabrik – pabrik besar, kebanyakan para pemuda tersebut bekerja sebagai buruh di pabrik PT. Petrokimia Gresik, pabrik Mi Sedap, Pabrik Nippon Paint, Pabrik Semen Gresik dan lain sebagainya yang tersebar di Kabupaten Gresik. Beberapa pemuda lainnya, memilih untuk mengadu nasib dengan bekerja sebagai TKI maupun TKW dinegara lain, kebanyakan dari mereka dikirim ke Hongkong atau ke Taiwan, para pemuda yang menjadi TKI sangat membantu kehidupan keluarga mereka, dengan mengirimkan uang bulanan kepada orang tua mereka.

“Anak saya bekerja jadi TKW di Taiwan sudah dua tahun ini, Alhamdulillah sampai saat ini kiriman dari anak

sangat membantu kehidupan kami didesa, uang kiriman dari anak biasanya kami gunakan buat keperluan sehari – hari, bayar sekolah adik – adiknya, sisanya disimpan, buat nanti kalau anaknya pulang dari Taiwan biar bisa syukuran” (Hartati, Wawancara 14 Juli 2010)

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan pembagian penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan yang paling dominan adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar 65% penduduk desa adalah petani, kemudian pekerjaan sebagai TKI/TKW yang diminati oleh kaum muda sebesar 13%. Selanjutnya, jenis pekerjaan sebagai peternak dan tukang potong hewan ternak sebesar 10%, pekerjaan sebagai buruh kasar sebanyak 8%. Selanjutnya, pekerja konveksi sulam jilbab sebanyak 2%, serta pekerjaan sebagai guru SD, pengajar baca tulis Al – quran baik di Desa Kertosono, maupun desa lainnya sebanyak 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :



Sumber : Penelitian terhadap Masyarakat Desa Kertosono (juni 2010)

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat, bahwasannya petani merupakan pekerjaan utama masyarakat Desa Kertosono, petani memegang 65%, diikuti dengan banyaknya jumlah pemuda dan pemudi desa yang menjadi TKI atau TKW sebanyak 13%, selanjutnya peternak dan tukang jagal yang bekerja diluar desa sebanyak 10%, kemudian yang bekerja sebagai buruh kasar terdapat sebanyak 8%, pekerja konveksi ppayet sebanyak 2%, sisanya, merupakan pekerja seperti guru di SDN desa lainnya, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, serta pegawai lembaga sosial masyarakat baik swasta maupun yang dibentuk oleh pemerintah.

c. Sarana dan Prasarana

Letak Desa Kertosono yang jauh dari pusat perkotaan menyebabkan wilayah desa tersebut jauh dari pembangunan. Dengan kondisi jalan masuk kedesa yang penuh dengan lubang serta sudah rusak parah, tidak adanya pembangunan ulang jalan masuk kedesa menyebabkan kondisi jalanan semakin parah, jalanan yang berlubang tersebut hanya ditutupi oleh warga dengan batu dan pasir. Kendaraan pengangkut konveksi jilbab yang rutin melintasi jalan tersebut menambah rusaknya jalan masuk kedalam desa tersebut, jalanan tersebut akan semakin terasa kerusakannya saat musim penghujan datang, batu dan pasir akan terangkat dari lubang jalanan dan menyebabkan lubang semakin lebar, apa lagi saat dilewati oleh kendaraan pengangkut konveksi tersebut.

Tidak adanya sumbangan dari perusahaan konveksi tersebut membuat jalanan didesa Kertosono tidak terurus sama sekali. Warga sempat melayangkan protes kepada pemilik konveksi, namun, saat itu pemilik konveksi membela diri dengan alasan bahwasannya pembukaan usaha tersebut diprakarsai oleh Kepala Desa, dan para pegawai yang sudah merasakan manfaat dari bekerja di perusahaan tersebut membela pemilik perusahaan, sehingga sampai saat ini perusahaan konveksi tidak

memberikan jaminan ganti rugi atas kondisi jalanan yang semakin rusak. (FGD Masyarakat secara umum, 15 juli 2010)

Listrik yang ada di Desa Kertosono merupakan pasokan listrik dari PLTU Kabupaten Gresik, sehingga fasilitas listrik di desa Kertosono seharusnya sudah memadai. Namun, pada kenyataannya, listrik yang ada di desa belum memadai untuk memberikan penerangan kepada masyarakat desa, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan, pada pukul 18.00 – pukul 23.30 listrik di desa tersebut padam, karena tidak adanya pasokan listrik yang masuk ke desa tersebut pada jam itu. Hal itu menyebabkan kondisi desa menjadi gelap gulita pada malam hari, untuk menerangi rumah, warga kebanyakan menggunakan lampu bersumber minyak tanah (lampu ublik) untuk mendapatkan penerangan rumah.

Disekitar balai desa terdapat beberapa buah lampu jalanan, yang merupakan penunjuk masuk kedalam desa, lampu tersebut dihidupkan menggunakan genset yang terletak dibalai desa, dan biasanya dihidupkan hanya pada pukul 18.00 – pukul 21.30 Wib, akibatnya setelah pukul 21.30 Wib jalanan desa tersebut menjadi gelap gulita sampai pada pukul 23.30 Wib, hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi warga. Kebanyakan warga malah merasa aneh apabila pada jam tersebut listrik tidak padam, dan sebagian warga, terutama yang bekerja diindustri konveksi payet menjadi khawatir, dikarenakan kemungkinan listrik mati pada siang hari, hal tersebut menyebabkan kapasitas produksi mereka berkurang, konveksi payet tersebut hanya beroperasi mulai pukul 08.00 – pukul 15.00 Wib. Selain itu, apabila listrik tidak padam pada pukul tersebut, keesokan harinya dapat dipastikan terjadi pemadaman dua kali, dengan kata lain terjadi pemadaman hampir sehari penuh. Aparat desa telah mencoba menghubungi pihak PLN, namun sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan PLN terhadap kondisi tersebut.

“Biasanya kalau sudah jam 18.00 Wib kita sudah tidak melakukan aktivitas apa – apa lagi, yang bapak – bapak biasanya ngumpul jagongan di rumah pak RT sambil ngopi, yang Ibu – ibu biasanya dirumah ngawasi anaknya belajar pake lampu ublik, jadi kalau udah malem ya ga ada lagi yang bisa dilakukan, siang udah capek kerja, malem ya istirahat aja di rumah, paling jagongan ama kawan – kawan” (FGD Masyarakat umum, 15 Juli 2010)

Fasilitas air bersih di Desa Kertosono sudah tidak bermasalah, karena air yang mengalir di desa sudah terbantu dengan masuknya pasokan air dari PDAM. Selain itu, sumur – sumur warga juga mengeluarkan air, warga hanya menggunakan pompa penyedot untuk mengalirkan air ke fasilitas penampungan air dirumah masing – masing.

Fasilitas kesehatan yang ada pada Desa Kertosono hanyalah sebuah Puskesmas yang terletak dibalai desa, puskesmas tersebut dikelola oleh seorang bidan dengan fasilitas obat – obatan yang sangat terbatas sekali. Puskesmas di Desa Kertosono buka mulai pagi hari pukul 08.00 Wib – pukul 15.00 Wib. Biasanya apabila ada warga yang sakit setelah jam buka puskesmas, warga akan langsung datang ke tempat tinggal bidan untuk meminta diperiksa. Namun, warga Desa Kertosono lebih memilih mengandalkan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita, alasan mereka lebih percaya kepada obat tradisional lebih dikarenakan biaya pembelian obat tersebut yang dirasa memberatkan, sehingga sampai saat ini banyak warga yang lebih percaya dengan menggunakan obat tradisional dari pada harus ke bidan.

“ Kalau sakitnya diatas jam buka puskesmas ya langsung datang ke rumah bu bidan, berobatnya di rumah beliau saja, tapi masih lebih enakan pakai obat tradisional, lebih ampuh, soalnya kalau pakai obat dari bidan bukannya sembuh, tapi

malah sakit, sakit mikirin beli obatnya mahal” (FGD Masyarakat umum, 15 Juli 2010)

Kondisi rumah warga sebenarnya sudah memiliki kondisi yang cukup bagus, dimana rumah – rumah warga mayoritas telah menggunakan tembok semen, dan lantai yang disemen pula, atap rumah telah terbuat dari triplek yang ditutupi dengan daun dari pohon kelapa yang sudah kering. Sebagian lagi rumah warga dalam kondisi yang memperhatikan, rumah yang berasal dari bambu (gedhek) dengan atap dari kayu yang ditutupi dengan daun kering dari pohon kelapa juga masih ada di Desa Kertosono, namun rumah seperti itu saat ini hanya sebagian kecil saja, jumlahnya juga dapat dihitung.

Rumah warga letaknya berdempetan satu sama lainnya, dengan jalan penghubung yang masih sama dengan kondisi jalan utama, beberapa jalan penghubung hanya menggunakan jalan tanah dan pasir saja. Rumah – rumah warga mayoritas telah dilengkapi dengan sarana MCK, namun beberapa rumah yang terbuat dari bambu masih menggunakan fasilitas mushola terdekat sebagai MCK mereka, hal itu dikarenakan ketidak mampuan mereka untuk membuat sarana MCK dirumahnya, bukan karena luas rumahnya yang kurang memadai. Kondisi seperti itu hanya terjadi di beberapa rumah saja, biasanya mereka yang dari kelompok buruh, dan tidak memiliki anak yang bekerja diluar desa, maupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, sehingga pemasukan bagi rumah tangganya sangat terbatas sekali.

Fasilitas pembuangan sampah di Desa Kertosono belum terkoordinir dengan rapi, masyarakat meletakkan sampah di tanah kosong yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Apabila sampah – sampah tersebut telah menumpuk maka sampah – sampah tersebut langsung dibakar, biasanya pembakaran sampah dilaksanakan sore hari bersamaan dengan pembuangan sampah dari Pasar Krempeyang yang buka setiap hari Rabu. Pasar merupakan salah satu usaha UPK dengan para pedagang keliling yang berputar menjajakan barang dagangannya

dari satu desa ke desa lainnya, para pedagang tersebut merupakan pedagang dari berbagai daerah, namun para pedagang tersebut tidak ada satupun yang berasal dari penduduk Desa Kertosono. Para pedagang tersebut dikumpulkan pengurus UPK dan diajak membuat pasar dadakan, barang – barang yang dijual di pasar tersebut merupakan barang kebutuhan sehari – hari dan barang – barang konsumtif lain juga dijual dipasar tersebut oleh para pedagang. Dalam kurun waktu 2 tahun belakangan, pengunjung pasar bukan hanya warga Desa Kertosono saja, tapi juga warga dari desa sekitarnya. Para pedagang tersebut berkumpul di lokasi dengan membayar Rp. 15.000 setiap bulannya kepada UPK sebagai biaya penyewaan lahan, dimana biaya Rp. 15.000 tersebut dibagi Rp. 5000 untuk UPK, Rp. 5000, untuk kas desa, Rp. 5000 untuk petugas kebersihan dan keamanan pasar kaget tersebut. Petugas kebersihan dan keamanan pasar kaget tersebut merupakan warga Desa Kertosono sendiri, sehingga keberadaan pasar tersebut dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh UPK dan pengurus desa, namun juga oleh masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dengan menjadi petugas kebersihan dan keamanan. Petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas di pasar tersebut berjumlah 8 orang, 6 orang petugas kebersihan dan 2 orang petugas keamanan.

d. Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Kertosono tergolong sangat kurang, hanya terdapat satu buah SD, dan dua buah taman pendidikan Al – quran, dimana kondisi SD tersebut merupakan bangunan tua yang berdiri sejak tahun 1992, dan belum pernah di renofasi hingga saat ini. SD tersebut memiliki 6 buah kelas dan hanya memiliki lima orang pengajar, hal itu menjadikan jam pengajaran di SD tersebut sangat terbatas. Untuk kelas empat, lima dan enam masuk mulai pukul tujuh pagi hingga pukul setengah dua belas siang, sedangkan untuk kelas satu, dua, dan tiga masuk mulai pukul satu siang sampai pukul setengah lima sore, dengan jam yang hanya singkat tersebut, terkadang mata pelajaran yang diberikan tidak sampai tuntas, terhambatnya aliran listrik

menjadi suatu alasan untuk anak – anak tidak dapat belajar sendiri di rumah pada malam hari.

Sedangkan untuk TPA yang ada di desa pun jam belajarnya bergantian, untuk anak usia kelas satu, dua, dan tiga dimulai pada pagi hari jam delapan pagi sampai jam sepuluh pagi, selanjutna mereka pulang dan bersiap – siap untuk pergi ke sekolah, sedangkan anak usia kelas empat, lima, enam mereka masuk TPA pada pukul tiga sore sampai pukul lima sore. Selain itu pada TPA Al – Anshori, mereka juga mengajarkan mengaji kepada kaum ibu, namun tidak diadakan setiap hari, melainkan hanya diadakan pada hari Selasa dan Jum'at saja, tepatnya dimulai pada pukul sepuluh pagi sampai pukul dua belas siang. Di Desa Kertosono tidak terdapat fasilitas pendidikan yang lebih tinggi, hal itu menyebabkan para warga yang telah menempuh pendidikan SD biasanya akan keluar dari Desa untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau memilih untuk masuk ke pondok pesantren.

Saat ini pendidikan menjadi perhatian para orang tua, walaupun keadaan mereka terbatas mereka berusaha menyekolahkan anak – anak mereka, minimal sampai dapat lulus SLTA atau SMK. Hal itu dikarenakan mereka merasa pentingnya pendidikan bagi anak – anak mereka, mereka sangat berharap anak – anak mereka dapat berubah nasibnya menjadi lebih baik lagi kedepannya, tidak mengikuti nasib mereka yang hidup apa adanya. Biaya untuk pendidikan mereka carikan dengan berbagai cara, hal itu terlihat dari banyaknya kaum ibu yang juga bekerja di Desa tersebut, selain untuk tambahan bagi rumah tangga, juga digunakan untuk membiayai sekolah anak – anaknya.

“Sudah cukup saya saja sebagai orang tua yang bodoh sehingga hidup kami pas – pas an, saya ga pingin anak saya seperti saya, saya pingin anak saya bisa kerja dikota dapat pekerjaan yang bagus, biar hidupnya bisa enak” (Suhartini, Wawancara 14 Juli 2010)

e. Sarana Peribadatan

Penduduk Desa Kertosono mayoritas beragama Islam, hampir 98% warga desa memeluk agama Islam, hal itu dikarenakan daerah Kecamatan Sidayu pada jaman dahulu merupakan salah satu basis penyebaran agama Islam di pulau Jawa, sehingga masyarakat Desa Kertosono 98% memeluk agama Islam. Di Desa Kertosono terdapat 1 buah Masjid dan 2 buah mushola, mushola – mushola tersebut bukan hanya digunakan sebagai sarana beribadah seperti sholat saja, namun, juga telah menjadi sarana pendidikan, dimana mushola tersebut juga dijadikan sebagai tempat mengajar baca Al – quran, dimana masing – masing mushola memiliki satu buah TPA.

Selain ibadah sehari – hari, kegiatan pengajian rutin juga diadakan di masjid desa setiap malam jumat, pada setiap malam jum'at tersebut listrik masjid dialirkan melalui genset yang terdapat di balai desa, hal itu dikarenakan hamper semua warga berkumpul di masjid tersebut untuk yasinan. Bagi 2% penduduk yang Bergama selain muslim, mereka akan melakukan kegiatan beribada keluar dari daerah Desa Kertosono, mereka lebih memilih ke Kecamatan Cerme atau ke Kecamatan Sidayu, dimana disana terdapat satu buah gereja.

f. Sosial dan Politik

Hal – hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara pandang dan sifat masyarakat. Masalah apa yang terjadi di wilayah ini berkaitan dengan sifat dasar masyarakat Desa Kertosono. Sifat – sifat itu antara lain (FGD Masyarakat umum 15 Juli 2010, wawancara dengan ketua UPK, perwakilan masyarakat, dan pemuka agama) :

a. Malas dan Rendahnya keinginan untuk berubah

Masyarakat Desa Kertosono, mayoritas cenderung untuk enggan keluar dari wilayah desanya. Mereka tidak berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di luar desa, hanya beberapa orang saja yang keluar desa, namun, mereka keluar hanya untuk

bekerja, apabila diharuskan pindah tempat tinggal mereka tidak mau.

Kepuasan akan bidang pekerjaan yang mereka lakukan saat ini menjadi salah satu faktor kemalasan mereka, mereka sudah merasa cukup, sehingga tidak ingin lagi menambahnya.

b. Tertutup dan sulit menerima hal –hal baru dari luar

Masyarakat cenderung tertutup terhadap hal-hal baru dari luar. Mereka enggan untuk menerima pembaharuan, hal itulah yang menyebabkan program yang dikelola oleh pemerintah selalu berjalan tidak lancar, dikarenakan program pemerintah tersebut dikelola bukan oleh masyarakat desa sendiri, berbeda dengan UPK yang pengelolaannya langsung dipercayakan kepada masyarakat desa, sehingga sampai saat ini kegiatan UPK masih terus berlangsung di Desa tersebut. Pada dasarnya mereka enggan untuk belajar, mempelajari hal-hal baru yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sifat malas dan tertutup membuat mereka tidak maju dan berkembang.

c. Ketidak mampuan mengelola uang dengan baik

Masyarakat Desa Kertosono cenderung konsumtif, apabila mereka memiliki kelebihan uang, mereka cenderung untuk membeli sesuatu yang kurang berguna bagi dirinya sendiri. Bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana tunai sering datang kepada masyarakat desa, namun bantuan tersebut tidak digunakan untuk membeli barang – barang kebutuhan pokok mereka, bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak berguna bagi mereka.

Masuknya UPK yang dikelola langsung oleh masyarakat, mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menabung, dan menyisihkan uangnya, hal itu dikarenakan, apa bila mereka membeli barang yang tidak sesuai dan tidak memberikan manfaat, apa lagi dari hasil hutang, mereka akan merasa dikucilkan oleh warga lainnya.

d. Cara pandang dalam melihat kemiskinan

Sebagian besar masyarakat cenderung pasrah menerima keadaan mereka. Kemiskinan yang mereka alami adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Hal ini akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan karena tidak adanya keinginan mereka untuk berubah.

Sedangkan masalah politik dapat dilihat dari perpindahan penduduk yang ada, serta dapat dilihat dari kesempatan yang didapatkan oleh penduduk desa untuk memperoleh kedudukan dalam politik, baik itu melalui partai politik, maupun kesempatan dalam kelembagaan politik. Penduduk Desa Kertosono lebih kepada pendengar serta pengamat politik, pada saat pemilihan umum, baik itu pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum nasional, sampai pemilihan kepala desa masyarakat desa hanya sebagai pemilih saja, tidak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri. Hal itu dikarenakan, terbatasnya kemampuan finansial penduduk desa, serta terbentur dari berbagai macam urusan birokrasi.

Hingga saat ini, masyarakat yang berkeinginan untuk keluar dari desa sebagian besar memiliki alasan untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat lanjut yang memang tidak tersedia di Desa Kertosono. Selain itu, sebagian masyarakat bekerja di luar daerah desa, namun yang melakukan relative kecil dibandingkan yang masih melakukan tradisi sebagai petani. Sebagian dari mereka yang bekerja keluar dari Desa Kertosono memang masih akan balik ke desa tersebut, namun, banyak juga dari mereka yang memutuskan untuk tidak kembali ke desa, dan hanya kembali pada saat moment – moment tertentu. Para perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar desa, biasanya mereka akan keluar dan menetap bersama suami. Selain itu sebagian dari perempuan dengan usia antara 19 – 35 tahun memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Mereka beralasan dengan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri mereka dapat membantu kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik.

Pendatang yang tinggal dan menetap di Desa Kertosono biasanya tinggal karena adanya pernikahan. Selain itu juga ada yang datang ke wilayah ini karena ditugaskan di Desa Kertosono. Secara umum masyarakat Desa Kertosono, dapat menerima dengan baik pendatang yang datang. Tidak ada rasa curiga dan takut. Mereka cenderung bersikap ramah kepada pendatang yang baru mereka kenal.

g. Dampak Modernisasi

Meskipun letaknya yang jauh dari perkotaan dan sarana prasarana umum tidak memadai, dan arus informasi seperti surat kabar terbatas, tetapi wilayah Desa Kertosono tidak terlepas dari arus modernisasi. Mereka memperoleh informasi mengenai modernisasi dari tontonan televisi yang mereka lihat, selain itu juga dari kerabat mereka yang berada di luar Pulo Panjang. Meskipun hanya pada sore menjelang malam hari mereka menyempatkan untuk menonton televisi.

“Ya meskipun jauh dari kota, tapi warga sudah banyak yang punya hp.. ya informasi dan berita bisa di kasih tau dari hp. Tv, warga juga udah banyak yang punya, ya.. meskipun listriknya terbatas...” (Sumarno, wawancara 14 juli 2010)

“Masak kita ga punya hp. Nanti bisa dibilang ketinggalan jaman. kan biar bisa smsan dan telepon sama saudara dan temen – temen. Televisi juga punya, ya butuh hiburan,abis pulang kerja kan lumayan masih bisa nonton dikit sebelum byar modar listrike” (Warsidi, Wawancara 14 Juli 2010)

Namun disayangkan tontonan yang dilihat masyarakat adalah tontonan yang memperlihatkan kemewahan. Akibatnya mereka tergiur dan menginginkan barang-barang yang digunakan tayangan tersebut. Salah satu akibatnya adalah perubahan preferensi penggunaan uang

mereka. meskipun mereka mengaku miskin, rata-rata masyarakat Desa Kertosono sudah memiliki telepon genggam, televisi, dan alat elektronik lainnya yang bukan kebutuhan utama. Mereka menyempatkan diri pergi ke kota maupun membeli dari pedagang di pasar krempyeng (istilah pasar kaget di Desa Kertosono) untuk barang-barang yang mereka inginkan, namun pada saat kondisi paceklik tidak menutup kemungkinan barang – barang tersebut mereka jual kembali.

5.2.2 Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan pada kehidupan masyarakat

Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-taskin) yang merupakan program pengentasan kemiskinan Pemprov Jatim dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pelaksana utamanya juga berada di Desa Kertosono. Keberadaan UPK di Desa Kertosono diakui oleh masyarakat Desa Kertosono. Hal tersebut terlihat dari keinginan warga desa untuk berpartisipasi didalamnya. Kegiatan UPK yang terfokus kepada usaha simpan pinjam telah memberikan bantuan kepada warga, warga memanfaatkan usaha simpan pinjam tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Usaha simpan pinjam telah dapat memenuhi kebutuhan 80% warga, sebanyak 15% warga yang belum mendapatkan pinjaman dari UPK mengandalkan pekerjaan yang mereka miliki serta kiriman dari sanak saudaranya, lainnya sebanyak 5% mengandalkan pinjaman dari renternir. Pinjaman yang dapat diberikan oleh UPK kepada warga berkisar dari Rp. 250.000 sampai Rp. 1.500.000,- pinjaman tersebut dapat diangsur tiap bulannya dengan bunga sebesar 1%, apabila telah lewat 1 tahun, dalam tenggang waktu peminjaman selama 3 bulan untuk melunasi pinjaman sudah tidak dikenakan bunga lagi, berbeda dengan peminjaman di renternir, dengan bunga sebesar 30% - 50% dalam setahun, apabila tidak dapat melunasi dalam jangka waktu setahun, maka dikenakan bunga sebesar 30% - 50% lagi. Peminjaman di UPK dilaksanakan dalam 1 bulan sekali secara bersamaan, yaitu pada tanggal 23 disetiap bulannya, sedangkan untuk pembayaran cicilan dilaksanakan pada tanggal 21 di setiip bulannya. Warga yang meminjam

dana tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Warga yang akan meminjam kepada UPK akan disurvei terlebih dahulu oleh kelompok masyarakat (pokmas), apakah dia layak mendapatkan pinjaman atau tidak.

Para petani mengajukan pinjaman pada masa panen, hal tersebut dikarenakan setelah masa panen mereka akan mengalami masa paceklik, sehingga setelah masa panen tersebut mereka telah mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa paceklik.

“Biasanya kita minjam sebelum masa panen tiba, jadi waktu selesai masa panen sudah mendapatkan pinjaman dari UPK, buat jaga-jaga kalau waktu masa paceklik ga dapat proyek bangunan ya mengandalkan pinjaman UPK saja” (Warsidi, wawancara 14 Juli 2010)

Peternak dan tukang potong hewan ternak meminjam kepada UPK menjelang pendaftaran sekolah, hal itu dilaksanakan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sekolah putra – putrinya, selain untuk kebutuhan uang masuk sekolah, pinjaman juga dipinjam oleh para pekerja dibidang ini untuk menambah kebutuhan sehari – harinya, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

“Pinjam ke UPK kalau anak mau pendaftaran ulang ke sekolah, buat nambahin bayar SPP, kalau bayaran dari kerja uda cukup minjemnya buat nambahin uang lebaran, biar lebarannya bisa meriah” (Soeratman, wawancara 15 Juli 2010)

Para buruh meminjam kepada UPK untuk membantu menambah kebutuhan sehari – harinya, mereka biasanya meminjam kepada UPK pada saat proyek akan dimulai, hal tersebut dikarenakan mereka untuk berjaga – jaga setelah proyek selesai mereka masih memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Keberadaan UPK Desa Kertosono dengan kegiatan usaha simpan pinjamnya sangat diminati oleh warga desa, pinjaman yang diberikan oleh UPK mereka gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan utama mereka, maupun untuk kebutuhan sekolah anak mereka. Keberadaan UPK juga dapat mengurangi jumlah renternir di desa, pengurangan jumlah renternir dikarenakan warga lebih merasa nyaman untuk meminjam kepada UPK dari pada ke renternir, dengan alasan bunga di UPK lebih rendah. Namun, masyarakat desa juga belum mampu lepas sepenuhnya dari renternir, hal itu disebabkan oleh terbatasnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh UPK dan waktu peminjaman UPK yang hanya dalam 1 bulan sekali.

“Setelah UPK masuk, rasanya lebih enak mas, kalau minjem duit langsung ke UPK saja, dari pada ke renternir, direnternir bunganya mahal mas, jadinya kerasa berat banget buat kita, kalau di UPK bunganya kecil mas, jadi kalau minjem lebih enak, tapi kalau memang ada kebutuhan mendesak, ya masih minjem ke renternir juga, soalnya pinjaman UPK cuman 1 bulan sekali, jumlahnya juga dibatasi” (Parmono, wawancara 15 Juli 2010)

5.2.3 Diagram venn kelembagaan

Mayoritas masyarakat Desa Kertosono memeluk agama Islam. institusi yang berperan di wilayah ini secara umum sama seperti daerah yang lain, antara lain RT, RW, Kelurahan, Bidan/Mantri, serta pihak pemerintah Kabupaten merupakan pihak-pihak yang mempengaruhi wilayah ini. Selain itu, masuknya lembaga bentukan pemerintah yang sampai saat ini benar – benar diterima oleh masyarakat Desa Kertosono, yaitu UPK yang terbentuk dari program Gerdu-taskin menjadi pihak eksternal yang masuk kedalam desa.

Masyarakat Desa Kertosono secara umum hidup berdampingan satu sama lain. Dalam hal hubungan masyarakat dengan Kepala Desa, masyarakat memiliki hubungan yang baik. Kepala Desa seringkali berinteraksi dengan mereka, terkadang ia membantu untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Mereka memperhatikan kondisi masyarakat bahkan tidak segan –

segaran untuk membina dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Keberadaan mushola ataupun masjid merupakan salah satu sarana yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Kertosono. Masyarakat Desa Kertosono rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak ataupun ceramah umum. Mereka mengelola mushola ataupun masjid secara swadaya.

Hubungan masyarakat dengan bidan yang berada di Puskesmas memiliki hubungan yang baik. Sebagian besar masyarakat Desa Kertosono sudah sadar akan pentingnya kesehatan, mereka lebih memilih untuk berobat secara medis ke bidan ataupun mantri daripada ke dukun, namun, selama mereka merasa yakin dengan obat tradisional mereka memilih menggunakan obat tradisional tersebut. Begitu pula dengan keberadaan sekolah di wilayah ini. Keberadaan sekolah merupakan sarana yang berperan bagi masyarakat Desa Kertosono. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan namun mereka tetap memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Semua anak – anak di Desa Kertosono bersekolah meskipun hanya sampai SD, dan untuk melanjutkan ke tingkat lanjutan pertama mereka dapat melanjutkan ke sekolah Tsanawiyah, SLTP, atau pun ke pondok pesantren.

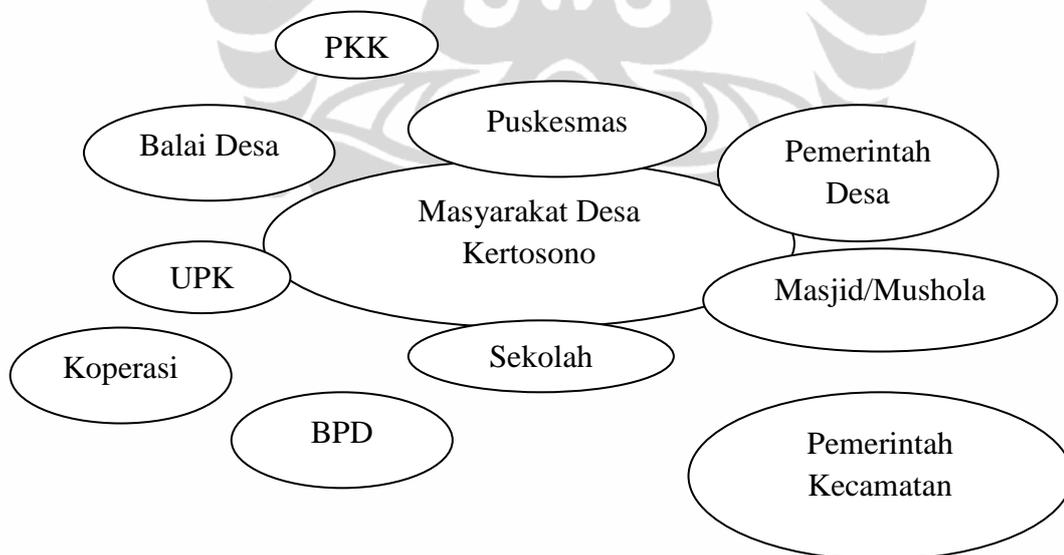
Selain hal – hal tersebut, balai desa juga memegang peranan penting bagi masyarakat Desa Kertosono, Balai desa bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan alternatif, balai desa merupakan tempat berkumpulnya warga, baik untuk pengobatan gratis, maupun untuk kegiatan kelembagaan yang lainnya. Selain itu, pada malam hari, balai desa yang memiliki genset dan dinyalakan pada setiap malam menjadikan balai desa sebagai tempat berkumpulnya bapak – bapak, sekedar meminum kopi dan bercengkrama bersama. UPK sejak awal didirikan telah memberikan hal yang berarti bagi warga disekitar, sehingga keberadaan UPK sebagai faktor eksternal sangat dijunjung oleh masyarakat desa.

Kegiatan PKK di Desa Kertosono telah lama tidak dilaksanakan, hal itu dikarenakan PKK dirasa kurang berguna bagi mereka, apa lagi, kebanyakan kaum perempuan pada siang hari bekerja juga sebagai petani,

pekerja konveksi, maupun sebagai buruh cuci, sehingga tidak ada waktu bagi mereka mengikuti kegiatan tersebut, selain itu, mereka menyalurkan kegiatannya melalui masjid atau pun mushola. Koperasi desa juga sudah lama tidak berfungsi, dikarenakan kepentingan pengurus dan kepentingan warga berbeda.

BPD yang merupakan utusan masyarakat desa di pemerintahan juga tidak berfungsi dengan optimal, hal ini dikarenakan, masyarakat desa dan pemerintah Kecamatan Sidayu memiliki kesalah pahaman, bagi masyarakat desa BPD dirasa kurang memberikan kontribusi bagi mereka. BPD yang seharusnya merupakan perwakilan masyarakat desa di pemerintahan hanya dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Sidayu saja, pemerintah Kecamatan Sidayu dalam 2 bulan sekali datang ke balai desa Desa Kertosono untuk memberitahukan pengumuman tentang program pemerintah.

Berikut akan diberikan gambaran diagram venn Desa Kertosono :



Gambar 5.2
Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Desa Kertosono

5.2.4 Kalender Musim

Perekonomian masyarakat Desa Kertosono, untuk beberapa kelompok masyarakat, seperti peternak dan tukang potong sapid an pekerja konveksi sulam jilbab tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi cuaca yang ada. Mereka bekerja setiap hari, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Sedangkan, kelompok yang terpengaruh adalah kelompok petani dan kelompok buruh kasar, kelompok petani sangat bergantung dengan kondisi alam untuk menjaga ladang mereka, untuk kelompok buruh kasar. Mereka bergantung cuaca untuk mendapatkan pekerjaan, bagi buruh kasar, apabila memasuki musim penghujan, mereka akan susah mendapat pekerjaan, dikarenakan banyaknya pembangunan proyek yang harus tertunda karena hujan.

Pada Bulan Februari – bulan Agustus dimana masa musim kemarau, merupakan masa yang paling cocok buat para petani untuk bercocok tanam, pada bulan awal Februari petani telah mulai menaburkan benih disawah. Gangguan biasanya terjadi pada bulan April – mei, dimana pada bulan tersebut, hama, serta hewan – hewan lain mulai datang dan menyerang tanaman padi, hal itu disebabkan tanaman padi sudah mulai menguning dan menjadi sasaran utama hewan – hewan yang memakan dan merusak tanaman padi mencari makan di daerah persawahan tersebut. Pada pertengahan bulan Agustus sampai awal November merupakan masa musim panen bagi sawah – sawah yang mereka kerjakan, dan juga masa bahagia bagi para warga. Setelah melewati bulan Agustus – September mulailah warga masuk dalam masa seret, dimana hujan telah datang, lahan sawah menjadi becek, sehingga tidak di taburkan bibit – bibit padi, maupun bibit tanaman lainnya, sehingga pada bulan September – Januari, mereka yang berprofesi sebagai petani, rata – rata berubah haluan menjadi buruh kasar. Namun, masih ada beberapa yang tetep menggarap lahan, mereka yang melakukan tersebut, biasanya lahan garapannya tidak sepenuhnya padi, namun ada jenis – jenis lainnya, seperti jagung, dan tanaman ubi rambat, namun yang mengerjakan hal tersebut hanyalah sedikit sekali. Sehingga para petani hanya menggantungkan pekerjaan mereka pada bulan Februari – bulan Agustus saja untuk

mendapatkan nafkah dari pekerjaannya, selebihnya mereka harus berjuang keras menghadapi masa seret tersebut, pada masa tersebut, pinjaman dari UPK sangat berarti bagi petani.

5.2.5 Analisis Penggunaan Waktu Sehari

Penggunaan waktu sehari masyarakat Desa Kertosono hampir memiliki keseragaman antara satu dan lainnya, walaupun mereka terbagi dalam beberapa kelompok jenis pekerjaannya, hal tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum pria, tapi juga berlaku bagi kaum perempuan.

Berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dikelompokkan, Petani laki – laki berangkat kesawah sejak pukul 05.30 Wib, sampai disawah waktunya beragam, ada yang pukul 05.45 Wib, bahkan yang terjauh dan terlama sampai disawah pada pukul 06.00 Wib, sedangkan petani perempuan berangkat ke sawah pada pukul 07.00 Wib setelah selesai mengurus segala perlengkapan buat anak – anaknya sekolah. Para petani menghabiskan waktunya di sawah sampai pukul 15.00 Wib, kemudian bersiap – siap untuk pulang ke rumah, Sesampainya di rumah, biasanya mereka memanfaatkan waktu untuk menonton TV, sebelum listrik di desa padam, setelah pukul 18.00 Wib, biasanya para bapak – bapak akan keluar dari rumah, untuk berkumpul di rumah pak RT, atau berkumpul di balai desa, saat berkumpul tersebut biasanya mereka berbicara tentang desa, atau bahkan hanya main kartu (tidak berjudi) dan hanya minum kopi, apabila ada pertandingan sepak bola, mereka akan berkumpul di balai desa untuk menonton pertandingan tersebut, hal itu dikarenakan listrik untuk menonton TV hanya terdapat di balai desa, melalui genset yang tersedia disana. Mereka akan pulang kerumah masing – masing saat waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib, bertepatan dengan matinya listrik di balai desa, sedangkan para kaum Ibu tetap berada dirumah, untuk mengawasi anak nya belajar dibawah sinaran cahaya lampu petromag.

Hal yang tidak berbeda juga terjadi di kalangan pekerja peternak dan tukang potong hewan ternak, mereka berangkat ke tempat kerjanya pada pukul 05.00 Wib, mereka sampai ke lokasi tempat bekerja dengan waktu yang beragam, sesuai dengan letak jauh atau dekatnya lokasi mereka bekerja, para

peternak tersebut selesai bekerja pada pukul 15.00 Wib, dan kemudian mereka pulang ke rumah masing – masing, untuk aktivitas malam hari tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh para petani.

Untuk para wanita yang bekerja di usaha konveksi payet memiliki waktu bekerja dimulai pukul 08.00 Wib, biasanya mereka sudah berada dilokasi pada pukul 07.30 Wib, setelah suami, maupun anak – anak mereka berangkat ke tempat kerjanya masing – masing, para pekerja konveksi tersebut bekerja hingga pukul 15.00 Wib. Para pekerja konveksi tersebut pada malam hari hanya berada dirumah, mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak kecil biasanya akan menjaga anaknya yang sedang belajar pada malam tersebut.

Sedikit berbeda untuk para buruh kasar, mereka akan berangkat ke Kecamatan Sidyu pada pukul 05.15 Wib, bahkan beberapa berangkat pada pukul 04.30 Wib. Hal itu dikarenakan mereka harus segera ke Kecamatan Sidayu untuk selanjutnya menumpang angkutan umum yang akan membawa mereka ke Kecamatan Manyar, maupun Ke Kabupaten Gresik untuk mencari proyek bangunan. Pada kelompok buruh ini, jam pulang mereka berbeda – beda, ada yang jam 16.00 Wib sudah sampai di rumah, ada yang bahkan jam 20.00 Wib baru sampai rumah. Hal itu bergantung dari kondisi proyek yang mereka kerjakan, bahkan ada beberapa yang tidak pulang untuk menghemat biaya pulang – pergi mereka.

Anak – anak di Desa tersebut memulai aktivitasnya di mulai pada pukul 05.30 Wib, mereka mulai berkemas – kemas untuk bersiap – siap berangkat sekolah, mereka yang menduduki kelas empat, lima, enam akan berangkat sekolah pada pukul 06.30 Wib, dan memulai aktivitas belajarnya pada pukul 07.00 Wib, sampai dengan pukul 11.30 Wib, setelah itu mereka pulang dan beristirahat di rumah, kemudian pada pukul 15.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib mereka akan melanjutkan belajar mengaji di TPA mushola yang mereka rasa dekat dengan tempat tinggal mereka. Sedangkan, untuk para siswa kelas satu, dua, tiga mereka memulai aktivitasny pada pukul 06.30 Wib, namun mereka tidak langsung ke sekolah, mereka biasanya berangkat

dari rumah pukul 07.30 Wib untuk menuju TPA, mereka melakukan aktivitas belajar mengaji hingga pukul 10.00 Wib, selanjutnya mereka pulang dan bersiap – siap untuk berangkat sekolah pada pukul 12.30 Wib, mereka memulai belajar di sekolah pada pukul 13.00 Wib hingga pukul 16.30 Wib setelah jam aktivitas mereka, biasanya pada pukul 17.00 Wib – 17.35 Wib anak – anak berkumpul dan bermain bersama – sama dengan jenis permainan mereka masing – masing, setelah lewat adzan maghrib, mereka akan masuk kedalam rumah mereka.

Berdasarkan uraian mengenai wilayah Desa Kertosono, dapat ditarik beberapa masalah yang terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Hal ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah tersebut dan akan berpengaruh terhadap kebijakan program pengentasan kemiskinan masyarakat, selain itu akan dilihat juga seberapa besar peranan UPK terhadap dinamika masyarakat Desa Kertosono.

Pada analisis kualitatif, terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Desa Kertosono sudah tidak bisa disebut sebagai masyarakat tradisional. Mereka sangat terbuka dengan proses modernisasi yang terjadi di sekitar Kabupaten Gresik. Sebagai contoh, keinginan mereka untuk bersekolah bisa dikatakan tinggi dan kepemilikan mereka akan barang – barang berteknologi cukup tinggi, dalam hal kesehatan pun, kesadaran mereka sudah cukup, dimana mereka lebih percaya kepada bidan dari pada kepada dukun. Sayangnya hal tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana medis dan pendidikan yang memadai, dan juga ketersediaan dana yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Permasalahan lainnya, adalah kurangnya tenaga terampil di desa tersebut, sehingga masyarakat di desa terbatas ilmunya hanya sebatas ilmu dari SD, ditambah dengan pengalaman dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, tenaga ahli jarang mendatangi desa mereka, para tenaga ahli pembimbing pada umumnya sampai pada tingkatan Kecamatan saja.

Semenjak berdirinya program Gerdu-taskin, dimana penyuluh pemerintah langsung datang ke desa dan memberikan banyak masukan bagi warga masyarakat, membuat warga mendapatkan banyak masukan, terutama pelatihan yang diberikan kepada pengurus UPK sangat memberikan arti bagi masyarakat desa, pengurus UPK Desa Kertosono bersama pihak Kelurahan sangat aktif memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat desa, hal tersebut menjadikan pengetahuan warga desa menjadi bertambah. Namun, karena terbatasnya sarana dan prasarana lainnya, membuat kinerja UPK tidak maksimal, serta kurangnya pengamatan terhadap analisis peluang usaha menyebabkan usaha pemberdayaan di desa tersebut masih kurang optimal dilakukan oleh UPK Desa Kertosono.

5.2 Analisis SWOT

Soesilo (2002) menjelaskan, SWOT merupakan singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Lebih lanjut menurut Soesilo (2002), Analisis SWOT adalah jabaran dari manajemen srategik versi Chicago dengan prinsip “*inside out*”. Dalam analisis ini, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi. Setelah melakukan penelitian dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), maka untuk mendapatkan suatu strategi yang dapat digunakan oleh UPK dalam mengembangkan program kegiatan berbasis masyarakat maka digunakan analisis *SWOT*.

Berdasar identifikasi permasalahan sebelumnya, untuk memperoleh gambaran potensi ke depan dan strategi yang dikembangkan, maka dilakukan analisis *SWOT* seperti yang diuraikan dibawah ini :

Strenghts

Berdasarkan indentifikasi *SWOT* yang dilakukan di lapangan berikut beberapa poin kekuatan di Desa Kertosono antara lain :

1. Budaya masyarakat yang tidak melarang kaum perempuan bekerja
2. Adanya keinginan untuk merubah nasibnya, meningkatkan kemampuan dan taraf hidupnya
3. Terdapat sarana pendidikan dasar di desa tersebut
4. Keinginan para orang tua untuk menyekolahkan anak – anak mereka hingga kejenjang yang lebih tinggi
5. Tersedianya beberapa lahan kosong yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa
6. Kesadaran masyarakat menerima program penyuluhan dari pemerintah
7. Kekompakan masyarakat desa dalam menyelesaikan dan menangani suatu permasalahan di desa
8. Tingkat saling percaya terhadap sesama masyarakat dan kehidupan yang rukun antar warga
9. Pengurus UPK yang aktif berdialog dan menjadi panutan di desa
10. Dukungan masyarakat terhadap UPK sebagai ujung tombak program Gerdu-taskin

Berdasarkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ketosono, terlihat kekuatan terbesar masyarakat Desa Kertosono terletak pada Sumber daya manusia dan alam. Kedua sumber daya tersebut dapat dijadikan modal utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Weakness

Terdapat beberapa kelemahan yang mendasar yang terdapat di wilayah Desa Kertosono. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Akses dan letaknya yang jauh dari letak pemerintah Kabupaten Gresik
2. Jauhnya lokasi pemukiman penduduk dengan lokasi tempat mereka melakukan aktivitas pekerjaan
3. Belum tersedianya sarana transportasi umum yang memadai untuk menuju ke Desa Kertosono

4. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola pendapatan (dalam hal ini, masyarakat yang memiliki sedikit penghasilan untuk disimpan akan menjadi lebih konsumtif, hal tersebut terkait dengan dampak modernisasi yang terjadi di desa tersebut)
5. Tidak adanya peranan tokoh yang menjadi panutan
6. Rendahnya keterampilan masyarakat Desa Ketosono, sehingga mereka hanya mampu bekerja sebagai pekerja dengan upah minimum
7. Kebiasaan masyarakat membelanjakan uang yang mereka dapatkan untuk membeli barang – barang yang tidak menjadi kebutuhan pokok
8. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang untuk aktivitas masyarakat desa
9. Ketergantungan masyarakat terhadap jenis pekerjaan tertentu menyebabkan masyarakat tidak dapat mengoptimalkan dirinya, hal itu berlaku terhadap berbagai jenis pekerjaan yang mereka lakukan
10. Sifat masyarakat yang menerima dan pasrah terhadap keadaan mereka yang terjadi saat ini
11. Tidak adanya lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat selain yang sudah mereka lakukan saat ini
12. Lembaga pemerintah belum dapat memenuhi keseluruhan kehidupan masyarakat
13. Terbatasnya modal UPK yang diberikan oleh Pemprov Jatim untuk melaksanakan kegiatan
14. Sulitnya merubah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat, untuk melakukan perubahan tersebut dibutuhkan waktu

Hampir keseluruhan poin – poin kelemahan masyarakat ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya dan pengelolaan sumber daya yang belum maksimal, serta masih terbatasnya peranan lembaga (UPK) dalam membantu mengentaskan permasalahan – permasalahan yang ada di desa, hal tersebut ditambah dengan terbenturnya pengetahuan dan

kemampuan masyarakat desa yang masih sangat kurang. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa juga menjadi penyebab terhadap kelemahan – kelemahan yang ada pada masyarakat Desa Kertosono.

Opportunities

Dari serangkaian kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertosono, ditemukan beberapa peluang yang akan menunjang program pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibuat. Kesempatan-kesempatan itu antara lain:

1. Wilayah desa yang subur, dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman
2. Wilayah kosong yang luas, wilayah pertanian yang tidak dimiliki oleh tuan tanah, maupun oleh warga desa
3. Sistem perairan yang sangat baik di wilayah desa
4. Adanya program Gerdu-taskin dan adanya UPK di desa yang aktif menjalankan perannya
5. Penerimaan masyarakat terhadap UPK serta berperan aktif dalam mendukung UPK
6. Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi
7. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan baik oleh mahasiswa yang melakukan penelitian, LSM, maupun oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten
8. Masuknya para pedagang ke dalam desa, melalui pasar kerempyang (istilah pasar kaget bagi masyarakat Desa Kertosono), yang mana pengunjungnya tidak hanya masyarakat Desa Kertosono saja
9. Peran aktif aparat desa dalam berdialog dan berkomunikasi dengan warga tanpa ada batasan antara aparat dan warga

Melihat peluang – peluang diatas, hampir keseluruhan peluang didapatkan melalui pemberdayaan sumber daya manusia serta masuknya program Gerdu-taskin dan aktifnya UPK dalam memberikan pendidikan dan

penyuluhan serta dalam melaksanakan berbagai macam kegiatannya. Adanya peran aktif *Stakeholder* serta aparatur desa, dapat menjadi keuntungan yang sangat besar bagi warga desa. Ditambah lagi dengan masuknya beberapa kelompok mahasiswa dan LSM untuk melaksanakan penelitian dan kegiatan penyuluhan.

Threat

Terdapat beberapa tantangan bagi pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dijalankan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Sulitnya menambah tenaga pengajar dan kesehatan karena letaknya yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan
2. Anggaran pendidikan yang sangat terbatas (anggaran pendidikan Desa Kertosono merupakan yang terendah no 3 di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)
3. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan usaha dan mengelola sumber daya alam secara komersil
4. Banyaknya renternir yang masuk kedesa untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar dan dengan bunga yang lebih tinggi (para renternir berasal dari daerah luar desa, anak buah para renternir tersebut akan masuk kedesa untuk menawarkan jasa pinjaman kepada penduduk desa)
5. Pengurus UPK kurang jeli dalam melihat peluang dan merasa puas atas usaha yang telah dilakukan
6. Belum optimalnya lembaga yang ada dalam melaksanakan program pemerintah
7. Kurangnya tenaga ahli handal dan berpengalaman dalam desa

Dapat dikatakan hambatan yang paling dasar adalah kemauan masyarakat untuk berubah, karena hal ini akan menyangkut kebiasaan mereka yang sudah membudaya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membina dan mengarahkan masyarakat. Selain itu, ancaman terbesar adalah masih banyaknya renternir yang berkeliaran di desa tersebut, pinjaman yang

diberikan oleh UPK jumlahnya sangat terbatas, dan dalam pemberian pinjaman UPK hanya melakukan dalam 1 bulan sekali saja, dimana pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, para calon peminjam dikumpulkan di balai desa sebelum pinjaman mereka dicairkan.

Renternir yang masuk kedesa memang dapat ditekan jumlahnya setelah masuknya UPK kedalam Desa Kertosono, namun renternir yang dapat memberikan bantuan dalam jumlah yang lebih banyak, dan waktu untuk meminjam yang lebih fleksibel membuat beberapa warga masih meminjam kepada renternir. Hal itu menjadikan ancaman terbesar bagi warga, serta menimbulkan mata rantai kemiskinan yang susah untuk diputus.

Sebagaimana dilihat dari penjabaran – penjabaran diatas, bila dilihat dari dinamika yang terjadi pada masyarakat saat ini, upaya pengentasan kemiskinan dan upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Kertosono belum dapat dilakukan secara maksimal, masalah terbesar terkait dengan kebiasaan masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa. Ancaman lain juga datang dari para renternir yang masuk kedalam desa, masuknya renternir semakin membuat susah untuk pemutusan mata rantai kemiskinan warga desa. Selain itu, kecenderungan untuk bertahan pada tradisi pekerjaannya, menyebabkan masyarakat desa sulit untuk berkembang, perasaan puas atas apa yang telah diterima mengakhibatkan masyarakat menerima kondisi yang ada.

UPK sebagai ujung tombak program Gerdu-taskin juga belum dapat dengan optimal menjalankan fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat, hal itu dikarenakan sangat susah untuk merubah kebiasaan masyarakat, sehingga dalam perjalanannya UPK hanya dapat memberdayakan beberapa orang saja, selain itu, melihat dari lemahnya keterampilan masyarakat desa, UPK tidak berani mengambil tindakan yang lebih jauh guna memberdayakan masyarakat desa melalui pendirian unit usaha.

Dilihat dari hasil identifikasi SWOT, dari sisi kekuatan dan peluang yang ada mulai terbentuknya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan

kehidupan mereka, serta penerimaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, baik program maupun penyuluhan, dan kekompakan masyarakat merupakan sebuah keunggulan yang menjadi modal penting, keberadaan UPK yang dianggap sebagai lembaga yang sangat penting bagi dinamika kehidupan masyarakat desa.

Jika dilihat dari sisi kelemahan dan ancaman, maka kelemahan terbesar adalah, keadaan pasrah masyarakat terhadap kondisi yang mereka hadapi saat ini, meskipun ada keinginan untuk berubah, namun dikarenakan faktor kebiasaan, serta faktor kurang mampuan mereka untuk berubah menyebabkan hal tersebut sangat menghambat masyarakat untuk berubah. Selain itu, kurang mampunya UPK dalam mencakupi kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia, menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang secara langsung ikut berpartisipasi dalam kegiatan baik itu unit usaha, atau pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPK. Melihat keadaan tersebut, yang dapat menjadi panutan dalam perubahan kondisi keadaan masyarakat adalah para perangkat desa, serta pemuka agama yang bekerja sama dengan LSM dan pemerintah Kecamatan. Untuk pembinaan pengurus UPK, maka fasilitator UPK dari Kecamatan dan Kabupaten bertanggung jawab dalam pembinaannya.

Masuknya renternir juga merupakan ancaman dan menjadikan kelemahan bagi masyarakat desa, dengan adanya renternir, maka rantai kemiskinan akan semakin sulit dilepas, warga yang terlilit hutang dengan bunga besar akan terus membayar kepada renternir, sehingga pemasukan yang mereka terima tidak ada lagi yang tersisa untuk ditabung. UPK yang ada di desa, memang telah memberikan bantuan kredit untuk masyarakat. Namun, belum mencukupi, hal itu dikarenakan UPK juga memiliki keterbatasan dana untuk memberikan pinjaman, dalam 1 bulan UPK maksimal hanya dapat memberikan pinjaman sebanyak Rp. 32.000.000 yang dibagi rata kepada calon peminjam, hal itu menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap pinjaman. Sedangkan, apabila melalui renternir, masyarakat tidak terbatas mau meminjam kapan, dan tidak terbatas kapan dana pinjamannya dapat segera

dicairkan, hal itu menyebabkan keberadaan renternir di desa masih tetap menjamur, walaupun keberadaannya sudah dapat ditekan dan tidak sebanyak sebelum UPK masuk kedesa tersebut.

5.2.1 Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi Atas Masalah

Atas dasar pembahasan *SWOT* diatas dapat ditentukan beberapa prioritas masalah yang harus ditangani segera. Hal ini didasari oleh pertimbangan mengenai potensi masalah untuk menjadi lebih besar, frekuensi terjadinya masalah, dan dampak yang dapat ditimbulkan bagi orang banyak. Bila dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan, prioritas masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Strenght

Melihat kekuatan – kekuatan yang dimiliki masyarakat Desa Kertosono, terlihat bahwasannya masyarakat telah memiliki modal sumber daya manusia yang kompak antara warganya, kesadaran akan pemanfaatan program pemerintah dan kondisi sumber daya alam yang memadai yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa. Kekompakan serta kerukunan masyarakat desa juga merupakan kekuatan utama masyarakat dalam membangun desa. Adanya dukungan dari pihak pemerintah serta pihak lain yang terkait menjadikan hal tersebut sebagai modal utama masyarakat dalam membentuk suatu kehidupan yang lebih baik. Dukungan masyarakat terhadap UPK juga menjadi kekuatan tersendiri untuk keberhasilan program Gerdu-taskin di Desa Kertosono, keaktifan pengurus UPK membuat masyarakat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK

Weakness

Dari keseluruhan kelemahan yang terdapat didesa Kertosono, terlihat dari faktor kebiasaan dan dari faktor kebiasaan yang telah membudaya dikalangan masyarakat desa. Selain itu, kelemahan juga terdapat dari akses dan sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Keterbatasan UPK dalam menjalankan program juga menjadikan suatu kelemahan dalam mengatasi kemiskinan. Modal yang kurang menjadikan kelemahan tersebut semakin terlihat, untuk membuat UPK sukses menjalankan program - programnya.

Opportunity

Berdasarkan peluang yang ada diatas, seperti masih adanya lahan – lahan yang belum tergarap dengan baik, antusiasme masyarakat terhadap program pemerintah, keaktifan pengurus UPK dalam memberikan penyuluhan, dan keinginan pengurus UPK yang bekerjasama dengan aparatur desa terhadap pemberian bantuan dengan memberdayakan masyarakat. Merupakan modal utama bagi masyarakat desa untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.

Threat

Dari keseluruhan uraian diatas, tantangan terbesar adalah merubah kebiasaan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang bekerja sebagai buruh kasar, kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan tidak akan berhasil apabila kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat diatasi. Ancaman lainnya, masih belum bisanya masyarakat melepaskan diri dari jeratan renternir, sehingga menyebabkan msyarakat tidak dapat menabung.

Berdasarkan analisis SWOT dapat ditentukan beberapa priortias masalah yang harus segera diatasi, yaitu :

1. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan pola pikir sederhana (pasrah terhadap keadaan yang mereka terima) dan membudaya dari masyarakat desa
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana desa
3. Belum adanya alternatif mata pencaharian, khususnya bagi kaum buruh kasar
4. Kegiatan UPK dalam mencari alternatif usaha lain yang dapat memberikan pemasukan tambahan serta memberdayakan masyrakat desa

Berdasarkan prioritas yang telah dibuat, dilakukan analisa yang lebih mendalam untuk diperoleh alternatif solusi yang dapat mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi untuk kemudian dituangkan dalam skenario rencana aksi. Analisa tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kebiasaan Masyarakat yang Buruk

Salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian di Desa Kertosono adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan pola pikir sederhana dan membudaya yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Masyarakat Desa Kertosono tidak memiliki budaya untuk menabung, semua uang yang mereka peroleh langsung mereka belanjakan. Walaupun mereka mendapatkan sedikit tambahan penghasilan dari pekerjaannya, tambahan tersebut akan digunakan untuk membeli barang – barang diluar kebutuhan pokok yang merupakan dampak dari modernisasi, seperti membeli telepon genggam, apabila sudah tidak memiliki dana lagi, maka barang tersebut akan dijual kembali. Tidak mudah untuk merubah kebiasaan suatu kelompok masyarakat, apalagi yang telah membudaya dan telah menjadi sifat masyarakat. Dibutuhkan waktu yang sangat lama dan bimbingan yang benar – benar intensif agar masyarakat secara perlahan meninggalkan sifatnya tersebut.

Dalam hal ini solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan bimbingan psikologis bagi masyarakat dari para ahli yang dilakukan secara bertahap. Bimbingan ini dilakukan kepada masyarakat yang telah terbagi dalam kelompok – kelompok kecil (jumlah anggota sedikit). Dengan adanya kegiatan keagamaan masyarakat Desa Kertosono (melalui pengajian), merupakan awal untuk memulai upaya pembinaan ini. Melalui pengajian ini para tokoh agama memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan motifasi hidup, dan mencari kehidupan yang lebih baik, bukan hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah mereka jalani selama ini secara turun temurun. Hal yang terpenting yang harus ditumbuhkan pada masyarakat adalah keinginan untuk merubah kehidupan mereka. Kegiatan ini akan sia – sia jika masyarakat tidak memiliki keinginan untuk merubah hidupnya. Diharapkan masyarakat akan mampu melaksanakan program pemberdayaan dengan baik, karena dalam hal ini mereka tidak hanya sebagai objek tetapi yang terpenting adalah mereka adalah subjeknya.

2. Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Desa

Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai bagi masyarakat Desa Kertosono, antara lain seperti alat transportasi, jalan, dan listrik, Kesehatan, dan sarana pendidikan belum terpenuhi dengan baik. Padahal di lain pihak sarana prasarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya, dan keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di Desa Kertosono.

Untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang belum dipenuhi dapat dilakukan dengan dua pilihan cara. Pertama apakah diberikan langsung sarana prasarana yang dibutuhkan kepada masyarakat dan masyarakat yang bertanggung jawab pada pengelolaan selanjutnya. Kedua adalah dengan mendorong masyarakat untuk mengusahakan sarana prasarana tersebut dengan mengusahakannya melalui dana yang mereka himpun dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan tabungan masyarakat, di mana mereka berkeinginan bersama – sama menyisihkan sejumlah uangnya secara berkala hingga mencapai jumlah tertentu. Maksud dari pembuatan sarana prasarana diusahakan dari dana masyarakat sendiri adalah diharapkan mereka memiliki rasa memiliki terhadap sarana prasarana semakin meningkat.

3. Belum adanya alternatif mata pencaharian, khususnya bagi buruh kasar

Mata pencaharian alternatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kertosono saat ini. Pendapatan yang mereka peroleh hanya dari lapangan pekerjaan yang mereka lakukan saja, tidak ada tambahan lain dari lapangan pekerjaan lainnya. Untuk pekerja di sektor peternakan dan tukang potong hewan ternak, sebenarnya telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dari sektor pekerja konveksi, sifatnya mereka yang bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut adalah mata pencaharian tambahan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Yang perlu diperhatikan adalah dari kaum petani dan buruh kasar, terutama kaum buruh kasar. Kaum petani juga membutuhkan perhatian, hal tersebut dikarenakan saat terjadi musim seret

(istilah musim paceklik bagi masyarakat Desa Kertosono), para petani tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, keculai mereka menjadi buruh kasar dan mendapatkan proyek. Kurangnya kemampuan para petani dan buruh tersebut, menjadikan mereka susah untuk mencari pekerjaan alternatif bagi diri mereka.

Alternatif solusi bagi permasalahan ini adalah bimbingan dan pelatihan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak pemberi bantuan baik pemerintah maupun swasta dapat memanggil pembimbing baik dari institusi pemerintahan, swasta, maupun LSM. Pelatihan yang diberikan sebisa mungkin dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk berwirausaha. Karena diharapkan selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan alternatif bagi dirinya sekaligus bagi orang lain. Menambah frekwensi pasar kaget yang ada di Desa Kertosono dari satu minggu sekali, juga dapat menjadi alternatif untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, UPK dapat memberikan bantuan modal kepada mereka untuk mendirikan usaha dipasar tersebut.

4. Keaktifan UPK Dalam Menciptakan Lapangan Usaha dan Memberdayakan Masyarakat Desa

UPK sebagai lembaga yang merupakan ujung tombak bagi program Gerdu-taskin seharusnya dapat mendirikan sektor usaha yang dapat dikelola swadaya oleh masyarakat desa, namun pada kenyataannya sampai saat ini UPK hanya mendirikan satu sektor usaha. Sektor usaha ini melibatkan peran aktif masyarakat desa, namun yang merasakan hasil dari sektor usaha tersebut hanya sebagian kecil masyarakat desa saja. Selain dari sektor usaha tersebut, UPK juga telah memberdayakan perempuan untuk menjalankan tugas kelompok masyarakat (Pokmas), sebagai pencatat, dan penagih pinjaman masyarakat melalui UPK. Para Pokmas tersebut merupakan ujung tombak UPK dalam menjalankan fungsinya, mereka mendapatkan upah dari hasil keringat mereka mendata dan menagih.

Alternatif solusi yang ditawarkan adalah, UPK bekerjasama dengan LSM untuk memberikan dan mencari jenis usaha yang dapat dimanfaatkan

oleh warga, selama ini UPK belum pernah terlibat secara aktif dengan LSM untuk mendirikan unit usaha. Alternatif lainnya adalah UPK melihat lebih lanjut kecenderungan yang terjadi pada masyarakat, serta memanfaatkan lahan kosong yang ada, UPK seharusnya jeli melihat bahwasannya mata pencaharian utama bagi masyarakat desa adalah pertanian, dan selama ini saat musim panen petani menggilingkan hasil panennya kepada pengusaha penggilingan yang berada diluar desa. Seharusnya hal itu menjadikan peluang buat UPK untuk mendirikan jenis usaha serupa, sehingga para petani tidak menggilingkan hasil panennya kepada pengusaha dari luar desa. Untuk pengelolaannya, UPK dapat memberdayakan masyarakat yang memiliki profesi sebagai buruh kasar, dengan menyisihkan modal yang didapat dari usaha simpan pinjam dan penggemukan sapi.

UPK dapat membeli alat penggilingan yang dapat dimobilisasi, sehingga cakupannya bukan hanya lahan pertanian di Desa Kertosono saja, namun juga bisa mencakup lahan di desa lainnya. Saat ini di kota Gresik banyak yang menjual alat giling tersebut, dan dapat dibeli dengan harga murah serta dengan fasilitas mencicil, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik terdapat sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pertanian, yang mengelola pupuk dan beberapa obat penumpas hama, yaitu perusahaan BUMN PT. Petrokima Gresik, dimana PT. Petrokima Gresik juga memiliki program pemberdayaan masyarakat pertanian. Seharusnya UPK lebih jeli membaca peluang – peluang tersebut, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan permintaan sumbangan mesin penggilingan padi serta pembinaan kepada perusahaan – perusahaan tersebut.

Seharusnya UPK dapat dengan jeli memanfaatkan perusahaan besar yang ada di Gresik dan keadaan sekitar desa tersebut, selain dengan penggilingan, UPK seharusnya juga dapat memanfaatkan lahan kosong guna membuat suatu perkebunan baru, yang tidak hanya menanam padi, namun menanam jenis tanaman lainnya, dengan keuntungan pengairan dan lahan yang subur, serta kemampuan masyarakat terhadap pertanian, seharusnya UPK dapat membuat unit usaha perkebunan, semisal, dengan membuka

perkebunan jagung, disini UPK dapat kembali bekerjasama dengan PT.Petrokimia Gresik dalam pengadaan pupuk, bibit, pestisida, sampai dengan pengolahannya. Selanjutnya masalah penjualan hasil perkebunan dapat melalui pasar kaget yang pengunjungnya dari berbagai daerah, maupun memasukan kepada koperasi desa di Kecamatan Sidayu.

Alternatif lain selain usaha penggilingan padi, adalah pelibatan pihak swasta, dalam pedoman operasional teknis program Gerdu-taskin, UPK diberikan kebebasan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, selama proses kerjasama tersebut melibatkan masyarakat desa, memberikan pemasukan kepada masyarakat desa, serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Peluang tersebut sebenarnya terbuka sangat lebar, buktinya masuknya usaha konveksi sulam jilbab di desa tersebut, seharusnya UPK harus lebih jeli dalam mencari mitra pihak – pihak swasta *home industri* tersebut, walaupun hanya menjadi sub industri, namun apabila dikelola dengan baik maka dapat menjadikan lapangan usaha alternatif bagi warga Desa Kertosono.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan, antara lain :

1. Dalam upaya memberdayakan masyarakat terdapat faktor-faktor yang mendorong serta menghambat jalannya pelaksanaan alternatif pemberdayaan tersebut. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain: adanya keterbatasan khususnya yang dimiliki masyarakat Desa Kertosono sebagai individu, yang tercermin dalam sifat, pola pikir dan kebiasaan yang telah membudaya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya dengan lebih maksimal. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola uang yang mereka miliki.

Sedangkan hal-hal yang mendorong jalannya upaya alternatif pemberdayaan masyarakat antara lain: adanya keinginan masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan, keinginan untuk maju dan berubah menjadi lebih baik, tingginya minat pendidikan pada masyarakat Desa Kertosono sehingga mereka mampu untuk ikut serta aktif belajar dalam upaya alternatif pemberdayaan. Tersedianya sumber daya alam yang merupakan modal yang mendukung selain manusia sebagai pengelola. Sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan sehingga dapat menciptakan sumber tambahan pendapatan alternatif bagi masyarakat miskin Desa Kertosono.

2. Alternatif pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh UPK, sebagai ujung tombak dari program Gerdu-taskin dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan adalah berdasarkan pemanfaatan keahlian masyarakat,

pemanfaatan lahan yang kosong dan belum tergarap, serta pemanfaatan peluang untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berada diluar Desa Kertosono dengan mendirikan unit usaha yang dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat Desa Kertosono.

Dalam pengembangan alternatif pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal mencakup beberapa aspek, antara lain: SDM, Lingkungan, aspek usaha, modal, informasi, pemasaran, dan penyediaan sarana prasarana. Alternatif pemberdayaan masyarakat harus segera dipikirkan oleh pemerintah desa dan UPK. Hal tersebut dikarenakan, untuk sesegera mungkin mengentaskan kemiskinan melalui jalan pembukaan unit usaha (seperti penggemukan sapi) yang bisa dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat Desa Kertosono.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat faktor – faktor penting tersebut harus segera dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan antara lain:

- a. SDM perlu ditingkatkan, agar masyarakat desa dapat menjadi tenaga yang terampil, bukan hanya terampil dalam suatu bidang pekerjaan saja, namun dapat terampil dalam jenis pekerjaan lainnya. Hal ini sangat diperlukan untuk dapat memperoleh tambahan penghasilan melalui lapangan pekerjaan lainnya. Selain itu, peningkatan mutu SDM dirasa sangat perlu, agar pola pikir masyarakat dapat berubah, terutama pola pikir untuk membeli barang – barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan (TV, DVD, ganti – ganti HP, dll). Selain untuk merubah pola pikir, peningkatan mutu SDM juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengatur keuangan, serta kemampuan manajerial. Pihak yang dapat berperan dalam hal ini adalah para aparatur desa yang dapat meminta bantuan kepada pemerintah Kecamatan untuk menjadi fasilitatornya, serta bantuan pemuka agama untuk memberikan ceramah agama tentang betapa pentingnya peningkatan mutu hidup.

- b. Kemudahan akses terhadap kegiatan usaha, informasi pasar, modal, penyediaan sarana prasarana yang mendukung alternatif pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan/pelatihan yang dapat mendorong efisiensi produksi, efektifitas manajemen, dan modernisasi alat-alat maupun faktor produksi, termasuk peningkatan akses terhadap pembaharuan yang terkait dengan alternatif pemberdayaan masyarakat. Untuk itu pengurus Desa Kertosono perlu lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.
- c. Program kemitraan (*partnership*) untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomi antara kelompok pelaku usaha besar dengan pelaku usaha dalam alternatif pemberdayaan masyarakat di desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mitra seperti yang telah terjadi dengan usaha konveksi sulam jilbab.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Kertosono antara lain :

1. Terkait dengan kebiasaan dan budaya masyarakat

Untuk mengatasi kebiasaan dan budaya masyarakat yang berpikiran secara tradisional, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan “*agent of change*” di dalam masyarakat, untuk turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi dan menstimulasi masyarakat dalam memikirkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang dapat mereka manfaatkan agar keluar dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini peran agen perubah sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dengan memberikan motivasi, dukungan serta kesempatan bagi peluang yang diutarakan oleh masyarakat desa. Saling bertukar pikiran

pengetahuan dan pengalaman bersama masyarakat. Selain itu diperlukan adanya penyampaian informasi dan teori yang mendukung serta mengadakan pelatihan yang menambah kemampuan mereka.

“*Agent of change*” dapat berasal dari masyarakat Desa Kertosono sendiri atau berasal dari luar desa. Agen perubah dari luar desa misal saja berasal dari pihak pemerintah ataupun LSM yang peduli mengenai masalah kemiskinan, atau berasal dari para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dalam masyarakat Desa Kertosono ataupun program sarjana masuk desa. Adanya kegiatan keagamaan berupa pengajian rutin masyarakat desa salah satu peluang bagi pembentukan agen perubah dari dalam masyarakat desa sendiri. Melalui kegiatan ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan upaya pemberdayaan. Untuk agen perubah yang berasal dari masyarakat dapat diperoleh dari tokoh-tokoh agama aktif dalam kegiatan keagamaan. Mereka yang mengetahui kondisi desa dan masyarakat Desa kertosono.

2. Terkait dengan Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang di Desa Kertosono, khususnya untuk akses jalanan yang sudah rusak merupakan suatu hambatan bagi masyarakat Desa Kertosono. Perbaikan jalanan desa merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, dengan diperbaikinya jalanan di desa, maka UPK dan aparatur desa dapat lebih leluasa untuk menjalin kerjasama dengan pihak pengusaha industri kecil. Dalam hal ini, pemerintah Desa Kertosono dapat membuat usulan kepada pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten untuk pembangunan jalan di desa tersebut.

3. Penguatan Kelembagaan

Diperlukan penguatan kepada UPK Desa Kertosono, melalui berbagai macam pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh

Bappemas Provinsi Jawa Timur, maupun fasilitator dari Kabupaten. hal ini dimaksudkan agar UPK dapat lebih aktif dalam menjalankan program – programnya, bukan hanya melalui program usaha simpan pinjam saja, melainkan dapat melalui program – program usaha lainnya yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, guna menambah pemasukan bagi masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaannya, UPK tentu diawasi oleh aparat desa dan juga oleh masyarakat, perlunya UPK memberikan pemaparan kepada masyarakat desa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap UPK Desa Kertosono sendiri, ada baiknya UPK memberikan laporan kegiatannya tiap enam bulan sekali, atau bahkan kalau memungkinkan tiap bulannya, tidak perlu diberikan pelaporan yang rumit, namun cukup dengan pelaporan yang sederhana dan bersifat kekeluargaan saja. Untuk pendirian usaha tersebut, peranan pemerintah desa sangat penting sekali, UPK sebagai pelaksana harus berkonsultasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengurus desa.

Untuk alternatif pendirian usaha yang dapat dilakukan oleh UPK dengan melihat keadaan Desa Kertosono antara lain adalah :

a. Pembuatan Penggilingan Padi

Wilayah Desa Kertosono dan sekitarnya terdiri dari sebagian besar wilayah pertanian menjadikan peluang pembuatan penggilingan padi menjadi alternatif sektor usaha yang sangat baik, penggilingan padi tersebut dapat dioperasikan di Desa Kertosono sendiri, maupun dioperasikan di desa lainnya, hal tersebut dikarenakan pengusaha penggilingan bukan dari Kecamatan Sidayu sendiri, namun, kebanyakan usaha penggilingan tersebut didatangkan dari Kecamatan Cerme, dan dari Kabupaten Gresik. Modal untuk membeli mesin penggilingan bisa didapatkan dari beberapa hal, antara lain (i) bisa didapatkan dari pemotongan keuntungan hasil usaha penggemukan sapi, dan pengelolaan usaha kredit mikro. (ii)

dapat diperoleh dari sisa modal untuk mendirikan usaha, sehingga UPK dapat membeli dengan mencicil, dikarenakan saat ini di Kabupaten Gresik terdapat toko yang menjual alat penggilingan padi dengan sistem kredit bunga rendah untuk petani. (iii) bekerjasama dengan pihak luar, dalam hal ini dapat bekerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik, kerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik dapat berupa kerjasama dalam hal, UPK membantu penjualan bibit, pupuk, sampai pestisida, sedangkan UPK mendapatkan mesin penggilingan tersebut. Kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik dapat memberikan keuntungan ganda bagi UPK, selain mendapatkan alat penggilingan UPK juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan – bahan pertanian tersebut, dengan kata lain UPK dapat menjadi distributor pupuk bagi wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, UPK dapat memanfaatkan tenaga warga desa, terutama mereka yang bekerja sebagai buruh kasar pengejar proyek, untuk cara pengelolaan penggilingan tersebut, UPK dapat mengajak Departemen Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada warga mengenai cara pengoprasian mesin tersebut.

b. Pembuatan perkebunan baru

Memanfaatkan kemampuan warga dalam pertanian, serta masih tersedianya lahan kosong, maka UPK dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk membuat perkebunan bagi warga, pembuatan perkebunan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga dari warga yang bekerja sebagai buruh kasar pengejar proyek, bibit dan alat – alat pertanian bisa didapatkan dengan bekerjasama dengan pihak swasta, salah satunya dengan perusahaan besar seperti PT. Petrokimia Gresik. Untuk pemasarannya, seperti yang dilakukan disektor pertanian, melalui koperasi desa yang berada di Kecamatan Sidayu, maupun melalui pengepul. Pembagian hasil dapat

dilakukan dengan bagi hasil presentase pendapatan, setelah dipotong modal pembelian alat – alat perkebunan tersebut, dimana para penggarap mendapatkan 70% dan UPK mendapatkan 30%, dengan adanya pemanfaatan tenaga warga, dan kepemilikan perkebunan milik pemerintah desa, maka warga yang menggarap akan lebih merasa menggarap lahannya sendiri, bukan menggarap lahan milik orang lain. Tanaman yang disarankan untuk dibudidayakan adalah tanaman jagung, tebu, cabe, tomat, serta umbi – umbian, UPK dan warga dapat memilih salah satu dari tanaman tersebut untuk diberdayakan.

c. Mengajak Pengusaha Home Industri Untuk Membuka Usaha di Desa Kertosono

Disini UPK harus jeli mencari investor, atau pengusaha *home industri* dengan kapasitas *home industri* yang sudah berdiri mantap dan memiliki pengelolaan manajemen yang professional. UPK dapat menjadi pengelola seperti yang dilakukan oleh Bapak Rohadi, warga hanya menjadi penggarap saja, manajemen semuanya dipegang oleh UPK, hal tersebut dapat memanfaatkan tenaga warga dalam pengerjaannya, dan memberikan pemasukan bagi warga, pembagian hasil antara UPK dengan pihak Investor dapat diatur, kemungkinan yang tidak akan merugikan UPK, dan menarik minat pengusaha tersebut adalah adalah pembagian hasil 80% buat Pengusaha, dan 20% buat UPK setelah dipotong untuk biaya produksi dan pembayaran upah pekerja. Untuk pemasaran barang produksi tersebut dapat dilakukan secara bersama antara pihak Industri dan pihak UPK. Selain itu, UPK dapat menawarkan pemanfaatan pasar krempyeng guna pemasaran produksi dalam jumlah yang tidak besar.

Selain itu, perlunya pendidikan khusus manajerial bagi pengurus UPK, agar lebih jeli dalam menangkap peluang – peluang yang dapat digunakan untuk tujuan pembukaan usaha

yang berbasiskan masyarakat desa sendiri, selain itu UPK Desa Kertosono, perlu lebih melihat atau melakuak studi banding kepada UPK desa lain yang telah lebih maju dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berbasiskan masyarakat desa, dan memiliki struktur, serta hambatan desa seperti halnya Desa Kertosono.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, Burhan (2007); Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya; Kencana; 2007, Jakarta
- Didit B. Sulistyowati. (2009). *Partisipatory Rural Appraisal*. Paparan Kuliah Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, 11 Maret 2009.
- Ife, J.W., (1995); *Community Development: Creating Community Alternatives- vision, Analysis and Practice*; Longman, Melbourne
- Ikatan Alumni ITB (1996); Pembaruan dan Pemberdayaan; Jakarta
- Kuntjoro, Dorodjatun – Jakti; Kemiskinan Di Indonesia; Yayasan Obor Indonesia; 1994, Jakarta
- Moehamad Daniel., Darmawanti., Niieldalina., (2006); PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*), Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyulehan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Petani; Bumi Aksara; 2006, Jakarta
- Petunjuk Tekhnis Operasional Program Gerdu-Taskin Tahap Awal Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Bapemas, Surabaya
- Profil Unit Pengelola Keuangan Semoga Jaya Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik (2010), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
- Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014; Surabaya
- Soesilo, Nining (2002); Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis); Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; Jakarta.
- Suharto, Edi (2005); Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial; Refika Aditama, Bandung

TESIS

Chairina Hanum (2010); Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Tanjung Gundap Kota Batam; Tesis MPKP, Jakarta

Restu U. Pratiwi (2010); Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Mengentaskan Kemiskinan Studi Kasus : Masyarakat Pesisir Desa Pulo Panjang, Kabupaten Serang; Tesis MPKP, Jakarta

Rizal, Suryati (2003); Peran dan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Dalam Perekonomian Desa (Studi Kasus Sumatera Barat); Tesis MPKP, Jakarta

ARTIKEL

Departemen Kelautan dan Perikanan. (2006). *Buku Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2*. Jakarta: Dirjen KP2K Departemen Kelautan dan Perikanan

Kompas (2007); Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia; Jakarta

WEBSITE

<http://www.gerdutaskin-jatim.web.id/v3/index.asp?a=latar-belakang>

<http://www.damandiri.or.id/file/waluyojatiumhuksurakartabab2.pdf>

<http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf>

Ashari (2006); Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya;
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ART4-2c.pdf>, 19 Juli 2010, 13.32

Digital collection Uk. Petra

<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=22&submit.y=25&submit=prev&page=1&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjunkerpe%2Fs1%2Ftmi%2F2009%2Fjunkerpe-ns-s1-2009-25405021-12280-kemiskinan-chapter2.pdf>, diakses pada 18 Juli 2010, 13.25

Dimensi dan Indikator Kemiskinan;

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, 20 Juli 2010, 22.35

Era baru dalam pengentasan kemiskinan Indonesia : Ikhtisar;

<http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Ikhtisar-Laporan-BD-ttg-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 20 Juli 2010, 10.40

- Kartasasmita, Ginandjar; *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*;
<http://www.ginandjar.com/public/09PemberdayaanMasyarakat.pdf>, diakses pada 22 Juli 2010, 10.16
- Kemiskinan dan Mental Miskin*.
<http://ladybee.wordpress.com/2008/05/30/kemiskinan-dan-mental-miskin/>, 22 Juli 2010, 12.38
- Khandker, Shahid; *Does Micro-finance Really Benefit the Poor?, Evidence From Bangladesh*; <http://www.adb.org/poverty/forum/pdf/Khandker.pdf> 19 Juli 2010 , 11.48
- Ortiz, Isabel. *Poverty Reduction*.
http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_poverty.html
- Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, 18 Juli 2010, 18.40
- Purbahati, Agus; *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan* ;
<http://file.upi.edu/Direktori/A%20-%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/MUSTOFA%20KAMIL/konsep%20pemberdayaan%20partisipasi%20dakelembagaan%20dalam%20pembangu.pdf>, diakses pada 20 Juli 2010, 21.22
- Sajogyo (2005); *Pertanian dan Kemiskinan*;
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_5.htm, 20 Juli 2010, 19.35
- SEMERU (2007); *Kapasitas Lembaga Penanggulangan Kemiskinan di Daerah*;
<http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/38.%20%20Kapasitas%20Kelembagaan%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20SEMERU.pdf>, 20 Juli 2010, 14.20
- Wijono, W. Wiloejo (2005); *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*;
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf>, 19 Juli 2010, 15.40
- Yulianto, Trimo (2005); *Fenomena Program – Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (studi kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*;
http://eprints.undip.ac.id/18044/1/TRIMO_YULIANTO.pdf. 15 Juli 2010, 19.23

LAMPIRAN I

Daftar Pihak yang Diwawancara dan FGD

- I. Pihak yang diwawancara, antara lain :
 1. Kepala Desa (Bpk M. Dhofir)
 2. Tokoh masyarakat (Bpk Dharmadji A)
 3. Petani (Bpk Darso)
 4. Peternak dan tukang potong hewan (Bapk Soeratman)
 5. Pekerja konveksi sulam jilbab (Ibu Suliasih)
 6. Ketua UPK (Bpk Maftuh Ahnan)
 7. Bpk Fahrur Rozi (Kabag Pemberdayaan Masyarakat Bapemas Jatim)
 8. Bpk Basyaruddin Hutasuhut (Kepala Biro SDM PT.Petrokimia Gresik)

- II. FGD yang dilakukan antara lain :
 1. FGD dengan kelompok petani
 2. FGD dengan kelompok peternak dan tukang potong hewan
 3. FGD dengan kelompok pekerja konveksi sulam jilbab
 4. FGD dengan kelompok masyarakat umum
 5. FGD dengan para *stakeholder*

LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA UMUM/FGD

Pedoman wawancara umum

1. Administrasi wilayah
2. Struktur Pemerintahan
3. Sejarah perkembangan desa
4. Kondisi geografis wilayah
 - a. Potensi sumber daya alam
 - b. Kondisi sarana dan prasarana
 - c. Aksesibilitas masyarakat ke pasar dan kekota
 - d. Hambatan geografis yang dihadapi masyarakat
5. Kondisi Demografis
 - a. Masyarakat (kesukuan, nilai budaya dan tradisi, hubungan antar masyarakat)
 - b. Cara masyarakat menangani konflik yang terjadi antar warga
 - c. Tingkat pendidikan masyarakat (jumlah guru, jenis pendidikan, persepsi masyarakat terhadap pendidikan, rata-rata pendidikan masyarakat, dll)
 - d. Kesehatan (persepsi masyarakat mengenai kesehatan, penanganan masyarakat terhadap penyakit)
6. Hubungan masyarakat dengan aparat desa
7. Mata pencaharian penduduk desa
8. Permasalahan yang dialami penduduk desa (dapat dikembangkan menurut mata pencahariannya, serta permasalahan umum)
9. Dampak masuknya program Gerdu-taskin kedalam desa
10. Keterlibatan masyarakat dalam program Gerdu-taskin
11. Keaktifan pengurus UPK didalam desa (pemberian penyuluhan, pelaporan kegiatan UPK, musyawarah untuk mendirikan unit usaha, pelaksanaan kegiatan sosial, dll)
12. Harapan masyarakat desa terhadap UPK kedepannya

13. Tujuan utama program Gerdu-taskin (pertanyaan untuk pihak Bapemas)
14. Sejauh mana harapan program Gerdu-taskin (pertanyaan untuk pihak Bapemas)
15. Bagaimanakah keberlanjutan program Gerdu-taskin kedepan (pertanyaan untuk pihak Bapemas)
16. Bantuan yang dapat diberikan perusahaan kepada sebuah desa, termasuk persyaratan desa seperti apa yang dapat dibantu oleh perusahaan (pertanyaan untuk pihak eksternal desa)
17. Kerjasama apa yang memungkinkan dibentuk perusahaan dengan sebuah lembaga desa (kemungkinan kerja sama UPK dengan perusahaan) (pertanyaan untuk pihak eksternal desa)
18. Partisipasi perusahaan terhadap program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan

LAMPIRAN III

HASIL FGD

FGD dilakukan pada tanggal 14 Juli 2010 dan 15 Juli 2010, FGD dibagi menjadi 6 grup, yaitu grup petani, grup peternak dan tukang potong hewan ternak, grup pekerja konveksi, grup buruh kasar, grup umum (dari berbagai kalangan), serta grup *stakeholder*. Selain pembagian grup juga dilaksanakan wawancara dengan fihak – fihak terkait berdasarkan kriteria dan kepentingannya masing – masing.

I. FGD kelompok petani

Hasil yang di bicarakan dalam FGD kelompok petani adalah :

1. Kehidupan petani Desa Kertosono didapatkan melalui hasil menjaga dan mengelola sawah para tuan tanah.
2. Penghasilan yang didapatkan oleh para petani Desa Kertosono dalam satu bulan adalah Rp. 750.000 untuk petani laki – laki dan Rp. 600.000 untuk petani perempuan
3. Hubungan petani dengan aparatur desa cukup baik, hal itu terbukti dengan diadakannya penyuluhan pertanian oleh aparatur desa yang bekerjasama dengan LSM yang masuk ke desa setiap 6 bulan sekali
4. Permasalahan yang dihadapi petani adalah, tidak adanya lahan pekerjaan lain, memasuki masa paceklik, para petani mengadu nasib menjadi buruh kasar di luar Desa Kertosono. Namun, apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan sebagai buruh, mereka akan mengandalkan tabungan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
5. Petani menjadi fihak peminjam dalam program Gerdu-taskin
6. Petani merasakan pinjaman dari UPK sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama saat masa paceklik

tiba dimana mereka tidak mendapatkan upah menggarap sawah serta tidak mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar

7. Pinjaman yang diberikan kepada para petani rata – rata berkisar Rp. 350.000 – Rp 500.000
8. Petani yang dapat meminjam diatas Rp.500.000 merupakan para petani yang suami dan istrinya bekerja juga. Ada beberapa petani yang mendapatkan pinjaman hingga Rp. 750.000, hal tersebut dikarenakan anak petani tersebut bekerja sebagai TKI di luar negeri.
9. Masuknya UPK membuat kebanyakan para petani tidak meminjam dana kepada renternir lagi, hal itu dikarenakan pengajuan pinjaman untuk mereka akan diproses oleh UPK setelah mereka melunasi pinjaman sebelumnya
10. Para petani meminjam dana kepada renternir apabila mereka terhambat dengan suatu permasalahan, seperti harus membayar biaya rumah sakit.
11. Para petani berharap UPK dapat membuat usaha yang dapat memberikan pekerjaan buat mereka, walaupun tidak terlalu besar pendapatan yang diberikan, namun dapat memberikan tambahan penghasilan buat mereka.

II. FGD Kelompok peternak dan tukang potong hewan ternak
Hasil dari FGD peternak dan tukang potong hewan ternak :

1. Para peternak dan tukang potong hewan ternak mendapatkan upah sebesar Rp.850.000 setiap bulannya, ditambah dengan makan siang dari tempat mereka bekerja
2. Para pekerja bidang ini memulai waktu bekerjanya dengan berangkat dari rumah pada pukul 05.00 Wib dan mengakhiri pekerjaannya pada pukul 16.00 Wib setiap harinya, kecuali pada hari minggu mereka mendapatkan libur

3. Para pekerja dibidang ini cenderung tidak memiliki permasalahan keuangan, permasalahan timbul saat ada keluarga mereka yang sakit dan harus mendapatkan perawatan dengan biaya yang cukup tinggi
4. Para pekerja dibidang ini hampir tidak pernah berhubungan langsung dengan aparatur desa, mereka berhubungan dengan aparatur desa pada saat rapat desa ataupun kegiatan desa saja
5. Program Gerdu-taskin bagi kelompok ini cukup berguna untuk memberikan tambahan pemasukan. Mereka menggunakan dana pinjaman dari UPK untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk membayar biaya pendidikan anak mereka
6. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok ini berkisar antara Rp. 350.000 – Rp. 600.000. Ada juga beberapa dari kelompok ini yang mendapatkan pinjaman diatas Rp.600.000, hal itu dikarenakan suami maupun istri bekerja, serta anak mereka bekerja, baik menjadi TKI maupun menjadi buruh pabrik di luar desa
7. Kelompok ini dapat membayar pinjaman dan jasa pinjaman dengan tepat waktu sehingga kelompok ini selalu mendapatkan persetujuan saat mereka mengajukan pinjaman kepada UPK
8. Kelompok ini berharap UPK dapat lebih meningkatkan jumlah pinjaman, serta membuat sebuah usaha yang dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa

III. FGD kelompok pekerja konveksi

Hasil dari FGD kelompok ini adalah :

1. Pekerja kelompok ini mendapatkan upah dari menyulam jilbab, upah yang mereka dapatkan berkisar antara Rp.600.000 – Rp. 1.000.000 tergantung dari jumlah jilbab yang dapat mereka sulam selama 1 bulan. Namun, kebanyakan dari mereka mendapatkan upah sebesar RP. 650.000 – Rp. 700.000 dalam sebulan.

Sampai saat ini belum pernah ada pekerja yang mendapatkan upah maksimum

2. Para pekerja dibidang ini memulai pekerjaannya pada pukul 08.00 Wib – 15.00 Wib
3. Para pekerja dibidang ini cenderung tidak memiliki permasalahan keuangan, permasalahan timbul saat ada keluarga mereka yang sakit dan harus mendapatkan perawatan dengan biaya yang cukup tinggi
4. Para pekerja dibidang ini adalah kaum perempuan, kebanyakan suami dari para pekerja bidang ini adalah buruh kasar dan petani
5. Para pekerja dibidang ini hampir tidak pernah berhubungan langsung dengan aparatur desa, mereka berhubungan dengan aparatur desa pada saat rapat desa ataupun kegiatan desa saja
6. Program Gerdu-taskin bagi kelompok ini cukup berguna untuk memberikan tambahan pemasukan. Mereka menggunakan dana pinjaman dari UPK untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk membayar biaya pendidikan anak mereka
7. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok ini berkisar antara Rp. 350.000 – Rp. 500.000.
8. Kelompok ini dapat membayar pinjaman dan jasa pinjaman dengan tepat waktu sehingga kelompok ini selalu mendapatkan persetujuan saat mereka mengajukan pinjaman kepada UPK
9. Kelompok ini berharap UPK dapat lebih meningkatkan jumlah pinjaman, serta membuat sebuah usaha yang dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa

IV. FGD kelompok Buruh Kasar

Hasil FGD kelompok ini adalah :

1. Kelompok ini bekerja diluar desa Kertosono
2. Kelompok ini tidak bekerja secara rutin, mereka bekerja apabila ada proyek yang membutuhkan tenaga mereka

3. Kelompok ini tidak memiliki pemasukan bulanan.
4. Kelompok ini kebanyakan berjenis kelamin laki – laki, kaum perempuan yang bekerja dibidang ini hanya ada 12 orang saja, dan mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga
5. Pemasukan kelompok ini dalam setiap proyeknya berkisar antara Rp. 750.000 – Rp. 1.500.000. Namun, dalam 1 tahun, kelompok ini maksimal hanya mendapatkan 4 – 5 kali proyek
6. Kelompok ini mengandalkan pemasukan selain dari proyek, juga mengandalkan pekerjaan serabutan, seperti merapikan rumput rumah tangga, sampai membantu pekerjaan rumah tangga lainnya
7. Kelompok ini tersebar sampai ke Kabupaten Gresik
8. Hubungan kelompok ini dengan aparat desa tidak terlalu sering, mereka berhubungan saat ada rapat desa maupun kegiatan desa saja
9. Kelompok ini mendapatkan pinjaman dari UPK berkisar antara Rp.200.000 – Rp. 350.000. Pinjaman yang diberikan pada kelompok ini dapat bertambah dengan mempertimbangkan, apakah ada keluarga mereka yang bekerja juga diluar desa, dalam hal ini adalah anak mereka yang menjadi TKI, atau istri atau suami mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan bulanan
10. Kelompok ini tidak terlalu mudah untuk mendapatkan pinjaman dari UPK, mereka akan mendapatkan pinjaman apabila mereka tidak memiliki record buruk kepada UPK. Maksud dari record buruk adalah tunggakan pinjaman melebihi batas waktu
11. Kelompok ini berharap UPK dapat mendirikan unit usaha yang dapat mereka kelola. Dan dapat memberikan tambahan dana pinjaman kepada kelompok ini

V. FGD kelompok umum

Kelompok umum ini terdiri dari campuran masyarakat yang berdasarkan pekerjaan

Hasil dari FGD kelompok umum ini adalah :

1. Kelompok ini memberikan kesimpulan bahwasannya UPK telah membantu meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan
2. Kelompok ini berpendapat bahwa UPK masih pilih kasih dalam memanfaatkan keahlian masyarakat dalam pendirian unit usaha
3. Kelompok ini berharap UPK dapat membuat suatu unit usaha yang dapat dikelola secara bersama oleh masyarakat
4. Kelompok ini berharap dalam memberikan pinjaman UPK tidak hanya 1 hari dalam sebulan, namun dapat ditambahkan menjadi 2 hari dalam sebulan
5. Kelompok ini juga berharap aparat desa dapat memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana yang ada di desa, terutama perbaikan jalan desa, serta pengadaan genset untuk listrik bagi warga desa yang diletakkan di setiap RT, sehingga warga dapat menikmati listrik pada malam hari

VI. FGD *Stakeholder*

Hasil yang didapatkan dari grup ini adalah :

1. Kelompok ini berpendapat bahwasannya hubungan warga desa dan aparat desa telah berlangsung dengan baik
2. Kelompok ini berpendapat bahwasannya masyarakat desa Kertosono merupakan masyarakat yang rukun, dan jarang terjadi perselisihan antar warga, perselisihan yang terjadi bukan perselisihan yang besar

3. Kelompok ini berpendapat bahwasannya masyarakat desa Kertosono cenderung pasrah akan keadaannya, mereka menerima apa yang mereka dapatkan
4. Kelompok ini berpendapat bahwasannya, penerimaan masyarakat desa terhadap program Gerdu-taskin cukup baik. Jarang sekali ada warga yang menunggak pembayaran pinjaman melebihi waktu yang telah disediakan
5. Kelompok ini berpendapat bahwa masih banyak lahan dan potensi sumber daya alam di desa yang dapat belum dimanfaatkan dengan maksimal
6. Kelompok ini berharap agar UPK mampu memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai unit usaha yang dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat
7. Kelompok ini akan selalu berusaha mengajak LSM maupun lembaga lain untuk member penyuluhan kepada warganya.